



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**



2025 LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik. LKj IP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2025. LKj IP disusun dalam rangka memenuhi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sistematika penyusunan LKj IP berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berkomitmen untuk tetap melakukan perbaikan secara terus-menerus seperti menyempurnakan perencanaan sasaran strategis, penetapan indikator dan target kinerja yang berorientasi hasil, peningkatan kompetensi SDM aparatur serta penguatan manajemen kinerja.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan LKj IP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 ini diucapkan terima kasih.

Selampajang, Maret 2026

BUPATI KEPULAUAN MERANTI
AKBP (Purn.) H. ASMAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GAMBAR v

DAFTAR TABEL vi

DAFTAR GRAFIK viii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1.Latar Belakang 1

1.2.Maksud dan Tujuan 2

1.3.Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti 3

 1.3.1. Kondisi Geografis 3

 1.3.2. Gambaran Umum Demografis 4

 1.3.3. Pendidikan 6

 1.3.4. Kesehatan 8

 1.3.5. Kesejahteraan Sosial 9

 1.3.6. Kondisi Ekonomi 9

 1.3.6.1. Perkotaan Selatpanjang (Kec. Tebing Tinggi) 11

 1.3.6.2. Tanjung Samak (Kec. Rangsang) 12

 1.3.6.3. Teluk Belitung (Kec. Merbau) 12

 1.3.6.4. Tanjung Sari (Kec. Tebing Tinggi Timur)..... 12

 1.3.6.5. Peranggas, Desa Lemang (Kec.Rangsang Barat) 13

 1.3.6.6. Tanjung Padang (Kec.Merbau) 13

 1.3.6.7. Kuala Merbau (Kec. Pulau Merbau) 13

 1.3.6.8. Alai (Kec. Tebing Tinggi Barat) 13

 1.3.6.9. Dakal (Kec. Merbau) 13

 1.3.6.10.Bandul (Kec. Tasik Putri Puyu) 14

 1.3.6.11.Meranti Bunting (Kec.Merbau) 14

 1.3.6.12.Lukit (Kec. Merbau Bagian Selatan) 14

 1.3.6.13.Teluk Ketapang (Kec. Merbau) 14

 1.3.6.14.Tanjung Peranap (Kec. Tebing Tinggi Barat 14

 1.3.6.15.Sungai Tohor (Kec. Tebing Tinggi) 15

 1.3.6.16.Topang (Kec. Rangsang) 15

 1.3.6.17.Segomeng (Kec. Rangsag Barat) 15

 1.3.6.18.Tanjung Medang (Kec.Rangsang) 15

 1.3.6.19.Sidomulyo dan Anak Setatah (Kec. Rangsang) 15

 1.3.7. Potensi Unggulan Daerah 15

 1.3.7.1. Potensi Sektor Pertanian 15



1.3.7.2. Potensi Peternakan 17

1.3.7.3. Potensi Perkebunan 17

1.3.7.4. Potensi Perikanan 18

1.3.7.5. Potensi Pertambangan dan Penggalian 19

1.3.8. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 20

1.4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah 22

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti 22

1.5. Isu Strategis Daerah 24

1.6. Sistematika Penyusunan 26

BAB II PERENCANAAN KINERJA 29

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Daerah 29

2.1.1. Visi dan Misi 29

2.1.2. Tujuan dan Sasaran 32

2.2. Strategi Pembangunan Daerah 33

2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah 37

2.4. Indikator Kerja Utama dan Target Tahun 2023 39

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2023 40

2.6. Jumlah Program dan Anggaran Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 42

BAB III CAPAIAN KINERJA 46

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama 46

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja 49

3.2.1. Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dasar 49

3.2.1.1. Indeks Pembangunan Infratraktur 50

3.2.2. Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau 52

3.2.2.1. Tingkat Konektivitas Antar Pulau 53

3.2.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan 54

3.2.3.1. Indeks Kualitas Air 54

3.2.3.2. Indeks Kualitas Udara 56

3.2.3.3. Indeks Kualitas Lahan 58

3.2.4. Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas 59

3.2.4.1. Indeks Pendidikan 60

3.2.5. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat 61

3.2.5.1. Indeks Kesehatan 61

3.2.6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci 63

3.2.6.1. Angka Melek Aksara Kitab Suci 63

3.2.7. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah



Ibadah	67
3.2.7.1. Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	67
3.2.8. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	68
3.2.8.1. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	69
3.2.9. Meningkatnya Nilai Inventasi Sektor Unggulan	71
3.2.9.1 Nilai Inventasi Sagu Unggulan	72
3.2.10. Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	74
3.2.10.1. Pengeluaran Per Kapita	75
3.2.11. Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan.. Sosial (PPKS).....	76
3.2.11.1. Persentase PPKS Yang Terintegrasi	80
3.2.12. Menurunnya Tingkat Pengangguran	81
3.2.12.1. Tingkat Pengangguran Terbuka	82
3.2.13. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	83
3.2.13.1. Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	83
3.2.14. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan	
Ketentraman Masyarakat	85
3.2.14.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).....	85
3.2.15. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan	96
3.2.15.1. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang	
Dikelola Dan Dikembangkan.....	96
3.2.16. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan.....	98
3.2.16.1. Nilai AKIP	98
3.2.16.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	100
3.2.16.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi	101
3.2.17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	103
3.2.17.1. Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik	104
3.2.17.2. Indeks Pelayanan Publik	106
3.3 Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja	108
3.4 Capaian Indikator Kinerja Utama	108
3.4.1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Merata dan Berkelanjutan..	125
3.4.1.1. Indeks Pembangunan Infrastruktur.....	125
3.4.1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	125
3.4.2. Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	125
3.4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia	126
3.3.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengamalkan Agama.....	127



3.3.3.1. Rata-Rata Capaian Angka Melek Kitab Suci dan Persentase Rumah Ibadah Yang
Aktif Dimanfaatkan 127

3.3.4. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi 127

3.3.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 127

3.3.5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan 129

3.3.5.1. Angka Kemiskinan 129

3.3.6. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kerukunan Umat Beragama,
Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemajuan Kebudayaan Melayu 131

3.3.6.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama 131

3.3.6.2. Indeks Ketentraman Ketertiban 131

3.3.7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi 132

3.3.7.1. Indeks Reformasi Birokrasi..... 132

BAB IV PENUTUP 134

4.1. Kesimpulan 134

4.2. Saran 135

Lampiran 136



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti 3

Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah 32

Gambar 2.2. Bagan Alur Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD 32

Gambar 2.3. Tema/Fokus Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022.
2026 38

Gambar 3.1. SPAM di Kabupaten Kepulauan Meranti 50

Gambar 3.2. Sentra Sagu Sungai Tohor 69

Gambar 3.3. Sentra Kopi Kedabu Rapat 69

Gambar 3.4. Daftar Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Meranti 73

Gambar 3.5. Daftar PMKS di Kabupaten Kepulauan Meranti 77

Gambar 3.6. Pelaksanaan Kegiatan FKUB 84

Gambar 3.7. Sertifikat WTP Kabupaten Kepulauan Meranti 101

Gambar 3.8. Hasil Penilain SPBE Kabupaten Kepulauan Meranti 105

Gambar 3.9. Grafik Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran 121

Gambar 3.10. Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Meranti dan Provinsi
Riau Tahun 2018-2023..... 130



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Luas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan 4

Tabel 1.2. Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per KM²
di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan Tahun 2022 5

Tabel 1.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti 5

Tabel 1.4. Jumlah Sarana Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Jumlah Siswa di
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022..... 8

Tabel 1.5. Produksi Tanaman Padi Tahun 2020 – 2022 16

Tabel 1.6. Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2018 – 2022 16

Tabel 1.7. Data Populasi Ternak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022..... 17

Tabel 1.8. Jumlah Produksi Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2022 18

Tabel 1.9. Jumlah dan Luas Pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti 18

Tabel 1.10. Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan ..
Usaha (persen), 2019 – 2021 20

Tabel 1.11. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten
Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan ..
Usaha 2019 – 2021 21

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026..... 34

Tabel 2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.....
Tahun 2022-2026 38

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti..... 39

Tabel 2.4. Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2022 42

Tabel 2.5. Indikator Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 45

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja 46

Tabel 3.2. Capaian Indikator Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 47

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Infrastruktur 50

Tabel 3.4. Tingkat Konektivitas Antar Pulau 53

Tabel 3.5. Bobot Pencemaran Air 54

Tabel 3.6. Indeks Kualitas Air 55

Tabel 3.7. Indeks Kualitas Udara 57

Tabel 3.8. Kategori Indeks Standar pencemar Udara 57

Tabel 3.9. Indeks Kualitas Udara 57

Tabel 3.10. Indeks Kualitas Lahan 59



Tabel 3.11. Indeks Pendidikan	60
Tabel 3.12. Indeks Kesehatan	62
Tabel 3.13. Angka Melek Aksara Kitab Suci	63
Tabel 3.14. Persentase Rumah Ibadah	67
Tabel 3.15. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	70
Tabel 3.16. Nilai Inventasi Sektor Unggulan	72
Tabel 3.17. Pengeluaran Per Kapita	75
Tabel 3.18. Persentase PPKS Yang Terintegrasi	80
Tabel 3.19. Tingkat Pengangguran Terbuka	82
Tabel 3.20. Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	84
Tabel 3.21. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman,..... Keindahan)	85
Tabel 3.22. Daftar Penyakit Masyarakat (PEKAT) Kabupaten Kepulauan Meranti	86
Tabel 3.23. Perbandingan Capaian indikator kinerja utama sasaran ke-2 4 tahun terakhir Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	86
Tabel 3.24. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan	96
Tabel 3.25. Meningkatnya Infrastruktur Dasar	109
Tabel 3.26. Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	110
Tabel 3.27. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	110
Tabel 3.28. Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	111
Tabel 3.29. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	111
Tabel 3.30. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	112
Tabel 3.31. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah	112
Ibadah	112
Tabel 3.32. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	113
Tabel 3.33. Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	114
Tabel 3.34. Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	115
Tabel 3.35. Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan . Sosial (PPKS)	115
Tabel 3.36. Menurunnya Tingkat Pengangguran	116
Tabel 3.37. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	116
Tabel 3.38. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan	117
Ketentraman Masyarakat	117
Tabel 3.39. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan	118
Ketentraman Masyarakat	118
Tabel 3.40. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	118
Tabel 3.41. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	119
Tabel 3.42 Kategori Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Tahun 2022.....	121



Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Indikator Tujuan dan Relevansinya dengan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2022 dan Akhir Periode RPJMD 122

Tabel 3.44 Nilai, Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas dasar Harga Konstan dengan Migas Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020 – 2022(Milyar Rupiah) 128

Tabel 3.45 Realisasi dan Capaian Nilai Investasi Tahun 2018 - 2022 di Kabupaten Kepulauan Meranti 129

Tabel 3.46 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama 131

Tabel 3.46 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi 132



DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1. Jumlah Angka Kerja dan Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja, 2019 dan 2020 (Orang) 6

Grafik 1.2. Komposisi Penduduk Bukan Angkatan Kerja Kepulauan Meranti 2020 6

Grafik 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2019-2021 7

Grafik 1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2022 7

Grafik 1.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Meranti 2022 9

Grafik 1.6. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas, 2020-2021 (Rupiah)..... 10

Grafik 1.7. Produksi Minyak Bumi Kabupaten Kepulauan Meranti (Juta Barel) 19



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat yang mutlak bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai cita-cita dan tujuan berbangsa dan bernegara. Prinsip tata pemerintahan yang baik mengandung 3 (tiga) pilar utama yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi yang dijabarkan sebagai berikut:

1. akuntabilitas artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan;
2. transparansi artinya penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintah harus memiliki mekanisme yang jelas dan diinformasikan kepada semua pihak; dan
3. partisipasi dan demokrasi artinya fungsi-fungsi pemerintah diselenggarakan tanpa mengabaikan kepentingan bersama serta melibatkan masyarakat dan pihak swasta sebagai bagian dari pilar utama kekuatan Negara.

Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal ini sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaporan dimaksud secara tidak langsung merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat tentang kualitas kinerja yang dihasilkan terkait pengelolaan dan penggunaan sumber-sumber daya yang dimiliki termasuk sumber daya keuangan.

Pelaporan kinerja pemerintahan tersebut dalam hal ini berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) yang disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. LKj IP disusun dalam kurun waktu satu tahun anggaran dan disampaikan setiap awal tahun pelaksanaan anggaran selanjutnya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Pelaporan didasarkan pada realisasi capaian kinerja tahunan perencanaan strategis dan pengaruhnya terhadap proses perwujudan kondisi akhir rencana lima tahunan, yang ditetapkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Sehingga pelaporan ini pada prinsipnya menggambarkan realisasi tahapan pencapaian proses perwujudan cita-cita Kepala Daerah yang dituangkan kedalam visi, misi dan program strategis RPJMD.

Sebagai media pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan

pemerintahan, LKj IP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 secara garis besar memuat rencana kinerja selama kurun waktu tahun 2023. Adapun dasar penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun kedua dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKj IP Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi, selain itu merupakan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada tahun 2025.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 adalah untuk memberikan gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan yang jelas, transparan, akuntabel dan sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/ kegagalan pencapaian target sasaran selama tahun anggaran 2025 yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 antara lain adalah :

1. sebagai media informasi yang menyajikan perencanaan, pengukuran, pelaporan dan evaluasi kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun anggaran 2025;
2. sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025;
3. hasil evaluasi yang berupa kritik dan saran diharapkan menjadi bahan acuan

- untuk perbaikan serta peningkatan kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti di tahun selanjutnya serta masa yang akan datang; dan
4. meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan menerapkan azas transparansi, sistematis dan terukur serta dapat dipertanggungjawabkan.

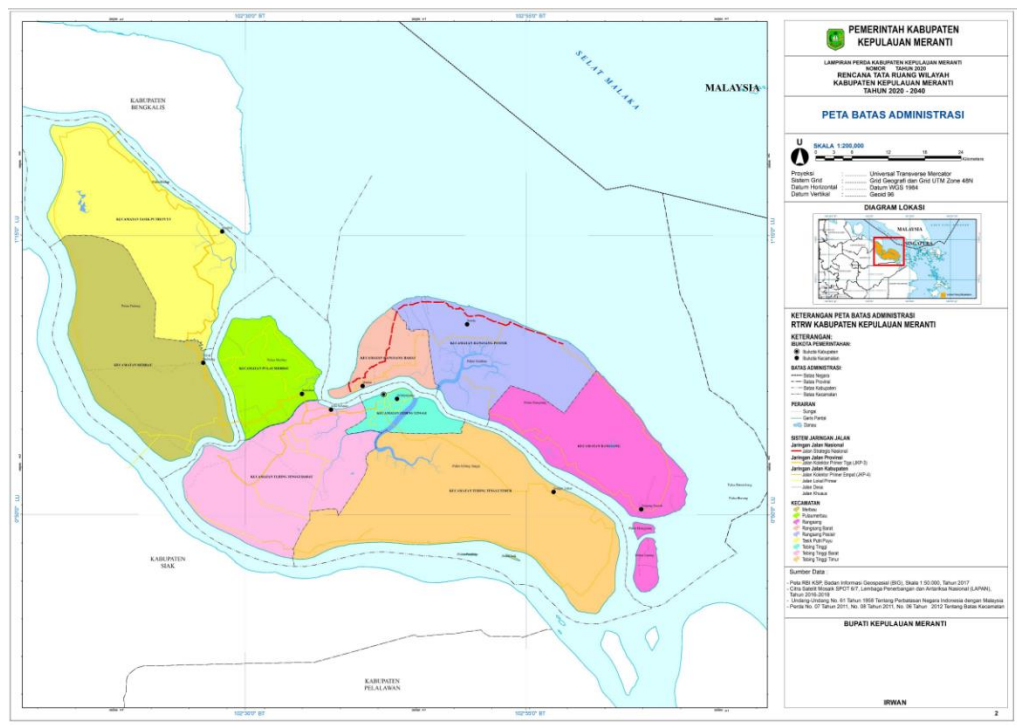
1.3. Gambaran Umum Kabupaten Kepulauan Meranti

1.3.1.Kondisi Geografis

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Bengkalis yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada tanggal 19 Desember 2008. Pembentukan Kabupaten Kepulauan Merantiberdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tanggal 16 Januari 2009tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau.

Secara geografis, kabupaten ini terletak pada 0°42'30" LU – 1°28'0" LU dan 102°12'0"BT – 103°10'0" BT. Adapun batas-batas Kabupaten Kepulauan Meranti seperti disajikan pada Gambar 1.1 adalah sebagai berikut:

1. sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka dan Kabupaten Bengkalis;
2. sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Kabupaten Siak;
3. sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis; dan
4. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Balai Karimun (diProvinsi Kepulauan Riau).



Sumber: RTRW Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2020-2040

Gambar 1.1 Peta Administrasi Kabupaten Kepulauan Meranti

Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti saat ini terdiri dari 9 kecamatan. Jumlah

kelurahan dan desa yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti pada saat ini berjumlah 5 kelurahan dan 96 desa dengan rincian 78 desa swadaya, 21 desa swakarya dan 2 desa swasembada. Hampir seluruh desa merupakan desa pesisir yang berbatasan langsung dengan perairan, serta terdiri atas 293 dusun, 441 Rukun Warga, dan 1.152 Rukun Tetangga.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009, maka luas total wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.707,84 Km², yang terdiri dari 4 pulau utama, 8 pulau kecil dan 18 sungai serta lautan. Total luas menurut Kecamatan dan jumlah desa/kelurahan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Luas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Daerah	Persentase	Jumlah Desa/ Kelurahan
		(KM ²)		
1	Tebing Tinggi	89,38	2,47	5
2	Tebing Tinggi Barat	489,46	13,51	14
3	Tebing Tinggi Timur	800,47	22,09	10
4	Rangsang	420,73	11,61	14
5	Rangsang Pesisir	381,35	10,52	11
6	Rangsang Barat	116,38	3,21	12
7	Merbau	553,82	15,28	9
8	Pulau Merbau	216,14	5,96	11
9	Tasik Putri Puyu	556,22	15,35	10
Total		3.623,93	100,00	101

Sumber : Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka (BPS, 2022)

Kabupaten Kepulauan Meranti umumnya adalah datar dengankelerengan adalah 0 - 8%. Kabupaten Kepulauan Meranti beriklim tropis dengan suhu udara maksimum adalah 25°C - 32°C, dengan curah hujan rata-rata berkisar antara 320,17 mm per tahun dengan kelembaban udara beragam antara minimal 81% dan maksimal 84% (BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka, 2022).

Kabupaten Kepulauan Meranti beribukota di Selatpanjang, yang berada di Pulau Tebing Tinggi, dipimpin oleh AKBP (Purn) H. Asmar sebagai Plt. Bupati sebagai Kepala Daerah yang terpilih periode 2021-2026 melalui proses demokrasi Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung secara serentak dan dilantik pada tanggal 25 Februari 2021.

1.3.2. Gambaran Umum Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti per Desember 2024 jumlah penduduk yang ada sebanyak 212.289 jiwa. perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, di Kepulauan Meranti pada tahun 2023 adalah 106,97. Ini menunjukkan bahwa untuk setiap 100 jiwa penduduk perempuan, terdapat 106 hingga 107 jiwa penduduk laki-laki. Penduduk terbanyak

terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 66.400 jiwa. Sedangkan penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Tebing Tinggi Timur sebanyak 14.200 jiwa dengan kepadatan 58,44 jiwa/km² artinya setiap km² wilayah seluas 3.707,84 rata-rata ditempati 58,44 orang penduduk, secara lengkap tersaji pada tabel di bawah ini

Tabel 1.2 Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk Per KM² di Kabupaten Kepulauan Meranti Menurut Kecamatan Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu jiwa)	Kepadatan (Jiwa/KM ²)
		Jumlah	
1	Tebing Tinggi	66,260	740,75
2	Tebing Tinggi Barat	19,688	40,19
3	Tebing Tinggi Timur	14,321	22,46
4	Rangsang	20,797	65,04
5	Rangsang Pesisir	19,828	100,08
6	Rangsang Barat	20,248	211,69
7	Merbau	16,055	30,06
8	Pulau Merbau	17,141	79,33
9	Tasik Putri Puyu	17.951	31,85
Total		212,289	67,52

Sumber : Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2025

Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025 adalah 1,94 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk pada tahun 2021.

Tabel 1.3. Indikator Kependudukan Kabupaten Kepulauan Meranti

Uraian	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk (Jiwa)	213532	211,8	211,8	212.289
Kepadatan Penduduk (Jiwa/KM ²)	57,59	58,44	58,44	67.52

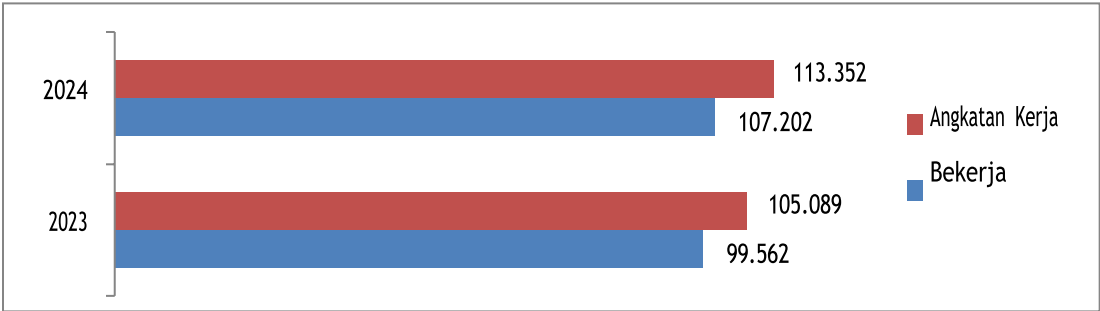
Sumber.: Kabupaten Meranti Dalam Angka 2024

Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri atas etnis Melayu, ditambah etnis Jawa, Tionghoa, Minang, Batak, Bugis, dan Banjar. Kondisi demikian menciptakan masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai masyarakat yang heterogen, dengan beragam etnis dan suku bangsa yang berdampingan dan saling berbaur satu dengan yang lain secara damai, rukun dan harmonis.

Penduduk usia kerja didefinisikan sebagai penduduk berumur 15 tahun atau lebih. Mereka terdiri dari Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Pada tahun 2023, Penduduk Kepulauan Meranti berusia 15 tahun atau lebih sebanyak 159.910 orang.

Keadaan ketenagakerjaan di Kepulauan Meranti pada tahun 2022 hingga 2023 secara umum mengalami peningkatan. Jumlah penduduk yang bekerja pada tahun 2023 sebanyak 99.562 orang, 95,57 persen dari jumlah angkatan kerja 105.089 orang.

Mengalami peningkatan dari tahun 2022, dimana penduduk yang bekerja ada sebanyak 86.775 orang dari jumlah angkatan kerja 91.823 orang.



Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2025

Grafik 1.1. Jumlah Angka Kerja dan Penduduk Usia 15 Tahun yang Bekerja, 2023 dan 2024 (Orang)

Angkatan kerja terbagi menjadi penduduk yang bekerja dan pengangguran. Jumlah pengangguran di Kepulauan Meranti pada tahun 2025 sebesar 5,17 persen.



Sumber: Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2025

Grafik 1.2. Komposisi Penduduk Bukan Angkatan Kerja Kepulauan Meranti 2025

1.3.3. Pendidikan

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Angka Partisipasi Murni (APM) menunjukkan banyaknya penduduk usia sekolah yang sudah memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai usia resmi jenjang pendidikannya. Jika APM=100, berarti se- luruh anak usia sekolah bersekolah tepat

waktu. pada tahun 2023, APM jenjang pendidikan SD berada pada poin 98,84, jenjang SMP berada pada poin 83,31 dan SMA berada pada poin 64,84.

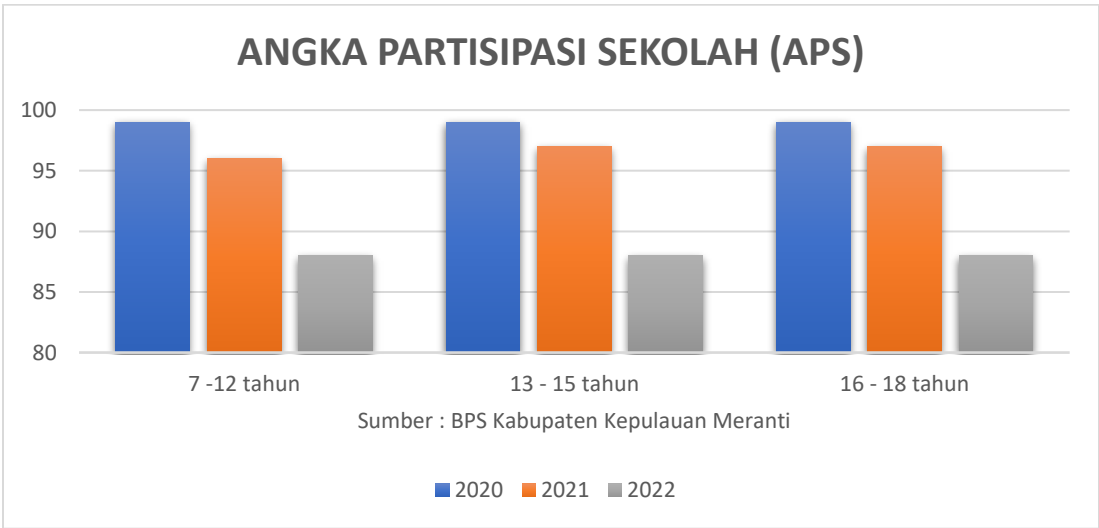
Grafik APM SD, SMP, dan SMA Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2024

98.73	91.62	98.84	98.83
88.36	82.75	83.31	75.16
70.39	70.09	64.84	68.98
2021	2022	2023	2024
— SMA — SMP — SD			

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

Grafik 1.3. Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan 2021-2024

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah.



Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Grafik 1.4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) 2020-2022

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan harapan lamanya seorang anak akan bersekolah (dalam tahun). HLS Kepulauan Meranti pada tahun 2022 adalah 12,84 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2022 memiliki peluang untuk ber- sekolah selama 12,84 tahun atau setara dengan Diploma I (BPS RIAU).

Rata-rata lama sekolah penduduk di Kepulauan Meranti adalah 7,48 tahun. Artinya, secara rata-rata penduduk Meranti usia 25 tahun keatas, hanya menempuh pendidikan selama 7,88 tahun atau hampir menamatkan kelas 2 SLTP (BPS RIAU). Selain dari kesadaran masyarakat, Pemerintah Daerah juga senantiasa berusaha untuk

memberikan yang terbaik dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan fasilitas yang disediakan mulai dari gedung sampai kepada tenaga pengajarnya. Keragaman jumlah sarana dan tenaga pendidik serta murid berdasarkan jenjang pendidikan disajikan pada Tabel 1.5

Tabel 1.5 Jumlah Sarana Pendidikan, Tenaga Pendidik dan Jumlah Siswa di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2023

No	Jenjang Pendidikan	Sarana Pendidikan	Tenaga Pendidik	Jumlah siswa
1	Taman Kanak-Kanak	70	337	2.722
2	Sekolah Dasar	170	2.443	20.498
3	Madrasah Ibtidaiyah	15	179	1.257
4	Sekolah Menengah Pertama	48	1.047	6.284
5	Madyasah Tsanawiyah	36	653	4.247
6	Sekolah Menengah Atas	24	454	5255
7	Madrasah Aliyah	19	302	1.814
8	Sekolah Menengah Kejuruan	6	127	1.813
9	Perguruan Tinggi	4	23	468

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

1.3.4. Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang dimiliki Kab. Kepulauan Meranti pada Tahun 2023 adalah: 1 Rumah Sakit Umum Daerah (Tipe C), 10 Puskesmas Induk (tersebar di seluruh kecamatan), 30 Puskesmas Pembantu, 23 Polindes , 332 Posyandu, 19 Apotik/Depot Obat, dan 4 Poliklinik/ Praktek Dokter. Sedangkan Tenaga Kesehatan yang dimiliki adalah: 60 Orang Dokter, 16 Orang Dokter Spesialis, 15 Orang Dokter Gigi, 250 Orang tenaga paramedis perawatan, 271 Orang Bidan, 12 Penyuluh Kesehatan, 21 Orang ALTM, 8 Orang Radiologi, 7 Orang Fisioterapi, 47 Orang Farmasi, 16 Orang Nutrisionis, dan 9 Orang Tenaga Sanitasi Lingkungan.

Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai salah satu indikator derajat kesehatan masyarakat merupakan rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakat. Idealnya AHH dihitung berdasarkan angka kematian menurut umur (*Age specific death rate/ASDR*) yang datanya diperoleh dari registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian.

AHH merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan adanya peningkatan selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2022, UHH di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 68,09 (IPM Riau 2018-2022) artinya seorang penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti yang lahir pada tahun 2020 memiliki harapan untuk hidup selama 68 tahun.

1.3.5. Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan sosial tidak terlepas dari Angka Kemiskinan. Semakin menurunnya angka kemiskinan suatu daerah memberikan gambaran semakinbaiknya perhatian Pemerintah Daerah dalam usahanya mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022 , Pada tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kepulauan Meranti Sebanyak 52.518 jiwa (25,28 persen), terjadi peningkatan pada tahun 2021 sebesar 53.789 jiwa (25,68) atau bertambah sebesar 1.271 jiwa, trend ini terhenti pada tahun 2022 dimana terjadi penurunan signifikan, dimana jumlah penduduk miskin sebesar 50.906 jiwa (23,84 persen) atau berkurang sebesar 2.883 jiwa. Penurunan ini dipengaruhi oleh usaha Pemerintah Daerah dalam peningkatan kualitas masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup mereka mulai dari perikanan, peternakan, pertanian dan perkebunan dengan program penyuluhan dan bantuan lainnya, serta karena berakhirnya pandemi COVID-19, sehingga perekonomian kembali pulih dan meningkatkan taraf hidup masyarakat. Angka kemiskinan disajikan pada Grafik 1.4 berikut.

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	445.025	53,05	30,89
2018	462.535	51,17	28,99
2019	483.377	49,89	27,79
2020	520.955	47,10	26,93
2021	542.599	48,50	25,28
2022	568.639	45,25	25,68
2023	623.576	43,82	23,84
2024	661.863	44,34	22,98
2025	673.296	39,41	23,15

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025

Grafik 1.5. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Kepulauan Meranti 2025

1.3.6. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak menggambarkan bahwa yang mengalami pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat itu sendiri, justru sebaliknya yang mendorong pertumbuhan adalah unit-unit usaha yang dimiliki oleh pedagang bermodal besar.

Dengan demikian, untuk mengetahui perkembangan pembangunan dan

perekonomian, seharusnya yang diutamakan dan menjadi target adalah indikator-indikator yang lebih menyentuh bagaimana gambaran tingkat kesejahteraan masyarakat yang sebenarnya. Indikator tersebut misalnya terpenuhi tidaknya kebutuhan-kebutuhan primer setiap warga negara. Hal inibukan berarti mengabaikan pertumbuhan ekonomi, tetapi hanya tidak menjadikannya sebagai target utama dan asas pembangunan.

Berdasarkan data PDRB Tahun 2024 yang dirilis oleh BPS Kabupaten Kepulauan Meranti, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2024 tercatat sebesar 4,81 persen. Kegiatan perekonomian di Kabupaten Kepulauan Meranti didominasi oleh empat sektor besar, yaitu sektor Konstruksi (17,57%), sektor transportasi dan pergudangan (6,65%), sektor pertambangan dan penggalian (7,89%), dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (2,98%).

Kondisi ekonomi juga dapat dilihat dari perubahan persentase pengeluaran yang dialokasikan untuk non-makanan. Semakin tinggi persentase pengeluaran non-makanan dapat mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan. Pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kepulauan Meranti pada tahun 2023 sedikit meningkat dibandingkan tahun 2021. Jika dilihat dari kelompok komoditas pengeluaran perkapita, diketahui bahwa polakonsumsi rumah tangga di Kepulauan Meranti setiap tahunnya masih didominasi oleh keperluan konsumsi makanan. Pada tahun 2023, sekitar 52,67 persen dari total pengeluaran per kapita digunakan untuk konsumsi makanan, sedangkan sisanya sebesar 47,33 persen digunakan untuk keperluan konsumsi non makanan.

Kelompok Komoditas/Commodity Group	2024	2025
(1)	(2)	(3)
Makanan/Food		
Padi-padian/Cereals	7,54	6,91
Umbi-umbian/Tubers	0,80	0,74
Ikan/udang/cumi/kerang/Fish/shrimp/common squid/shells	7,22	6,65
Daging/Meat	1,90	2,38
Telur dan susu/Eggs and milk	2,86	3,44
Sayur-sayuran/Vegetables	5,22	5,22
Kacang-kacangan/Legumes	0,92	0,86
Buah-buahan/Fruits	2,14	2,80
Minyak dan kelapa/Oil and coconut	2,00	2,00
Bahan minuman/Beverage stuffs	2,41	2,09
Bumbu-bumbuan/Spices	1,44	1,33
Konsumsi lainnya/Miscellaneous food items	1,21	1,19
Makanan dan minuman jadi/Prepared food and beverages	13,56	13,42
Rokok/Cigarettes	9,15	7,52
Jumlah makanan/Total food	58,34	56,56
Bukan makanan/Non-food		
Perumahan dan fasilitas rumah tangga/Housing and household facilities	23,50	19,94
Aneka barang dan jasa/Goods and services	9,15	12,37
Pakaian, alas kaki, dan tutup kepala/Clothing, footwear, and headgear	3,56	3,75
Barang tahan lama/Durable goods	1,59	1,45
Pajak, pungutan, dan asuransi/Taxes and insurance	3,86	3,47
Keperluan pesta dan upacara/kenduri/Parties and ceremonies	NA	2,45
Jumlah bukan makanan/Total non-food	47,11	43,44
Jumlah/Total	100,00	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Kepulauan Meranti Dalam Angka 2025

Grafik 1.6. Rata-rata Pengeluaran Penduduk Per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas, 2021-2022 (persentase)

Data Pengeluaran dan konsumsi penduduk menurut kelompok barang diperoleh dari Survei Sosial Ekonomi (SUSSENAS) BPS Kabupaten Kepulauan Meranti di Indonesia. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2024 didapatkan hasil bahwa sebanyak 13,42% pengeluaran penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti ada dikonsumsi makanan dan minuman disusul konsumsi rokok sebesar 7,52%. Dengan demikian, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk. Perubahan komposisi yang terjadi digunakan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan.

Analisis ekonomi wilayah untuk menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah tumbuh cepat. Kemampuan daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan / kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang.

Kategori lapangan usaha unggulan dapat dilihat dari jumlah aktivitas ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan nilai tambah yang dihasilkannya. Tidak semua kategori atau sektor ekonomi menjadi prioritas pembangunan di Kepulauan Meranti. Oleh sebab itu, beberapa kategori selain sektor unggulan dapat dikatakan sebagai sektor potensial. Berdasarkan hasil pengkategorian sektor unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan *Economic based Approach*, yang tergolong sektor Unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah: (1) Industri Pengolahan; (2) Konstruksi; (3) Transportasi, Pergudangan, Informasi, & Komunikasi; dan (4) Jasa Pendidikan.

Sektor-sektor ini diidentifikasi padat tenaga kerja dan berpotensi besar dalam penyerapan tenaga kerja. Keempat sektor ini merupakan sektor unggulan menurut Survey Sensus Ekonomi Nasional Tahun 2016 (SE 2016), bersama dengan sektor pertanian, perdagangan dan pariwisata. Sinergitas data SE 2016 Listing dengan dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD) mengkategorikan sektor lainnya sebagai sektor potensi. Sektor tersebut adalah: (1) Pertambangan dan Penggalian; (2) Pengadaan Energi dan Pengelolaan Air; (3) Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (4) Keuangan, Real Estat, & Jasa Perusahaan; dan (5) Jasa-Jasa Lainnya.

Sementara itu, RPJPD 2005-2025 telah menetapkan beberapa lapangan usaha sebagai sektor unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan potensi dasar, potensi penunjang dan kendala yang dihadapi setiap wilayah. Dengan pertimbangan utamanya adalah kebutuhan dan geografis daerah, maka arah pengembangan

disesuaikan dengan karakteristik daerah, yaitu:

1.3.6.1. Perkotaan Selatpanjang (Kec. Tebing Tinggi)

Wilayah pelayanannya adalah pusat-pusat perkotaan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berfungsi sebagai:

1. Pusat niaga regional (perdagangan dan jasa);
2. Pengembangan kawasan industri berbasis pertanian (pengolahan sagu);
3. Pusat pengembangan permukiman perkotaan;
4. Pusat kegiatan wisata kuliner;
5. Pusat pendidikan dibidang pertanian dan perikanan;
6. Pusat pengembangan fasilitas pelayanan publik dengan skala pelayanan Kabupaten.

1.3.6.2. Tanjung Samak (Kec. Rangsang)

Wilayah pelayanannya adalah Tanjung Medang, Tanjung Kedabu, Pulau Topang, dan Tanjung Sari serta pusat-pusat permukiman perkotaan di sekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Pusat pemerintahan Kecamatan;
2. Sentra komoditi kelapa, karet dan sagu serta sentra perikanan tangkap dan budidaya;
3. Pusat kegiatan tambang timah Pulau Topang;
4. Industri berbasis pertanian, khususnya industri pengolahan hasil perkebunan kelapa yang memiliki turunan industri yang beragam (minyak kelapa, *nata de coco*, arang kelapa, alas/keset dari sabut kelapa dan bahan interior gedung berbahan batang kelapa yang memiliki nilai ekonomis sangat tinggi);
 - a. Pengembangan sentra perikanan dengan pola minapolitan di Tanjung Samak;
 - b. Pengembangan permukiman;
 - c. Pusat niaga skala kecamatan;
 - d. Pengembangan kegiatan ekowisata (Tasik).

1.3.6.3. Teluk Belitung (Kec. Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah pusat-pusat permukiman di Kecamatan Merbau. Berfungsi sebagai:

1. Pusat pemerintahan Kecamatan Merbau;
2. Sentra komoditi pertanian (sagu, karet dan perikanan);
3. Pengembangan permukiman;
4. Pusat niaga skala kecamatan.

1.3.6.4. Tanjung Sari (Kec. Tebing Tinggi Timur)

Wilayah pelayanannya adalah pusat-pusat permukiman di wilayah Kecamatan Tebing Tinggi Timur dan Pulau Topang. Berfungsi sebagai:

1. Industri pengolahan sagu yang menyatu dengan kawasan pengembangan pelabuhan pengumpan regional dan nasional;
2. Pusat kegiatan niaga (perdagangan dan jasa) lokal dan regional;
3. Sentra komoditi pertanian (sagu, kelapa, perikanan);
4. Pengembangan permukiman perkotaan.

1.3.6.5. Perangas, Desa Lemang (Kec. Rangsang Barat)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusat permukiman di wilayah Kecamatan Rangsang Barat. Berfungsi sebagai:

1. Permukiman perkotaan;
2. Sentra komoditi pertanian (kopi, sagu, karet, pinang, kakao dan sentrakomoditi hortikultura);
3. Pusat niaga komoditi pertanian dengan orientasi ekspor.

1.3.6.6. Tanjung Padang (Kec. Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusatpermukiman perkotaan danperdesaan di Kecamatan Merbau bagian Utara. Berfungsi sebagai:

1. pusat niaga skala pelayanan kecamatan;
2. Pusat pengembangan energy/listrik gas bumi;
3. Sentra pertanian (berbasis karet, sagu dan perikanan);
4. Pusat permukiman;
5. Lokasi pengembangan pelabuhan Ro-Ro sebagai pusat interkoneksi atau perpindahan moda angkutan laut dan darat yang menghubungkan Pelabuhan Sei Selari (Bengkalis) dan Tanjung Padang (Meranti).

1.3.6.7. Kuala Merbau (Kec. Pulau Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusatpermukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Rencana pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Kawasan permukiman;
3. Kawasan niaga skala pelayanan lokal;
4. Sentra pengembangan pertanian (sagu dan karet).

1.3.6.8. Alai (Kec. Tebing Tinggi Barat)

Wilayah pelayanannya adalah pusat-pusat permukiman di Kecamatan TebingTinggi

Barat. Berfungsi sebagai:

1. Pusat pemerintahan kecamatan;
2. Pusat pengembangan permukiman;
3. Kegiatan perdagangan dan jasa skala pelayanan kecamatan;
4. Sentra pertanian (sagu dan karet).

1.3.6.9. Dakal (Kec. Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusat permukiman disekitarnya yang berciri perkampungan Melayu. Berfungsi sebagai:

1. Kawasan pertanian (sagu, karet dan perikanan);
2. Lokasi kegiatan perdagangan lintas batas;
3. Kawasan pengembangan permukiman dengan mempertahankan ciri perkampungan Melayu.

1.3.6.10. Bandul (Kec. Tasik Putri Puyu)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusat permukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Pusat pemerintahan kecamatan dan permukiman;
2. Kegiatan niaga dengan skala pelayanan kecamatan;
3. Sentra produksi sagu dan karet;
4. Lokasi kegiatan perikanan yang dikembangkan dengan polaminapolitan.

1.3.6.11. Meranti Bunting (Kec. Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah pusat pusat permukiman. Berfungsi sebagai:

1. Kawasan pengembangan pertanian (sagu, karet, kelapa dan perikanan);
2. Kawasan permukiman.

1.3.6.12. Lukit (Kec. Merbau bagian Selatan).

Berfungsi sebagai:

1. Kawasan pengembangan pertanian (sagu, karet, kelapa dan perikanan);
2. Kawasan permukiman;
3. Lokasi transit/lokasi pelabuhan roro yang menghubungkan Buton dan Selatpanjang.

1.3.6.13. Teluk Ketapang (Kec. Merbau)

Wilayah pelayanannya adalah wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti. Berfungsi sebagai:

1. Kawasan permukiman;
2. Lokasi transit/Pelabuhan Teluk Ketapang;

3. Kawasan niaga skala pelayanan local;
4. Sentra pengembangan pertanian (sagu dan karet).

1.3.6.14. Tanjung Peranap (Kec. Tebing Tinggi Barat)

Wilayah pelayanannya adalah Kampung Balak, Mengkikip dan pusat-pusat permukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Pusat niaga (perdagangan dan jasa);
2. Pusat perpindahan moda angkutan dari Buton ke Selatpanjang;
3. Sentra komoditi pertanian (sagu karet dan kakao);
4. Kegiatan wisata alam (ekowisata) dan pengembangan permukiman.

1.3.6.15. Sungai Tohor (Kec. Tebing Tinggi)

Wilayah pelayanannya adalah pusatpusatpermukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Sentra pengembangan pertanian (sagu, karet dan kelapa);
2. Kawasan pengembangan.

1.3.6.16. Topang (Kec. Rangsang)

Berfungsi sebagai :

1. Lokasi pengembangan sentra Industri Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Lokasi transit/lokasi pelabuhan roro yang menghubungkan Buton dan Selatpanjang.

1.3.6.17. Segomeng (Kec. Rangsang Barat)

Wilayah pelayanannya adalah pusatpusatpermukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Lokasi pengembangan pertanian (padi, sagu dan karet);
2. Pengembangan permukiman.

1.3.6.18. Tanjung Medang (Kec. Rangsang)

Wilayah pelayanannya adalah pusatpusatpermukiman disekitarnya. Berfungsi sebagai:

1. Lokasi pengembangan pertanian dalam arti luas;
2. Pusat kegiatan niaga local;
3. Kawasan pelabuhan;
4. Lokasi kegiatan tambang timah (disekitar Pulau Burung);
5. Lokasi pengembangan permukiman.

1.3.6.19. Sidomulyo & Anak Penyagun (Kec. Rangsang).

Berfungsi sebagai Sentrapertanian (sagu, karet, kopi, pinang dan kelapa).

1.3.7. Potensi Unggulan Daerah

Analisis ekonomi wilayah diperlukan untuk menentukan sektor-sektor yang perlu dikembangkan agar perekonomian daerah dapat tumbuh dengan cepat. Kemampuan daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan / kelemahan di wilayahnya menjadi penting. Sektor yang memiliki keunggulan,memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapatmendorong sektor-sektor lain untuk berkembang, antara lain:

1.3.7.1. Potensi Sektor Pertanian

Luas lahan pertanian di Kabupaten Kepulauan Meranti pada Tahun 2024 seluas 6.460 Ha. Lahan terluas terletak di Kecamatan Rangsang Barat seluas 1.413 Ha. Lahan sawah yang dimiliki merupakan sawah tadah hujan dimana tidak semua kecamatan di Kepulauan Meranti memiliki areal persawahan. Lahan sawah tadah hujan hanya ada di Kecamatan Rangsang Barat (2.670 Ha), Rangsang (648 Ha), Merbau (45 Ha), Pulau Merbau (340 Ha), Tebing TinggiTimur (166 Ha) dan Rangsang Pesisir (720 Ha). Total Produksi Padi Tahun 2020 sebesar 19.800 Ton.

Tabel 1.5 Produksi Tanaman Padi Tahun 2020 - 2022

NO	KECAMATAN	LUAS TANAM (Ha)			PANEN (Ha)			PRODUKSI GKP(Ton)			PRODUKSI BERAS (Ton)		
		2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
1	TEBING TINGGI TIMUR	120	70	115	125	120	100	438	420	300	274	264	188
2	RANGSANG	350	350	280	335	350	350	1.173	1.225	1.050	736	769	659
3	RANGSANG BARAT	1.370	1.335	1.413	1.538	1.365	1.335	5.383	4.778	5.073	3.377	2.997	3.183
4	RANGSANG PESISIR	480	450	504	480	420	420	1.680	1.470	1.596	1.054	992	1.001
5	MERBAU	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PULAU MERBAU	120	120	110	-	40	190	-	124	390	-	77	239
7	TASIK PUTRI PUYU	30	30	30	-	30	30	-	70	75	-	42	45
JUMLAH		2.500	2.335	2.452	2.478	2.325	2.425	8.673	8.087	8.484	5.441	5.071	5.315

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian 2024

Pada tahun 2024, hasil produksi tanaman pangan terbesar berasal dari beras, yakni sebanyak 118,15 ton. Produksi terbesar lainnya adalah sagu sebesar 16,8 ton.

Tabel 1.6 Produksi Tanaman Pangan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2020 – 2024

NO	KOMODITI PANGAN	TAHUN				
		2024 (Ton)	2023 (Ton)	2022 (Ton)	2021 (Ton)	2020 (Ton)
1	Beras	20.300,66	20.463,60	19.874,4	22.818,71	20.498,4
2	Jagung	106,99	107,85	322,8	65	52
3	Ubi Kayu	883,49	826,03	1.120,6	125,80	124,75
4	Ubi Jalar	434,64	405,22	381,16	77,90	76,86
5	Sagu	1.667,59	272,75	4,46	117,95	115,42
6	Daging	693,39	3.884,75	36,92	93,70	92,36
7	Telur	646,90	1.704,15	1.847,56	125,56	123,708
8	Kedelai	3.206,92	4.318,53	1.161,68	12,2	13,8
9	Kacang Tanah	1.690,58	124,684	62,83	9,2	9,5

10	Kacang Hijau	1.981,27	23,38	20,9	1,4	1,2
11	Sayuran	2.682,56	7.141,28	8.881,14	42,4	39,2
12	Buah-Buahan	4.284,14	3.869,1	4.545,3	86,6	4,6
JUMLAH		38.579,14	43.141,32	38.259,75	23.576,42	21.151,80

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

1.3.7.2. Potensi Peternakan

Populasi ternak di Kab. Kepulauan Meranti mengalami fluktuatif, setiap tahunnya mengalami kenaikan maupun penurunan populasi. Adapun jumlah populasi ternak Kab. Kepulauan Meranti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1.7 Data Populasi Ternak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022

NO	JENIS TERAK	JUMLAH POPULASI (EKOR)	JUMLAH PEMOTONGAN (EKOR)	IKU (KARKAS*JLH PEMOTONGAN + POPULASI)	PRODUKSI/ JENIS(KG)	PRODUKSI/JENIS (TON)
1	SAPI POTONG	2.957	356	127,6	377.313,2	377,313
2	KAMBING	5.565	450	10,6	58.989	58,989
3	BABI	484	410	85	41.140	41,14
4	AYAM RAS	66.294	89.082	1,5	99.441	99,441
5	AYAM BURAS	53.286	4.125	1,5	79.929	79,929
6	ITIK	725	192	1,8	1.305	1,305
7	AYAM PETELUR	-	9.800	0,06	588	0,588
JUMLAH				226	65.870,5	658,705

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2024

Terlihat pada data di atas jenis ternak yang mengalami Penurunan paling tinggi dari Tahun 2018-2019 adalah kerbau dengan penurunan sebesar 14 , sedangkan ternak yang mengalami penurun paling besar adalah ayam ras petelur dengan penurunan sebesar 10,295.

Standar kecukupan masyarakat Indonesia dalam memenuhi konsumsi protein, pangan dan gizi yang berimbang dari pangan hewani masih rendah yaitu 3,50 gram/kapita/hari atau setara dengan 1,28 kg daging/kapita/tahun dan susu 4,93 kg/kapita/tahun. Saat ini protein hewani di Provinsi Riau padatahun 2019 mencapai 6,96 kg daging/kapita/tahun, 9,17 kg telur/kapita/tahun dan 3,64 kg susu/kapita/tahun. Berdasarkan data tersebut terjadi kenaikan sebanyak 3,3 % terhadap konsumsi daging dan 14,39% terhadap konsumsi telur pada tahun 2011. sedangkan di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2019 Konsumsi Daging sapi berkisar 1,28 Kg/Jiwa/Tahun, Daging Ayam 135,05 Kg/Jiwa/Tahun.

1.3.7.3. Potensi Perkebunan

Komoditas perkebunan yang potensial di Kabupaten Kepulauan Meranti ada Lima komoditas yakni: Sagu, Karet, Kelapa, Kopi dan Pinang.

Sektor Perkebunan terutama ko- moditas sagu merupakan sektor unggulan di Kepulauan Meranti. Produksi sagu tahun 2020 dari subsektor perkebunan sebesar

243,708 ton. Produksi sagu paling besar berasal dari KecamatanTebing Tinggi Timur yaitu mencapai 34,56 persen diikuti oleh Kecamatan Tebing Tinggi Barat yaitu sebesar 27,82 persen. Hasil perkebunan lainnya adalah kelapa (29.183 ton), karet (12.286 ton), kopi (1.913 ton) dan pinang (226,218 ton).

Tabel 1.8 Jumlah Produksi Perkebunan Kabupaten Kepulauan Meranti, 2022

No	KOMODITI	TBM(Ha)	TM (Ha)	TTR (Ha)	JMLH (Ha)	PETANI (KK)	PRODDUKSI (TON/Thn)	PRODUKTIVITAS (Kg/Ha)	JUMLAH PABRIK (UNIT)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	SAGU	13.165	27.121	-	40.286	16.069	247.013,869	9.108	97
2	KELAPA	2.535	26.349	4.031	32.915	16.435	29.257,661	1.110	
3	KARET	2.126	12.636	6.194	20.956	13.426	12.402,223	981	
4	KOPI	1.274	1.027	140	2.441	2.063	1.913,543	1.863	
5	PINANG	135	403	9	547	2.294	245,350	609	
	JUMLAH	19.235	67.536	10.374	97.145	50.287	290.833	13.672	97

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun 2022

1.3.7.4. Potensi Perikanan

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan minapolitan (sebagai kota berbasis perikanan atau perikanan di daerah kota). Hampir 1/3 luas kawasan Kab. Kepulauan Meranti merupakan perairan dan pesisir pantai. Berbatasan langsung dengan selat malaka dan terdiri dari 4 Pulau Besar (Tebing Tinggi, Padang, Rangsang dan Merbau) yangkawasannya dikelilingi laut dan sungai. Rencana pengembangan perikanan di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain meliputi pengembangan perikananbudidaya dan tangkap.

Tabel 1.9 Jumlah dan Luas Pulau di Kabupaten Kepulauan Meranti

No	Nama Pulau	Luas (ha)	No	Nama Pulau	Luas (ha)
1	Tebing Tinggi	136.167,64	7	Menggung	645,67
2	Padang	111.021,73	8	Jadi	59,72
3	Rangsang	86.658,46	9	Panjang	30,86
4	Merbau	21.543,98	10	Dedap	1,52
5	Topang	2.931,33	11	Burung	0,69
6	Setahun	734,90	12	Berembang	0,43

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti 2022

Kawasan peruntukan perikanan tangkap direncanakan meliputi Kecamatan Rangsang, Kecamatan Merbau, dan Kecamatan Pulau Merbau. Zona penangkapan ikan diarahkan diperairan Selat Malaka. Jenis ikan yang mendominasi diperairan Selat Malaka adalah kakap, kurau dan udang.

Nelayan tempatan umumnya melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan kapal motor yang dilengkapi jaring ikan dengan kapasitas yangrelatif terbatas. Kawasan perikanan budidaya yang direncanakan terdiri atas peruntukan

kawasan budidaya air tawar, perikanan budidaya laut dan kawasan pengelolaan ikan. Kawasan peruntukan perikanan budidaya air tawar berada di Kecamatan Tebing Tinggi Barat. Kawasan peruntukan perikanan budidaya pesisir dan laut direncanakan meliputi, Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Rangsang Barat, dan Kecamatan Rangsang.

Zona budidaya perikanan direncanakan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Rangsang Barat, Rangsang, Tebing Tinggi dan Merbau dengan pola budidaya keramba jaring apung dan tambak. Budidaya perikanan diwilayah daratan dialokasikan pada kawasan tasik/danau dan disekitar kawasan permukiman di usulkan di Kecamatan Tebing Tinggi Barat, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Merbau. Jenis ikan yang potensial, adalah patin, nila, lele dan udang. Untuk meningkatkan hasil perikanan diperlukan pengelolaan, untuk itu diusulkan pada Kecamatan Merbau, Kecamatan Rangsang, dan Kecamatan Rangsang Barat.

Tabel 1.9 Produksi Penangkapan Ikan Perairan Umum Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2022(Kg)

Kecamatan Subdistrict	Ikan Fish	Udang Shrimp	Kerang Clam	Rucah Trash
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Tebing Tinggi Barat	32 072	4 500	-	-
Tebing Tinggi	54 125	28 700	-	80 700
Tebing Tinggi Timur	15 700	6 200	-	-
Rangsang	257 174	97 250	4 000	450 000
Rangsang Pesisir	540 260	195 625	20 000	870 000
Rangsang Barat	275 400	85 400	38 000	650 700
Merbau	187 625	90 200	-	375 000
Pulau Merbau	295 140	82 500	8 500	480 000
Tasik Putri Puyu	425 250	115 600	-	895 125
Kepulauan Meranti	2 082 746	705 975	70 500	3 801 525

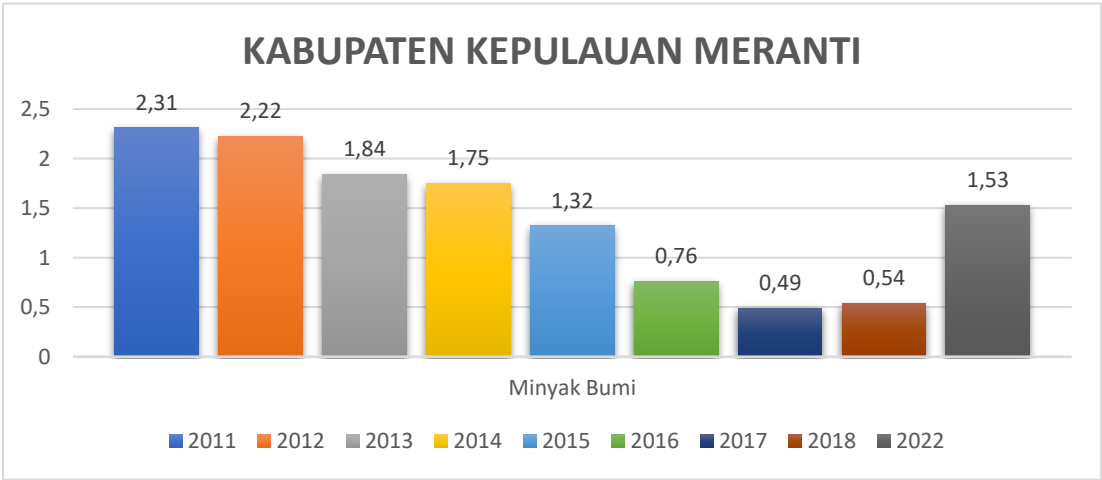
Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti 2022

Berdasarkan Dinas Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti Pada tahun 2022 total produksi penangkapan ikan di perairan umum Kepulauan Meranti sebesar 2.082,746 ton.

1.3.7.5. Potensi Pertambangan dan Penggalian

Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki potensi tambang minyak dan gas. Potensi tambang minyak dan gas Meranti ini tidak hanya tersebar di daratan, tapi juga berada dikawasan lepas pantai. Berdasarkan data peta sebaran tambang migas Dinas Pertambangan dan Energi Propinsi Riau, potensi tambang migas Meranti menyebar dibeberapa titik. Diantaranya di Pulau Padang, laut Lalang (berbatasan dengan Siak), pulau Rangsang, Pulau Tebing Tebing Tinggi dan Pulau Topang. Potensi migas Meranti ini belum semuanya tergarap, dan menjadi bahan cadangan tambang migas masa depanMeranti yang akan menjadi sektor andalan PAD.

Produksi Minyak Bumi di Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang signifikan setelah selama tahun 2011 hingga 2017 terus menurun. Produksi pada tahun 2022 meningkat signifikan menjadi 1,53 juta barrel atau 183,51% dibandingkan dengan tahun 2018 adalah sebesar 0,54 juta barrel.



Sumber : Kementerian ESDM, 2022

Grafik 1.7. Produksi Minyak Bumi Kabupaten Kepulauan Meranti (Juta Barel)

Kedepan, dengan beroperasinya kedua perusahaan penambang bijih timah ini, diperhitungkan produksi tambang bijih timah Meranti seiring dengan upaya eksplorasi dan eksploitasi potensi tambang bijih timas oleh kedua perusahaan terkait.

1.3.8. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti dihitung dalam dua bentuk yaitu penghitungan atas dasar harga berlaku (ADHB) dan penghitungan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). Produk Domestik Regional Bruto ADHB masih dipengaruhi oleh faktor kenaikan hargadan inflasi, sedangkan ADHK memperlihatkan perkembangan PDRB tanpa dipengaruhi perkembangan harga yang biasanya cenderung naik dari tahun ke tahun.

Produk Domestik Regional Bruto merupakan dasar pengukuran atas nilai tambah yang timbul akibat adanya berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu wilayah. Data PDRB menggambarkan kemampuan KabupatenKepulauan Meranti dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki menjadi suatu proses produksi. Oleh karena itu besaran PDRB yang dihasilkan oleh Kabupaten Kepulauan Meranti sangat tergantung kepada kondisi sumber daya alam dan faktor produksi yang tersedia. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto disajikan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Tabel 1.10 Laju Indeks Implisit Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Kepulauan Meranti Atas Dasar Harga Berlaku 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen), 2019 – 2021

Indikator PDRB menurut Lapangan Usaha, Kepulauan Meranti Tahun 2023		
Lapangan Usaha	Distribusi Atas Dasar Harga Berlaku (%)	Laju Pertumbuhan YoY (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	38,45	2,98
Industri Pengolahan	23,72	2,89
Pertambangan dan Penggalian	17,74	7,89
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,10	8,49
Konstruksi	5,86	17,57
Transportasi dan Pergudangan	1,60	6,65
Lainnya	3,53	-
Total	100	4,81

Sumber : Badan Pusat Statistiuk Tahun 2024

Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku dari tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Meranti. Dalam periode tersebut tahun 2022 - 2023 Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan pertumbuhan ekonomi yang cukup besar dengan kenaikan pada tahun 2023 mencapai 4,81%.

1.4. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi di Kabupaten Kepulauan Meranti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mempunyai 24 urusan wajib yang diampu oleh 30 Perangkat Daerah / Unit Kerja dan 8 urusan pilihan yang diampu oleh 6 OPD/Unit Kerja dengan harapan dapat lebih berperan dan lebih mampu dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip dan semangat otonomi daerah yang bertanggung jawab. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti berikut rincian Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti:

- 1. Sekretariat Daerah
Sekretariat Daerah terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Bidang Administrasi Pemerintahan membawahi:

- 1) Bagian Tata pemerintahan
- 2) Bagian Hukum
- 3) Bagian Pengelola Perbatasan
- 4) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa
- c. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Administrasi Pembangunan
 - 3) Bagian Kesejahteraan Rakyat
- d. Asisten Bidang Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Organisasi
 - 2) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 3) Protokol dan Komunikasi Pimpinan
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati.
3. Dinas Daerah

Sebagai unsur pelaksana mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan otonomi daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi terdiri dari:

 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - b. Dinas Kesehatan
 - c. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang
 - d. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 - e. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 - f. Dinas Ketahanan Pangan, dan Pertanian
 - g. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja
 - h. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
 - i. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - j. Dinas Perhubungan
 - k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - l. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 - m. Dinas Perikanan
 - n. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata,
 - o. Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4. Lembaga Teknis Daerah

Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:

- a. Inspektorat
- b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan
- c. Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan, terdiri dari:
 - 1) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
 - 2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
 - 3) Badan Pendapatan Daerah
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 5) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 - 6) UPT. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
 - 7) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
5. Kecamatan

Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:

- a. Kecamatan Tebing Tinggi
- b. Kecamatan Tebing Tinggi Barat
- c. Kecamatan Tebing Tinggi Timur
- d. Kecamatan Rangsang
- e. Kecamatan Rangsang Barat
- f. Kecamatan Rangsang Pesisir
- g. Kecamatan Merbau
- h. Kecamatan Pulau Merbau
- i. Kecamatan Tasik Putri Puyu
6. Kelurahan

Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari:

- a. Kelurahan Selatpanjang Kota
- b. Kelurahan Selatpanjang Barat
- c. Kelurahan Selatpanjang Selatan
- d. Kelurahan Selatpanjang Timur
- e. Kelurahan Teluk Belitung

1.5. Isu Strategis Daerah

Adapun isu-isu strategis Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan dukungan kebijakan untuk mengoptimalkan pemanfaatan posisi strategis wilayah.

2. Peningkatan kualitas manajemen mitigasi bencana terutama rawan bencana kebakaran hutan dan lahan serta abrasi.
3. Peningkatan optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam dengan manajemen terbaik dan terdepan untuk kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin.
4. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia atau penduduk secara menyeluruh untuk optimalisasi pemanfaatan sumberdaya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
5. Percepatan perubahan struktur perekonomian ekonomi yang lebih elastis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas, sehingga mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.
6. Peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan produktivitas lapangan usaha masyarakat terutama sektor yang memicu inflasi dan meningkatnya angka garis kemiskinan.
7. Peningkatan dan percepatan pengentasan kemiskinan dengan perencanaan yang terkoordinasi dan terintegrasi antara stakeholders terkait.
8. Percepatan peningkatan lapangan kerja bagi masyarakat untuk mengurangi angka pengangguran dan peningkatan penduduk sejahtera dari prasejahtera.
9. Peningkatan akses, kualitas dan proses penyelenggaraan secara merata terutama golongan miskin dan anak-anak yatim.
10. Peningkatan cakupan pelayanan yang berkualitas, cepat dan terjangkau baik untuk pencegahan maupun penyembuhan.
11. Peningkatan dan percepatan pelayanan terhadap warga terdampak krisis akibat bencana Covid 19 dan kejadian luar biasa.
12. Peningkatan imunitas masyarakat melalui vaksinasi dan peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat.
13. Peningkatan konektivitas dan kualitas jalan melalui peningkatan kemandapan jalan, dan jembatan dalam kondisi baik dan pengembangan dan jaringan transportasi yang terintegrasi;
14. Peningkatan kapasitas dan kualitas ketersediaan air bersih dan air minum perpipaan melalui pengelolaan ketersediaan kualitas air baku, sarana prasarana dan kapasitas kelembagaan pengelolaan air bersih dan air minum perpipaan;
15. Peningkatan pembangunan, pemenuhan rumah layak huni dan akses sanitasi masyarakat terutama yang berdomisili di daerah kumuh dan miskin;
16. Peningkatan kapasitas dan pemerataan elektrifikasi melalui peningkatan akses dan infrastruktur energi ke seluruh wilayah dan percepatan penyediaan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan untuk mendorong pengembangan IKM.

17. Peningkatan kualitas, akses masyarakat terhadap lapangan kerja dan perlindungan tenaga kerja serta peningkatan partisipasi tenaga perempuan.
18. Peningkatan produksi pangan pokok untuk ketahanan pangan menuju kemandirian pangan;
19. Peningkatan konservasi sumber daya alam dan keanekaragaman hayati dengan pemulihan kritis dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan perairan serta perbaikan kualitas udara, kualitas air, tutupan lahan serta pengurangan gas rumah kaca.
20. Perbaikan manajemen data kependudukan dan pencatan sipil dalam upaya peningkatan kualitas SDM, kemasyarakatan dan pengendalian penduduk.
21. Peningkatan konektivitas antara pulau dalam rangka mempermudah, mempercepat dan mengurangi biaya logistik terhadap pergerakan barang dan jasa.
22. Peningkatan dan pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi dan teknologi informasi.
23. Peningkatan pengembangan industri hilir berbasis sumber daya lokal dengan kemandirian industri melalui peningkatan nilai tambah dan daya saing industri berbasis pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan berskala IKM, koperasi dan UMKM untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat untuk pengurangan jumlah penduduk miskin dan pengangguran.
24. Peningkatan daya tarik investasi yang mendorong peningkatan nilai investasi sehingga mendorong peningkatan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi wilayah.
25. Peningkatan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi objek pemajuan kebudayaan Melayu Kepulauan Meranti; Peningkatan sarana dan prasarana untuk perlindungan objek pemajuan kebudayaan Melayu Kepulauan Meranti; Peningkatan penyebarluasan, pengkajian, dan pengayaan keberagaman objek pemajuan kebudayaan Melayu Kepulauan Meranti; Peningkatan internalisasi nilai budaya Melayu, inovasi, komunikasi/kolaborasi; Peningkatan pembinaan terhadap SDM dan penggiat kebudayaan Melayu Kepulauan Meranti; Peningkatan pembinaan lembaga kebudayaan (LAMR), Dewan Kesenian Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan.
26. Peningkatan produktifitas sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan dan perikanan sehingga dapat mendorong kemajuan sektor industri dan perdagangan.
27. Peningkatan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pariwisata dengan peningkatan akses dan pemenuhan sarana dan prasarana destinasi pariwisata dan peningkatan kapasitas pengelola pariwisata.
28. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel serta pengelolaan keuangan daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam

rangka mendorong percepatan proses pelayanan dalam rangka mendorong peningkatan kemandirian keuangan daerah.

1.6. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti selama tahun 2022. Capaian kinerja 2021 tersebut diperoleh dari perbandingan atas hasil capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan setiap tahun terhadap rencana kinerja 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini menguraikan keberhasilan, hambatan, dan permasalahan sehingga memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja dimasa datang.

Berdasarkan pola pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, adalah sebagai berikut :

BAB. I – PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, gambaran umum Kabupaten Kepulauan Meranti, maksud dan tujuan penyusunan LKj IP, struktur organisasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sistematika penyajian LKj IP.

BAB. II – RENCANA STRATEGIS

Menjelaskan muatan RPJMD untuk periode Tahun 2021 – 2026, visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis, program prioritas pembangunan daerah dan indikator target sasaran prioritas pembangunan Tahun 2022.

BAB III – AKUNTABILITAS KINERJA

Menjelaskan kerangka pengukuran dan evaluasi kinerja, pengukuran capaian hasil kinerja pemerintah tahun 2022, evaluasi dan analisis capaian kinerja Kabupaten Kepulauan Meranti, serta penjabaran akuntabilitas keuangan.

BAB IV – PENUTUP

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya-upaya penyelesaiannya dan langkah serta solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Pemerintah Daerah

2.1.1 Visi Dan Misi

Rencana strategis disusun dengan maksud sebagai alat pengukur pencapaian kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 digunakan untuk memudahkan pemahaman dan penilaian kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun atau jangka menengah. Sebagai dokumen perencanaan, RPJMD Kabupaten Kepulauan disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJP Nasional maupun RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Riau.

Sebagai penerjemahan kebijakan politik Kepala Daerah, maka dokumen RPJMD berguna juga sebagai pijakan bagi perencanaan strategis bagi Perangkat Daerah. Di dalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 dijabarkan pernyataan visi dan misi Kepala Daerah. Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang akan diwujudkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan kondisi saat ini dan isu- isu strategis pada lima tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi masyarakat yang telah dilakukan, maka visi dan misi Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2021-2026 adalah:

1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah, dalam hal ini adalah periode RPJMD Tahun 2021-2026. Visi juga harus menjawab permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan isu-isu strategis, maka visi pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah :

“Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, dan Bermartabat di Provinsi Riau Indonesia”

Adapun penjabaran visi tersebut sebagai berikut:

a. Meranti Maju (Tinggal di Kota Nyaman di Desa Serasa di Kota)

Konsep maju merupakan konsep yang bersepadan dengan konsep modern yaitu suatu tatanan dan standarisasi kehidupan yang baik dan layak dalam berbagai aspek baik ekonomi, sosial, budaya, pemerataan pembangunan dan perkembangan

teknologi. Meranti merupakan salah satu bagian dari Provinsi Riau (provinsi kaya) saat ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan kemajuan daerahnya hal ini dibuktikan dengan isolasi diberbagai wilayah pulau maupun desa oleh akses penghubung (jalan dan jembatan) yang tidak ada dan jelek, perekonomian yang sulit, pembangunan yang tidak merata, tingkat kemiskinan tertinggi, akses pelayanan yang lamban dan tidak layak, tingkat kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan dan peningkatan sumber daya manusia yang rendah dan masih banyak lagi jika dipaparkan keterbelakangannya.

Meranti akan maju, jika interaksi sosial dan ekonomi dengan luar terbuka. Salah satu strateginya yaitu membuka akses dan konektivitas antara desa, kecamatan, pulau, serta kabupaten lain melalui pembangunan infrastruktur utama yaitu jalan dan jembatan sehingga mampu menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat seperti menjual berbagai komoditas usahanya ke pasar. Ketika pendapatan dapat ditingkatkan, maka taraf kehidupan akan membaik dari aspek pendidikan, kesehatan maupun aspek sosial lainnya. Kemajuan itu akan diikuti oleh kemajuan di aspek pembangunan lainnya, seperti penerangan, telekomunikasi (internet), layanan yang prima dan lain sebagainya. Kemajuan yang dicapai tersebut tidak lagi hanya dirasakan oleh masyarakat di kota saja akan tetapi sampai ke desa sehingga dapat menghindari terjadinya disharmonisasi dan kesenjangan sosial dalam masyarakat dan hal ini lah yang menjadikan konsep maju yang sangat penting.

b. Meranti Cerdas (Cerdas Warganya Maju Daerahnya)

Konsep Meranti cerdas adalah pembangunan Meranti yang seutuhnya pada pembangunan sumber daya manusia dengan mengintegrasikan pembangunan di berbagai bidang secara efektif dan efisien sebagai upaya perbaikan kualitas kehidupan ke arah yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan.

c. Meranti Bermartabat (Cerdas dan Berahlak Mulia Warganya Terbilang dan Gemilang Daerahnya)

Meranti bermartabat ketika Meranti tidak lagi terisolir wilayahnya, tinggi tingkat penganggurannya, sempitnya lapangan kerja, tingginya tingkat kemiskinan, rendah kualitas dan daya saing sumber daya manusianya. Dengan pembangunan Meranti maju dan cerdas maka akan melahirkan masyarakat Meranti yang bermartabat yaitu Meranti yang cerdas, terbilang dan gemilang yang diperhitungkan dalam kemajuannya.

2. Misi

Rumusan misi merupakan gambaran upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi tersebut disusun untuk memberikan kerangka bagi

perumusan tujuan dan sasaran RPJMD. Misi RPJMD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur

Pemerataan pembangunan infrastruktur adalah suatu kondisi penyediaan infrastruktur yang merata terutama infrastruktur dasar seperti tersambungya jalan antar desa ke kecamatan dan jalan kecamatan ke jalan kabupaten, tersedianya sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, tersedianya air bersih bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

2. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman dan Bertakwa yang Memiliki Daya Saing

Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia adalah suatu upaya untuk meningkatkan manusia yang memiliki kemampuan daya saing serta memiliki keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Daya saing sendiri merupakan kemampuan untuk menumbuh-kembangkan kemampuan masyarakat yang direfleksikan pada adanya upaya yang kuat untuk tumbuh dan berkembang sehingga mampu meningkatkan daya beli.

3. Meningkatkan Mutu dan Kualitas Kesehatan Masyarakat

Meningkatkan mutu dan kualitas kesehatan masyarakat adalah suatu upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan melengkapi sarana dan prasarana kesehatan di tiap kecamatan serta menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi Rumah Sakit Rujukan dengan meningkatkan tipe RSUD menjadi tipe B.

4. Menciptakan Produktivitas Ekonomi Masyarakat

Menciptakan produktifitas ekonomi masyarakat adalah suatu upaya menciptakan iklim usaha kreatif, inovatif dan produktif, menciptakan sistem pertanian yang unggul dan modern, menciptakan swasembada sapi dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan permodalan bagi UMKM, petani, peternak dan nelayan.

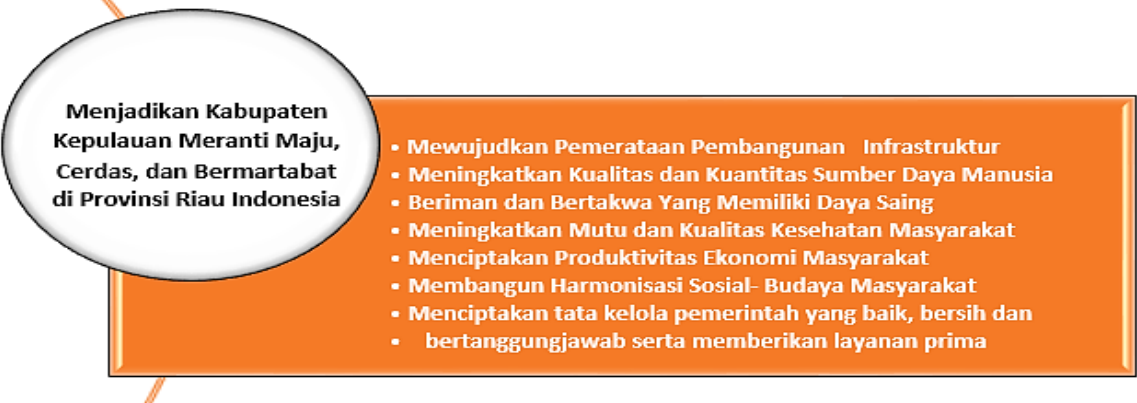
5. Membangun Harmonisasi Sosial-Budaya Masyarakat

Harmonisasi sosial budaya adalah kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan saling bertoleransi dengan tidak adanya konflik antar umat beragama maupun antar suku. Dengan demikian dapat mewujudkan masyarakat yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia serta meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap keanekaragaman suku, adat istiadat dan budaya.

6. Menciptakan Tata Kelola Pemerintah yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab serta Memberikan Layanan Prima

Tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab serta memberikan layanan prima adalah kondisi dimana pemerintah daerah mampu

memberikan pelayanan publik kepada masyarakat yang efektif dan efisien. ~~diantaranya~~ Upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan menciptakan pelayanan “*smart city*” dengan konsep pelayanan 1 hari selesai dilakukan melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam upaya percepatan.

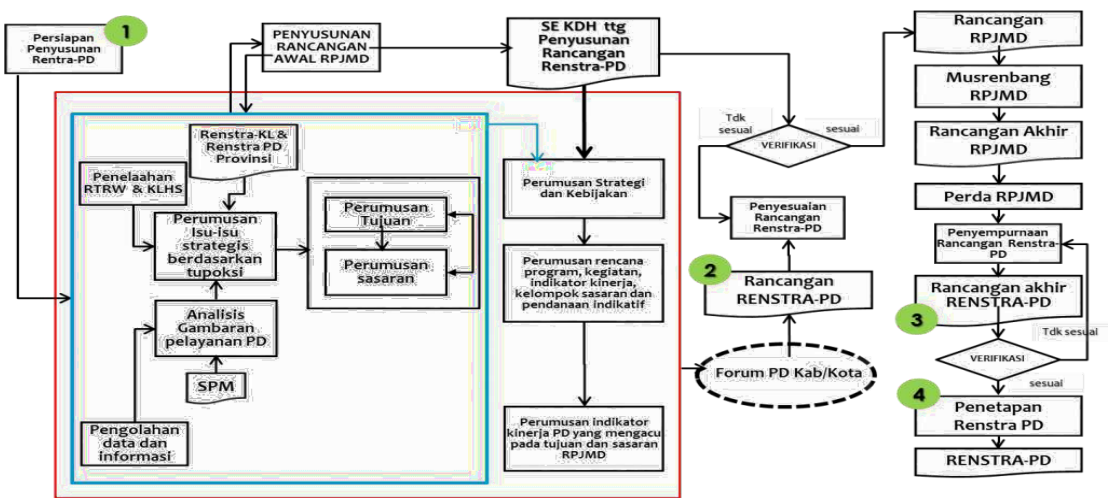


Gambar 2.1. Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 melalui pelaksanaan misi yang telah ditetapkan tersebut di atas, maka perlu dirumuskanlah tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD yang hendak dicapai. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program di Perangkat Daerah. Dilihat dari definisi tujuan dan sasaran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa sasaran merupakan indikator pencapaian tujuan, selanjutnya untuk mencapai indikator sasaran dirumuskan program dan kegiatan.

Rumusan tujuan dan sasaran dari visi dan misi kepala daerah terpilih selanjutnya menjadi landasan perumusan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Hubungan tersebut dapat digambarkan dalam bagan alir sebagai berikut :



Gambar 2.2. Bagan Alur Keterkaitan RPJMD dan Renstra PD

2.2. Strategi Pembangunan Daerah

Visi, misi serta tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya, merupakan dasar perumusan prioritas pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh kepala daerah selama 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu diperlukan strategi dan arah kebijakan pembangunan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2021-2026.

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah merupakan rumusan perencanaan komprehensif mengenai metode atau pendekatan Pemerintah Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran RPJMD yang efektif dan efisien. Melalui pendekatan yang komprehensif tersebut, strategi juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Untuk itu, strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*) untuk mencapai tujuan dan sasaran secara efisien dan efektif. Sementara arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Adapun pilihan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Meranti disajikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Satuan	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5	6	7
Visi : Menjadikan Kabupaten Kepulauan Meranti Maju, Cerdas, Dan Bermartabat Di Provinsi Riau Indonesia						
Misi 1 : Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur						
1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Merata Dan Berkelanjutan	1.1.1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	
						Meningkatkan Kemantapan Dan Ketersambungan Jaringan Jalan Dan Jembatan Antar Wilayah Dalam Kabupaten
						Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Menuju Pusat-Pusat Ekonomi Dan Pelayanan Dasar
						Membangun Dan Memelihara Infrastruktur Pengendali Banjir
						Membangun Dan Mengembangkan Sistem Jaringan Irigasi Dan Jaringan Pengairan Lainnya
						Membangun Dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum
						Membangun Dan Mengembangkan Sistem Pengelolaan Persampahan
						Membangun Sarana Dan Prasarana Air Limbah Yang Layak
						Membangun Dan Mengembangkan Sistem Drainase
						Meningkatkan Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
		1.1.2	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	Peningkatan Cakupan Dan Kualitas Pelayanan Infrastruktur Perumahan Dan Kawasan Permukiman
						Menyediakan dan merehabilitasi rumah korban bencana serta merelokasi rumah bagi masyarakat yang terkena program Pemerintah
						Melakukan penataan pembangunan dan pengembangan perumahan serta kepemilikan bangunan gedung
					Index	Melakukan penataan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta kawasan permukiman kumuh
						Menyelenggarakan PSU perumahan
						Membangun Dan Menyediakan Infrastruktur, Sarana Dan Prasarana Pelabuhan

		1.2.1	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Kualitas Air	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi merusak kualitas air
				Indeks Kualitas Udara	Indeks	Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Kualitas Udara	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi merusak kualitas udara
				Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Peningkatan Pengendalian Dan Penanggulangan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Kualitas Lahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi merusak kualitas lahan
							Meningkatkan manajemen, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
Misi 2-3 : Meningkatkan Dan Pemerataan Kualitas Dan Kuantitas Sumber Daya Manusia Beriman Dan Bertakwa Yang Memiliki Daya Saing, Serta Meningkatkan Mutu Dan Layanan Kesehatan Masyarakat							
1	Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas			Indeks Pembangunan Manusia	Indeks		
		1.1.1	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Index	Peningkatan Aksesibilitas Dan Pelayanan Pendidikan	Menyediakan fasilitas dan bantuan pendidikan
						Peningkatan Dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Layanan Pendidikan
							Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan secara merata
							Mengembangkan kurikulum berbasis karakter dan muatan lokal
		1.1.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	Peningkatan Aksesibilitas Dan Mutu Layanan Kesehatan	Menyediakan fasilitas Kesehatan secara merata
							Meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan secara merata
							Meningkatkan mutu layanan kesehatan
							Menyediakan fasilitas jaminan kesehatan
							Menedukasi dan memberdayakan masyarakat
2	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengamalkan Agama			Rata-Rata Capaian Angka Melek Kitab Suci Dan Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%		
		2.1.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	Peningkatan Pembinaan Masyarakat Dalam Pendidikan Dan Pemahaman Kitab Suci	Meningkatkan Pembinaan Dan Bantuan Pendidikan Dan Pemahaman Kitab Suci
		2.1.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	Peningkatan Pembinaan Dan Pemanfaatan Rumah Ibadah	Meningkatkan Pembinaan, Pengelolaan Dan Pemanfaatan Rumah Ibadah Secara Optimal
Misi 4 : Menciptakan Produktivitas Perekonomian Masyarakat							
1	Meningkatkan Pemerataan Ekonomi			Laju Pertumbuhan Ekonomi	%		
		1.1.1	Meningkatnya Pdrb Sektor Unggulan	Pertumbuhan Pdrb Sektor Unggulan	%	Peningkatan Dan Pengembangan Kapasitas Produksi Pengelolaan Hulu- Hilir Pdrb Sektor Unggulan	Meningkatkan keahlian dan kemampuan produksi pelaku usaha sektor unggulan
							Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil sektor unggulan

							Melakukan penguatan kelembagaan dan pengelolaan serta pemasaran hasil sektor unggulan
		1.1.2	Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	Peningkatan Akses Investasi	Meningkatkan Promosi, Pelayanan Dan Pengendalian Perizinan Serta Informasi Investasi
2	Menurunkan Tingkat Kemiskinan			Angka Kemiskinan	%		
		2.1.1	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Peningkatan Upaya Pembinaan, Pemberdayaan Dan Pendayagunaan Tenaga Kerja	Meningkatkan kapasitas pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja Meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja dan serapan tenaga kerja
		2.1.2	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	Peningkatan Ketersediaan Lapangan Pekerjaan dan Lapangan Usaha Masyarakat	Meningkatkan Cakupan Lapangan Pekerjaan Dan Lapangan Usaha Masyarakat
		2.1.3	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Ppks Yang Tertangani	%	Meningkatkan Peran Aktif Ppks Melalui Pemberdayaan Dan Pembinaan Kelembagaan Sosial	Peningkatan Peran Aktif Ppks Dengan Fokus Peningkatan Capacity Building
						Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Memberdayakan, Merehabilitasi, Memberikan Perlindungan Dan Jaminan Sosial Kepada Ppks
Misi 5 : Membangun Harmonisasi Sosial Budaya Masyarakat							
1	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Pemajuan Kebudayaan Melayu			Indeks Kerukunan Umat Beragama	Indeks		
		1.1.1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	Peningkatan Pembinaan Toleransi Antar Umat Beragama	Meningkatkan Edukasi Dan Persuasi Untuk Pencegahan Konflik Antar Agama Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan elemen masyarakat dalam menciptakan toleransi antar umat beragama
				Indeks Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Indeks		
		1.2.1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	Pencegahan Dan Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Melakukan Identifikasi Potensi Serta Meningkatkan Koordinasi Dan Kerjasama Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum Meningkatkan Upaya Mitigasi Potensi Dan Menyiapkan Sistem Penanggulangan Bencana Dan Kebakaran
				Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu	%		
		1.3.1	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	Peningkatan Pengelolaan Dan Pengembangan Pemajuan Kebudayaan Melayu	Meningkatkan Revitalisasi Pengelolaan Dan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu
Misi 6 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik, Bersih Dan Bertanggungjawab Serta Memberikan Layanan Prima							
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks		
		1.1.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Nilai Akip	Nilai	Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintahan Daerah	Meningkatkan Kualitas, Efektifitas Dan Efisiensi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip)

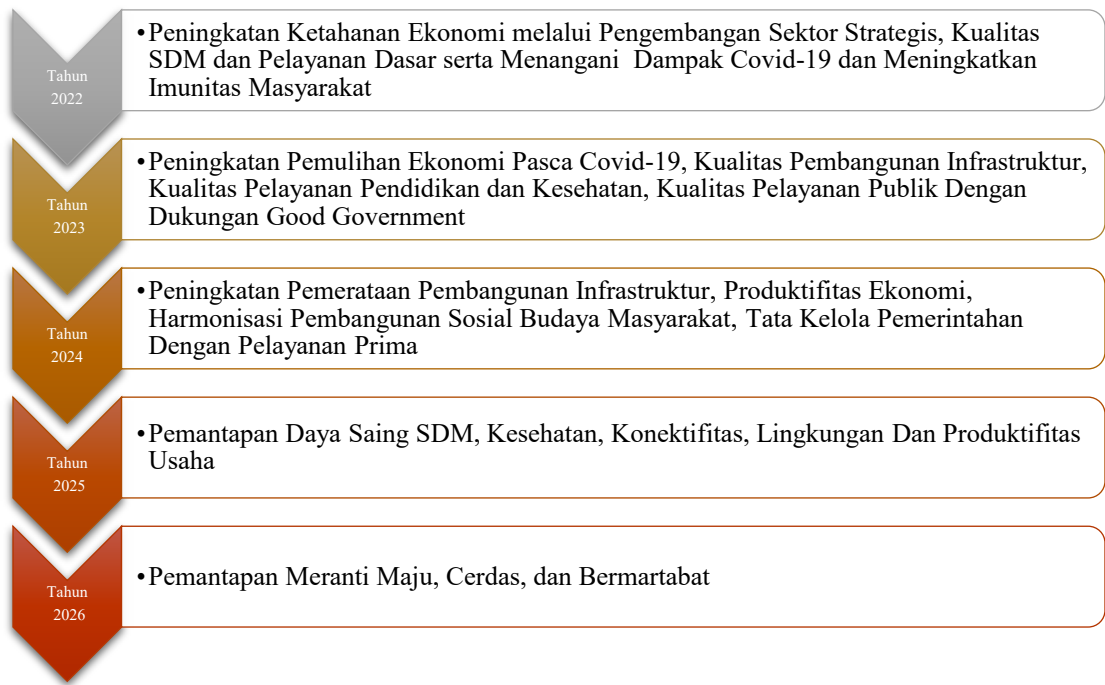
				Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	Peningkatan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah	Meningkatkan Transparansi, Keselarasan, Kesesuaian Pengalokasian Dan Penyerapan Anggaran Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah
				Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	Peningkatan Efektifitas Penyelenggaraan Spip	Optimalisasi Penerapan Sistem Pengawasan Dan Pengendalian Internal Perangkat Daerah
		1.1.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Meningkatkan Cakupan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
				Indeks Pelayanan Publik	Indeks	Pemenuhan Standar Pelayanan Publik	Meningkatkan Sarana, Mutu, Kemudahan Dan Kepastian Pelayanan Publik



2.3. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang sebelumnya telah dirumuskan agar lebih terarah dan sistematis dalam mencapai tujuan dan sasaran dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode pembangunan atau selama periode RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2026.

Arah kebijakan memberikan pedoman arah tema pembangunan dan prioritas tahunan apa yang harus dikerjakan. Dengan arah kebijakan dari strategi dapat diterangkan secara logis kapan suatu strategi tersebut dijalankan mendahului atau menjadi prasyarat bagi strategi lainnya. Strategi dirumuskan secara spesifik terhadap waktu. Pada tiap tahunnya diberikan penekanan terhadap prioritas tertentu sesuai dengan pemetaan strategi yang telah dirumuskan. Arah kebijakan akan mengarah pada pilihan-pilihan strategi agar selaras dengan arahan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Urutan tema pembangunan berdasarkan strategi dari tahun ke tahun selama lima tahun yang dipandu dan dijelaskan dengan arah kebijakan, selengkapnya disajikan pada Gambar 2.3.



Gambar 2.3. Tema / Fokus Pembangunan Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2026

Tabel 2.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2022-2026

No	Arah Kebijakan				
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
1.	Menguatkan ketahanan ekonomi	Memulihkan perekonomian masyarakat pasca Covid-19	Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur	Meningkatkan daya saing sumberdaya manusia	Meningkatkan keimanan dan ketaqwaan sumber daya manusia

2.	Mengembangkan sektor strategis.	Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur	Meningkatkan produktifitas ekonomi masyarakat	Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat	Memantapkan kesejahteraan masyarakat
3.	Meningkatkan kualitas SDM	Meningkatkan kualitas fasilitas dan bantuan pendidikan	Meningkatkan harmonisasi sosial dan budaya masyarakat	Meningkatkan konektifitas antar daerah	Memantapkan kualitas infrastruktur
4.	Meningkatkan pelayanan dasar.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Meningkatkan tata kelola pemerintahan	Meningkatkan integrasi pembangunan dengan lingkungan	Meningkatkan UMKM yang kreatif, inovatif, unggul dan modern
5.	Menangani dampak Covid-19 dan meningkatkan imunitas masyarakat	Meningkatkan kualitas sistem pemerintahan berbasis elektronik	Meningkatkan pelayanan publik yang prima	Meningkatkan produktifitas iklim usaha	Memantapkan sistem pemerintahan inovatif dan unggul

2.4. Indikator Kerja Utama dan Target Tahun 2023

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan. Penetapan indikator kinerja daerah selanjutnya disajikan dalam Tabel 2.3 sebagai berikut:

Tabel 2.3. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target (2025)
1	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	
2	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	
6	Indeks Pendidikan	Indeks	
7	Indeks Kesehatan	Indeks	
8	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	
9	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	
11	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	
12	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	
13	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	
15	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	
16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	
17	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	
18	Nilai AKIP	Nilai	
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	
20	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	
22	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	

2.5. Penetapan Kinerja Tahun 2025

Dokumen penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kesepakatan/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Perjanjian Kinerja menjabarkan target kinerja yang menunjukkan nilai yang melekat pada setiap indikator kinerja sasaran strategis dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dilakukan mengacu kepada RPJMD Tahun 2021-2026, RKPD Tahun 2025, Indikator Kinerja Utama dan APBD Tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Kabupaten Kepulauan Meranti
Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (2025)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	67,82
2	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	60
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,6
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,8
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,2
4	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Indeks	62,25
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	74,75
6	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	71,00
7	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	76
8	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,2
9	Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	350
10	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	8,27
11	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	87,5
12	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,00
13	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	73,10
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	84,00
15	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	20
16	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Nilai AKIP	Nilai	A
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	82
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,88
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5



2.6. Jumlah Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menetapkan 68 program untuk mendukung pencapaian 16 sasaran strategis dengan memanfaatkan sumber dana yang seluruhnya berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2025. Keseluruhan program pokok tersebut dilaksanakan oleh 36 OPD yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 2.5. Program dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Tahun Anggaran 2025

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program	Anggaran (Rp)
1	2	3	4	5
1	MENINGKATNYA INFRASTRUKTUR DASAR	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	3.615.264.900
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.282.334.866
			Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	260.972.000
			Program Penyelenggaraan Jalan	38.190.372.387
			Program Penataan Bangunan Gedung	14.115.988.405
			Program Kawasan Permukiman	3.366.408.831
			Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.049.013.390
			Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	18.300.568.357
2	MENINGKATNYA AKSESIBILITAS TRANSPORTASI ANTAR PULAU	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	Program Pengelolaan Pelayaran	3.341.103.840
3	MENINGKATNYA KUALITAS LINGKUNGAN AIR, UDARA DAN LAHAN	Indeks Kualitas Air	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.178.810.900
		Indeks Kualitas Udara		
		Indeks Kualitas Lahan	Program Pengelolaan Persampahan	1.178.810.900
4	MENINGKATNYA KUANTITAS SUMBER DAYA MANUSIA YANG BERKUALITAS	Indeks Pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	79.482.997.144
			Program Pembinaan Perpustakaan	2.629.196.560
5	MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks KesehProgram Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatanatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.863.562.033
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.145.402.776
			Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	169.049.000
6	MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMPELAJARI KITAB SUCI	Angka Melek Aksara Kitab Suci	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	20.138.326.169
7	MENINGKATNYA KESADARAN MASYARAKAT UNTUK MEMAKMURKAN RUMAH IBADAH	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan		

8	MENINGKATNYA PDRB SEKTOR UNGGULAN	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	Program Administrasi Pemerintahan Desa	385.742.420
			Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	15.254.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.371.334.000
			Program Pengembangan UMKM	239.890.040
			Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.123.512.000
			Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.790.403.000
			Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.987.550
			Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.000.000
			Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.596.718.832
			Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.233.634.600
			Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	51.365.000
			Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	284.248.450
			Program Perekonomian dan Pembangunan	1.397.793.589
9	MENINGKATNYA NILAI INVESTASI SEKTOR UNGGULAN	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Program Pelayanan Penanaman Modal	566.360.500
10	MENINGKATNYA DAYA KONSUMSI MASYARAKAT	Pengeluaran Per Kapita	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	81.069.000
			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907.200.000
			Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.371.334.000
11	MENINGKATNYA PENANGANAN TERHADAP PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (PPKS)	Persentase PPKS Yang Tertangani	Program Pemberdayaan Sosial	66.218.000
			Program Rehabilitasi Sosial	275.902.000
			Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1.055.900.000
12	MENURUNNYA TINGKAT PENGANGGURAN	Tingkat Pengangguran Terbuka	Program Hubungan Industrial	1.180.374.850
13	MENINGKATNYA TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	75.000.000
14	MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	6.531.577.250
			Program Penanggulangan Bencana	1.369.020.000
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.472.297.560
			Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65.327.750



			Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	519.277.900
15	MENINGKATNYA OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU YANG DIKELOLA DAN DIKEMBANGKAN	Persentase Objek Pemajuankebudayaan Melayu Riau Yang Dikeloladan Dikembangkan	Program Pengembangan Kebudayaan	790.000.000
			Program Pengembangan Kesenian Tradisional	168.000.000
			Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	232.487.719
16	MENINGKATNYA KUALITAS MANAJEMEN PEMERINTAHAN	Nilai AKIP	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.160.000
			Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.263.470.400
			Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.455.916.000
			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	643.741.039.942
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.054.577.584
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.274.337.990
			Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	934.268.040
17	MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.758.722.235
		Indeks Pelayanan Publik	Program Pendaftaran Penduduk	347.932.926
			Program Pencatatan Sipil	110.933.100
			Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.557.950
			Program Pelayanan Penanaman Modal	101.933.100
			Program Kepegawaian Daerah	1.909.851.100
			Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.070.709.000
			Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000
Total				945.120.077.469

Tabel 2.6. Indikator Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target (2025)
1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	67,82
2	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	60
3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,6
		Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,8
		Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,2
4	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Indeks	62,25
5	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	74,75
6	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	71,00
7	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	76
8	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,2
9	Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	350

10	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	8,27
11	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	87,5
12	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,00
13	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	73,10
14	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	84,00
15	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	20
16	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	Nilai AKIP	Nilai	A
		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	82
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,88
17	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25
		Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5

BAB III
CAPAIAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah atas keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainnya dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025.

Pengukuran capaian kinerja yang dilakukan berdasarkan indikator sasaran atau indikator *outcome* masing-masing sasaran tersebut. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, termuat skala nilai peringkat kinerja pemerintah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode
1	91,00% ≤ 100,00%	Sangat tinggi	
2	76,00% ≤ 90,99%	Tinggi	
3	66,00% ≤ 75,99%	Sedang	
4	51,00% ≤ 65,99%	Rendah	
5	00,00% ≤ 50,99%	Sangat Rendah	

3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Secara umum dari hasil pengukuran indikator kinerja utama diperoleh rata – rata capaian kinerja tahun 2025 sebesar atau %. Rincian capaian sasaran kinerja tahun 2025 tersajikan pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Indikator Sasaran Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	2024				2025					
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Standar Nasional	Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	Target Akhir RPJMD (2026)	Capaian s/d 2024 terhadap 2026
1	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	62,80	79,17	126,87	-	67,82	70,27	104	-	72,81	97
2	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	40,00	30	75	-	60	60	100	-	60	100
3	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,50	50,00	88,5	54,59	56,6	62,83	111	71,78	56,7	110,82
4	Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,60	92,43	102,02	88,67	90,8	74,19	83	86,67	91	81,53
5	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	64,40	72,25	112,19	61,79	65,2	82,39	126,37	61,95	66	124,84
6	Indeks Pendidikan	Indeks	62,00	48	78		62,25	69	110,85	68	62,50	110,40
7	Indeks Kesehatan	Indeks	74,25	71	95,63	92,5	74,75	72,40	96,86	74,47	75,25	96,22
8	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	69,00	81,47	118,08	-	71,00	75,9	101,54	-	73	74,75
9	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	74,00	74,68	100,92	-	76	74,68	98,27	-	78	103,98
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,10	2,98	58,44	4,94	5,2	4,85	98,18	5,11	5,3	91,51
11	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	300,00	156,346	52,12	1.714,2	350	243,921	69,70	1.931.200	400	60,98
12	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	8,15	8.613	105,68	12,34	8,27	13,72	165,90	128	8,93	153,64

13	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	85,00	92	108,24	-	87,5	93,56	106,93	-	90	103,96
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,30	5,437	115,88	4,91	6,00	4,51	133,04	4,74	5,70	126,39
15	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	72,80	79,78	109,59		73,10	87	119,70	-	73,40	119,21
16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	83,00	112	134		84,00	120	142,88	-	85	141,18
17	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	15,00	17,14	114		20	54	270	-	25	216
18	Nilai AKIP	Nilai	BB	B	80	B	A	B	80	A	A	80
19	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	81,00	69,795	86,17	86,319	82	69,80	85,13	-	83	84,14
20	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,86	4,39	113,73	3,85	3,88	4,40	113	3,40	3,90	112,82
21	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,00	3,08	102,67	3,12	3,25	3,08	98,27	3,23	3,5	88
22	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3.00	3.17	105.6	4,20	3,5	3,13	89,43	4,75	3,7	84,60
Total Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025								117,22%				

Bedasarkan tabel 3.3 diatas, capaian kinerja dari 22 indikator kinerja sasaran yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025 menunjukkan capaian sebesar 117,22%.

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Evaluasi dan analisis capaian kinerja merupakan bagian yang menjelaskan capaian kinerja secara umum sebagaimana sudah diuraikan dalam sub bab sebelumnya. Penyajian untuk sub bab ini akan disajikan per sasaran strategis. Secara umum Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaksanakan tugas sebagaimana telah ditetapkan pada tahun anggaran 2025 dengan 17 (tujuh belas) sasaran dan 22 (dua puluh dua) indikator sasaran strategis.

3.2.1 Sasaran Meningkatnya Infrastruktur Dasar



Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pembangunan.

Pemerataan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi penyediaan infrastruktur terutama infrastruktur dasar seperti tersambungya jalan antar desa ke kecamatan dan jalan kecamatan ke jalan kabupaten; tersedianya air bersih dan permukiman yang sehat bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti.

Masih minimnya ketersediaan infrastruktur dan pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Meranti menjadi landasan utama dalam penetapan sasaran ini, sehingga Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup menjadi tolak ukur dalam capaian sasaran tersebut.

3.2.1.1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Untuk mengukur indeks pembangunan infratraktur, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$X = \frac{X1 + X2 + X3}{Y}$$

Keterangan :

X : Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar

X1 : Persentase Kerja Bidang Kebinamargaan

X2 : Persentase Kerja Bidang Sumber Daya Air

X3 : Persentase Kerja Bidang Cipta Karya dan Konstruksi

Y : Jumlah Bidang yang membangun Infrastruktur Dasar

Tabel 3.3. Indeks Pembangunan Infrastruktur

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
1	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	68,72	70,27	104	-	97

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar pada tahun 2025 adalah sebesar 70,27% dengan capaian 104%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan infrastruktur dasar Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut mengalami penurunan sebesar 8,90% dari tahun 2024, dimana pada tahun 2024 capaian nilai adalah 79,17%. Selain itu, capaian ini belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 97% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.



Salah satu Pengerjaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti

Gambar 3.1. Salah satu pengerjaan Jalan di Kabupaten Kepulauan Meranti

3. Faktor Pendukung Keberhasilan

Capaian tersebut didukung dengan beberapa hal antara lain :

- a. Adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kegiatan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menjadi pendukung utama dalam keberhasilan pembangunan Infrastruktur Dasar.
- b. Adanya perubahan arah kebijakan pembangunan dari kepala daerah, salah satunya adalah fokus pada program kegiatan yang berkaitan langsung dengan meningkatnya capaian kinerja Pelayanan Infrastruktur Dasar
- c. Semakin sadarnya masyarakat terhadap ketaatan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang taat terhadap rencana tata ruang, terbukti

dari Pelayanan Advice Planing/Rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan.

- d. Banyaknya laporan dari masyarakat atas sarana dan prasarana yang perlu perbaikan, sehingga membantu monitoring dari Pemerintah Daerah.

Terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam keberhasilan capaian tersebut, antara lain :

- a. Adanya kebijakan Efisiensi Anggaran dari Pemerintah Pusat, yang menyebabkan setiap pekerjaan infrastruktur harus dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan anggaran yang terbatas, sehingga menyebabkan terhambatnya pembangunan infrastruktur yang masif
- b. Adanya kendala ketersediaan material yang cukup dan baik. Material pembangunan umumnya didapatkan dari luar Kabupaten Kepulauan Meranti. Ini menyebabkan membutuhkan waktu dan biaya yang lebih besar.
- c. Kendala mutu disebabkan karena faktor material, Faktor Pengawasan Pengadaan Barang dan Jasa, dan Faktor Konsultan Pengawas pekerjaan tidak cermat dalam melakukan pengawasan pekerjaan fisik atas pemenuhan volume pekerjaan yang ditawarkan oleh penyedia.
- d. Kendala sumber daya manusia pengguna dan penyedia jasa seharusnya menguasai dan mengerti aspek-aspek teknis pelaksanaan, sehingga tidak hanya mengutamakan keuntungan Pribadi (*Profit Oriented*) tetapi juga *social oriented* dan mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang ada, juga harus mempunyai rasa memiliki terhadap hasil kerja yang telah dilaksanakan.

2. Rekomendasi :

- a. mencari terobosan untuk mendapatkan bahan konstruksi yang berkualitas tinggi dan berdaya tahan tinggi dalam penggunaan pembangunan infrastruktur yang selanjutnya dapat di implementasikan oleh penyedia atau pelaksana pekerjaan.
- b. melakukan kerja sama yang baik kepada pihak penyedia jasa yakni berkoordinasi sebelum memulai suatu pekerjaan penyedia harus melakukan perencanaan yang cermat dan matang terhadap pekerjaannya berdasarkan spesifikasi yang sudah disepakati secara bersama
- c. Memperhatikan pemangkasan anggaran dengan memprioritaskan program strategis Kabupaten Kepulauan Meranti, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.
- d. Meningkatkan pelaksanaan riset dan *quantity control* (QC) dengan uji laboratorium yang memadai untuk mendukung penelitian dan mengontrol kualitas pekerjaan dilapangan, serta konsultan pengawas yang tepat untuk



- dapat secara terus-menerus memantau langsung kegiatan dilapangan
- e. Menyusun manajemen risiko pelaksanaan kegiatan dengan rinci serta memperhatikan segala kemungkinan kendala yang akan muncul pada pelaksanaan dan menyusun strategi penanganan masalah
 - f. Menyesuaikan spesifikasi mutu dengan peralatan yang tersedia, sehingga pekerjaan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik
 - g. Meningkatkan keterampilan pekerja dengan mengikuti kegiatan atau diklat, maupun bimbingan dengan tenaga ahli yang berpengalaman

3.2.2. Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau



Aksesibilitas merupakan ukuran kemudahan lokasi untuk dijangkau dari lokasi lainnya melalui sistem transportasi. Ukuran keterjangkauan atau aksesibilitas meliputi kemudahan waktu, biaya, dan usaha dalam melakukan perpindahan antar tempat-tempat atau kawasan.

Ketersediaan aksesibilitas yang memadai adalah sangat penting, karena hal ini dapat merangsang tumbuhnya pasar dan pusat pertumbuhan ekonomi lainnya dalam suatu wilayah. Dengan kemudahan aksesibilitas, interaksi suatu wilayah dengan wilayah lainnya akan semakin mudah. Dengan kemudahan aksesibilitas, produktivitas pertanian juga akan meningkat.

3.2.2.1. Tingkat Konektivitas Antar Pulau

Untuk mengukur konektivitas antar pulau, maka digunakan rumus sebagai berikut :

(Jumlah Dokumen Perencanaan X 60%) +
(Pembangunan Pelabuhan Laut X 40 %)

X 100

100%(Target Dokumen Perencanaan X
60%) + (Target Pembangunan Pelabuhan X 40%)

Tabel 3.4. Tingkat Konektivitas Antar Pulau

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
2	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	60	60	100		100

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tingkat Konektivitas Antar Pulau pada tahun 2025 adalah sebesar 60% dengan capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat konektivitas antar pulau Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun telah tercapai sebesar 100% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :

- a. Kesiapan sarana dan prasarana menjadi faktor penunjang dalam meningkatkan kinerja, yaitu ketersediaan jalan sarana dan prasarana pelabuhan laut dalam kondisi baik.
- b. Koordinasi antar Perangkat Daerah yang cepat tanggap pada setiap permasalahan konektivitas serta penyelesaiannya dengan baik.
- c. Sinergitas antar *stakeholders* dalam menyelesaikan konektivitas antar pulau yang diampu oleh transportasi laut yang menjadi objek vital serta penunjang utama mobilitas masyarakat.

d. Faktor Penghambat Capaian :

- a. Kurangnya sumber daya manusia yang ahli dalam bidang perhubungan sehingga tidak terpenuhi tenaga untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan kegiatan tersebut dengan baik.
- b. Lahan pembangunan pelabuhan masih masuk dalam lahan gambut serta sulitnya pengurusan sertifikat tanah pada lahan gambut karena adanya Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut.
- c. Kebijakan Efisiensi Anggaran serta Tingginya biaya pembangunan infrastur perhubungan di Kabupaten Kepulauan Meranti karena berbagai faktor geografi dan kondisi alam.

1. Rekomendasi :

- a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan pelabuhan laut, sehingga akan menjawab tingkat konektivitas antar pulau
- b. Lebih memperhatikan pembangunan pelabuhan laut, khususnya pada pulau yang masih minim tingkat konektivitasnya, sehingga tingkat konektivitas akan meningkat

3.2.3. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan

Pengendalian lingkungan hidup merupakan urusan wajib yang menjadi



kewenangan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan.

3.2.3.1.Indeks Kualitas Air

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas air dan Pencemaran Air Pasal 55 “Dalam Hal baku mutu air pada sumber air belum atau tidak ditetapkan, berlaku kriteria mutu air untuk Kelas II sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini sebagai baku mutu air”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 9 Ayat 1 bahwa “Penetapan Kelas air pada sumber air yang berada dalam wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota”. Sampai saat ini, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum melakukan penetapan kelas air. Oleh karena itu, dalam menganalisis tercemar atau tidaknya suatu perairan di wilayah ini, maka digunakan baku mutu air untuk kelas sebagai berikut:

Tabel 3.5. Bobot Pencemaran Air

Status	Bobot
Baik (memenuhi baku mutu)	70
Cemar Ringan	50
Cemar sedang	30
Cemar Berat	10

Selanjutnya dalam menghitung IKA, telah ditentukan bobot masing-masing dari status pencemaran diatas. Parameter yang menjadi penilaian dari sampel yang diuji yaitu TSS,BOD, COD, DO, fosfat, *fecal coli*, dan *total coliform*. Adapun lokasi pengambilan sampel sebanyak 10 lokasi yaitu, (1) Sungai Makam Hulu, (2) Sungai Makan Hilir, (3) Sungai Suir Kiri Hulu, (4) Sungai Suir Kiri Hilir, (5) Sungai Sodor Hulu, (6) Sungai Sodor Hilir, (7) Sungai Sekat Hulu, (8) Sungai Sekat Hilir, (9) Sungai Bagan Melibur Hulu, (10) Sungai Bagan Melibur Hilir

Tabel 3.6. Indeks Kualitas Air.

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
3	Indeks Kualitas Air	%	56,6	62,83	111	71,78	110,82



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Kualitas Air pada tahun 2025 adalah sebesar 62,83% dengan capaian 111%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Air Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja tersebut masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 71,78, namun capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun

telah mencapai sebesar 110,82% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Kondisi geografis di Kabupaten Kepulauan Meranti dimana kondisi alam masih banyak yang terjaga, sehingga hal tersebut mendukung terjaganya kualitas air.
 - b. Pada umumnya penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum padat, sehingga aktifitas penduduk yang mempengaruhi kualitas air masih sedikit.
2. Faktor Penghambat Capaian :
 - a. Masih terdapat industri pengolahan sagu di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang baik bahkan sebagian besar tidak memiliki IPAL, sehingga hal tersebut akan menurunkan kualitas air serta membuat air terkontaminasi.
 - b. Pada daerah yang berpenduduk padat, masih terdapat sebagian masyarakat yang suka membuang sampah atau limbah rumah tangga nya langsung ke sungai dan laut, sehingga akan membuat air tercemar dan menurunkan kualitas air.
3. Rekomendasi :
 - a. Perlunya pelatihan dan diklat untuk aparatur pada Bidang Lingkungan Hidup, sehingga akan meningkatkan efektifitas pekerjaan.
 - b. Perlunya dilaksanakan sosialisasi secara berkala kepada Masyarakat mengenai pentingnya menjaga lingkungan serta tidak membuang sampah sembarangan.

3.2.3.2.Indeks Kualitas Udara

Kegiatan pengujian kualitas udara langsung dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Untuk petugas sampel dalam pengukuran kualitas udara ambient juga dilakukan langsung oleh tim pengujian kualitas udara oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perhitungan Indeks Kualitas Udara (IKU) menggunakan dua parameter yaitu NO₂ dan SO₂. Parameter NO₂ mewakili emisi dari kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar bensin, dan SO₂ mewakili emisi dari industri dan kendaraan diesel yang menggunakan bahan bakar solar serta bahan yang mengandung sulfur lainnya.

Metode yang diterapkan dalam pengujian sample ambient ini adalah *passive sampler* di 4 titik lokasi yang mewakili pemukiman, perkantoran, transportasi dan industri sesuai dengan yang dilaksanakan oleh Direktorat Pengendalian Pencemaran Udara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pemantauan kualitas udara dengan metode ini dilakukan dengan 2 tahap yang pada 1 tahapnya sampel dipaparkan selama 14 hari. Periode pemantauan/pengujian, yaitu Semester 1 untuk mewakili musim hujan dan Semester 2 untuk mewakili musim kemarau. Adapun langkah dalam perhitungan IKU sebagai berikut :

- 1. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ dari tiap periode pemantauan untuk masing-masing lokasi (titik) sehingga didapat data rerata untuk area transportasi (A), industri (B), pemukiman/perumahan (C1), dan komersial/ perkantoran/ perdagangan (C2)
- 2. Menghitung rerata parameter NO₂ dan SO₂ yang merupakan perhitungan rerata dari ke empat titik pemantauan.
- 3. Angka rerata NO₂ dan SO₂ provinsi dibandingkan dengan Referensi EU akan didapatkan Index Udara model EU (Ieu) atau indeks antara sebelum dinormalisasikan pada indeks IKLH.
- 4. Indeks Udara model EU dikonversikan menjadi indeks IKLH melalui persamaan sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kualitas Udara} = \text{IKU} = 100 - [50/0.9 \times (\text{Ieu} - 0.1)]$$

Tabel 3.7. Indeks Kualitas Udara

Parameter	Rerata SO2 dan NO2 di Kab (µg/m³)		Baku Mutu Udara Ambien EU (µg/m³)		Indeks	
	2021	2022	2021	2022	2021	2022
NO ₂	6.92	5.46	40	40	0.169	0.14
SO ₂	6.21	6.38	20	20	0.335	0.32
Indeks Udara , Index Annual model EU (Ieu)					0.246	0.23
IKU					91.897	92.90

Penurunan nilai IKU dapat disebabkan karena jumlah kendaraan yang semakin tinggi. Menurunnya nilai IKU menunjukkan tingkat pencemaran udara di Kabupaten Kepulauan Meranti meningkat. Masalah pencemaran di Kabupaten Kepulauan Meranti secara umum dipengaruhi oleh peningkatan jumlah penduduk dan jumlah kendaraan bermotor.

Peningkatan jumlah kendaraan bermotor akan mengakibatkan peningkatan konsumsi BBM. Peningkatan penggunaan bahan bakar ini akan meningkatkan emisi gas polutan udara sehingga akan menurunkan kualitas udara ambien di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor 107 Tahun 1997 tentang Pedoman Teknis Perhitungan dan Pelaporan serta Informasi Indeks Standar Pencemar Udara pasal 8 bahwa penyampaian Indeks Standar Pencemar Udara kepada masyarakat wajib memuat informasi tentang gambar dan rentang indeks pencemaran udara dengan waktu sebagai berikut :

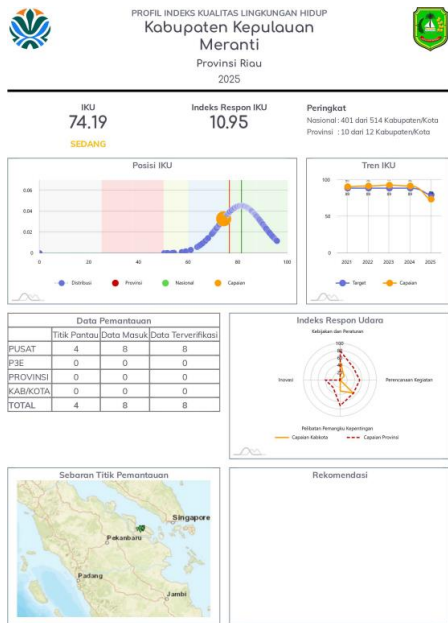
Tabel 3.8. Kategori Indeks Standar Pencemar Udara

No	Kategori	Rentang	Warna
1	Kategori baik	0-50	Hijau
2	Kategori sedang	51-100	Biru
3	Kategori tidak sehat	101-199	Kuning
4	Kategori sangat tidak sehat	200-299	Merah
5	Kategori berbahaya	300-500	Hitam

Tabel 3.9. Indeks Kualitas Udara

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
4	Indeks Kualitas Udara	%	90,8	74,19	83		91





Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Kualitas Udara pada tahun 2025 adalah sebesar 74,19% dengan capaian 83%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Udara di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan nilai indeks kualitas udara (IKU) tahun 2025 menandakan bahwa kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Meranti masuk kedalam kategori sedang.

Realisasi Kinerja tersebut telah berada di atas standar nasional yaitu sebesar 88,67 (tahun 2023) serta capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 81,53% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :

- Jumlah industri maupun kendaraan bermotor di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum terlalu banyak, sehingga pencemaran udara masih minim.
- Kondisi alam yang masih terjaga, dan masih banya terdapat banyak hutan serta pepohonan, sehingga meningkatkan kualitas udara di Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Tingginya curah hujan dan jumlah hari hujan pada tahun 2024 berperan besar terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

2. Faktor Penghambat Capaian :

- Terjadinya kebakaran hutan khususnya pada musim kemarau, sehingga akan menimbulkan polusi udara dan menurunkan kualitas udara.
- Masih terdapat pembukaan lahan dengan cara membakar lahan, sehingga akan menimbulkan asap dalam jumlah banyak sehingga akan menurunkan kualitas udara.

3. Rekomendasi :

- Melakukan sosialisasi serta kontrol kepada masyarakat, agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan yang menyebabkan menurunnya kualitas udara.
- Bekerjasama dengan unit maupun instansi terkait mengenai pencegahan kebakaran lahan dan hutan.

3.2.3.3.Indeks Kualitas Lahan

Untuk mengukur indeks Kualitas Lahan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times 54,3$$

dimana:
IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan
TH = Tutupan Hutan

Tabel 3.10. Indeks Kualitas Lahan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
5	Indeks Kualitas Lahan	%	65,2	82,39	126,37	61,95	124,84



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2025 adalah 82,39 dengan capaian sebesar 126,37%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kualitas Lahan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2025 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja tersebut telah berada di atas standar nasional yaitu sebesar 61,95 serta capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti sebesar 124,84% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti juga tetap melaksanakan kinerja peningkatan kualitas lahan, karena wilayah yang termasuk PIPPIB juga banyak menjaid tempat tinggal warga, bahkan dari puluhan tahun yang lalu.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Kondisi alam yang masih terjaga, dan masih banyak terdapat banyak hutan serta pepohonan, sehingga keadaan lahan masih terjaga dengan baik.

b. Pada umumnya lahan di Kabupaten Kepulauan Meranti dibuka untuk sektor pertanian dan perkebunan, sehingga pemanfaatan lahan tersebut tidak menyebabkan kerusakan lahan.

c. Tingginya curah hujan dan jumlah hari hujan pada tahun 2025 berperan besar terhadap pencegahan kebakaran hutan dan lahan.

2. Faktor Penghambat Capaian :
 - a. Pada umumnya di daerah yang padat penduduk, masyarakat cenderung membuang sampah tidak pada tempat yang disediakan, serta masih membuang sampah sembarangan sehingga menyebabkan pencemaran terhadap lahan.
3. Rekomendasi :
 - a. Perlu penambahan sarana dan prasarana armada persampahan sehingga akan meningkatkan efektifitas dalam pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Perlunya pengadaan prasarana berupa pengadaan incinerator/alat pembakar sampah.

3.2.4. Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

Peran pentingnya sumber daya manusia adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara individu maupun kolektif di dalam organisasi.

Sumber daya manusia yang berkualitas akan berdampak besar pada kemajuan dari Kabupaten Kepulauan Meranti, karena dengan kemajuan sumber daya manusia maka akan banyak hal yang dapat dilakukan oleh masyarakat, yang akan memajukan daerah baik dari segi pendidikan, ekonomi, hingga sosial budaya.

Salah satu peran sumber daya manusia yang berkualitas adalah akan mendorong terciptanya kreatifitas masyarakat dalam menggerakkan ekonomi, dengan memajukan agro industri maupun agribisnis yang berkualitas, sehingga masyarakat akan memiliki daya saing terhadap daerah lainnya yang akan mengangkat derajat hidup masyarakat serta daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2.4.1. Indeks Pendidikan

Indeks Pendidikan merupakan indikator dalam mengukur Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, dimana cara untuk mencari nilai dari indeks pendidikan dalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned}
 I_{HLS} &= \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}} \\
 I_{RLS} &= \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}} \\
 I_{pendidikan} &= \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}
 \end{aligned}$$

Tabel 3.11. Indeks Pendidikan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
6	Indeks Pendidikan	%	62,25	69	110,85	68	110,40

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pendidikan pada tahun 2025 adalah sebesar 69% dengan capaian 110,85%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut telah berada di atas standar nasional yaitu sebesar 68, serta capaiannya juga telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 110,40% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

Capaian tersebut memiliki selisih dengan data yang didapatkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), karena Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki kewenangan untuk urusan pendidikan dasar hingga jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), sehingga batas pengukuran tertinggi adalah peserta didik yang menempuh pendidikan SMP.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Koordinasi yang baik antara Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan pihak sekolah serta masyarakat dalam mendukung keberlangsungan pendidikan terhadap anak sejak dini.

b. Komitmen Bupati Kepulauan Meranti dalam meningkatkan derajat pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan menempatkan peningkatan pendidikan sebagai salah satu program strategis.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Masih kurangnya sarana dan prasarana pada sekolah, sehingga menyebabkan kegiatan belajar mengajar menjadi tidak maksimal.

b. Terhambatnya realisasi anggaran yang disebabkan banyak factor, menyebabkan pelaksanaan dan realisasi dari kinerja menjadi terhambat dan tidak maksimal.

c. Masih kurangnya jumlah tenaga pendidik dan sesuai kualifikasi, khususnya di daerah terluar, terdepan dan tertinggal sehingga pelayanan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti relatif belum merata.

d. Masih terdapat budaya pada sebagian masyarakat khususnya di daerah
-  **Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP)**
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti
- 62

terluar, terdepan dan tertinggal bahwa pendidikan belum begitu dianggap penting, sehingga mereka lebih mengutamakan melakukan kegiatan penghidupan tradisional ketimbang mengedepankan pendidikan kepada anak – anak untuk meninjau masa depan yang lebih baik.

3. Rekomendasi :

- a. Meningkatkan koordinasi dengan kementerian terkait serta pemerintah provinsi, agar Kabupaten Kepulauan Meranti mendapatkan perhatian khusus dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, mengingat Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki keterbatasan anggaran dalam meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.
- b. Menambah jumlah tenaga pendidik di daerah terluar, terdepan dan tertinggal sehingga akan terwujudnya pemerataan pendidikan.
- c. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga pendidikan dan tenaga pendidik.
- d. Mendorong masyarakat untuk menuntaskan program wajib belajar dengan mengikuti pendidikan non formal melalui Paket A, Paket B dan Paket C.
- e. Bekerjasama dengan masyarakat maupun tokoh lainnya dalam melakukan sosialisasi serta mengajak kepada siswa maupun orangtua siswa akan pentingnya pendidikan serta mendorong pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) di desa.
- f. Tetap menjalankan program bantuan pendidikan dan beasiswa untuk mendorong semangat belajar bagi siswa dan/atau mahasiswa.
- g. Mendorong pembangunan jaringan internet sampai ke desa-desa terutama wilayah *blank spot*.
- h. Mendorong pembangunan/revitalisasi perpustakaan daerah maupun kecamatan dan desa.

3.2.5. Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Kesehatan masyarakat memiliki peran penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan dan pembangunan ekonomi. Indeks Pembangunan Manusia meletakkan kesehatan adalah salah satu komponen utama pengukuran selain pendidikan dan pengeluaran. Derajat kesehatan ditentukan oleh 40% faktor lingkungan, 30% faktor perilaku, 20% faktor pelayanan kesehatan, dan 10% faktor genetika.

3.2.5.1.Indeks Kesehatan

Untuk mengukur indeks Kesehatan, maka digunakan rumus adalah sebagai berikut :

$$\text{Indeks Kesehatan} : \frac{\text{AHH} - \text{AHH Minimal}}{\text{AHH Maksimal} - \text{AHH Minimal}}$$

Tabel 3.12. Indeks Kesehatan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
7	Indeks Kesehatan	Indeks	74,75	72,40	96,86	74,47	96,22

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Kesehatan pada tahun 2025 adalah sebesar 72,40 dengan capaian 96,68%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Kesehatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan, namun hasil capaian ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yaotu sebesar 2,40.

Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 74,47 dan belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti, yaitu sebesar 96,22% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat tentang pentingnya keluarga sehat sehingga penyelenggaraan peningkatan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

b. Kesadaran dari masyarakat akan pentingnya hidup sehat serta kemudahan dalam pemberian layanan kesehatan, sehingga menunjang meningkatnya derajat kesehatan.

c. Sosialisasi yang dilakukan secara berkala baik dari Dinas Kesehatan hingga ke petugas Puskesmas kepada masyarakat, meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Forum komunikasi dan dukungan *stakeholder* yang belum maksimal, sehingga efektifitas pelaksanaan kegiatan belum sepenuhnya maksimal.

b. Kondisi geografis, lingkungan, tingkat pendidikan dan keadaan sosial budaya serta ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu hambatan dalam meningkatkan derajat kesehatan, dimana hal ini berperan penting sebagai



- pemahaman dasar atas peningkatan derajat kesehatan.
- c. Kurangnya SDM di Puskesmas menjadi hambatan dalam efektifitas pelayanan kesehatan, sehingga peningkatan derajat kesehatan menjadi terhambat.
3. Rekomendasi :
- a. Meningkatkan pembangunan infrastruktur jalan dan pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke fasilitas kesehatan.
 - b. Meningkatkan perencanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan, khususnya pengawasan terhadap kesehatan masyarakat secara berkala.
 - c. Memaksimalkan komunikasi dan koordinasi dengan *stakeholder*, sehingga kegiatan yang dilaksanakan akan mendapat dukungan oleh *stakeholder* serta meingkatkan efektifitas dan capaian derajat kesehatan.
 - d. Melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada masyarakat, agar masyarakat lebih memahami mengenai pentingnya menjaga kesehatan serta aktif berperan dalam meningkatkan derajat kesehatan, baik diri sendiri maupun keluarga dan lingkungannya.
 - e. Peningkatan SDM di RSUD dan Puskesmas baik secara kuantitas maupun kualitas, sehingga akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi dari pelayanan kesehatan yang diberikan.

3.2.6. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci

Sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi ke-Tuhanan Yang Maha Esa, masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti juga memiliki tingkat keberagaman dalam agama, dan menjunjung tinggi kehidupan beragama yang salah satunya adalah dengan mempelajari kitab suci.

Oleh karena itu, salah satu sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mempelajari kitab suci, sehingga masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti akan memiliki kerohanian serta spiritualitas yang tinggi dalam beragama.

3.2.6.1. Angka Melek aksara Kitab suci

Angka melek aksara kitab suci merupakan tolak ukur dari kesadaran masyarakat dalam mempelajari kitab suci, karena sumber dari setiap agama adalah kitab sucinya. Untuk mengukur Angka Melek Aksara Kitab Suci adalah sebagai berikut :

$\frac{\text{Jumlah Anak Melek Aksara Kitab Suci usia 7-15 Tahun}}{\text{Jumlah Seluruh Anak usia 7-15 Tahun}}$

Tabel 3.13. Angka Melek Aksara Kitab Suci

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
8	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	71	75,9	101,54	-	103,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Angka Melek Aksara Kitab Suci pada tahun 2025 adalah sebesar 75,9% dengan capaian 101,54%. Hal ini menunjukkan bahwa angka melek aksara kitab suci Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mencapai target yang telah ditetapkan. Realisasi Kinerja tersebut telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti pada tahun 2026 sebesar 103,98%.

Menurut indeks KUB, Perolehan angka Melek Aksara Kitab Suci di dapat dari hasil pengukuran jumlah anak melek aksara kitab suci usia 7-15 tahun dibagi jumlah seluruh anak usia 7-15 tahun. Pengukuran tersebut dilakukan di beberapa sampel Sekolah Negeri dan Swasta (SD dan SMP) serta Pesantren di Kabupaten Kepulauan Meranti antara lain :

ANGKA MELEK AKSARA KITAB SUCI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

No.	Nama Sekolah / Madrasah:	Kecamatan:	Desa/Kelurahan:	Jumlah Guru Agama:	Jumlah Seluruh Siswa (Usia 7-15 Tahun):	Jumlah Siswa yang Bisa Membaca Kitab Suci:
1	MTsN 1 Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	14 orang	718	718

2	MI AL-KHAIRIYAH SIDOMULYO	Rangsang Barat	SUNGAICINA	5 ORANG	206	206
3	Mts alhuda	Rangsang Barat	Bokor	5	33	27
4	MIS RAUDHATUL HIDAYAH	Tebing Tinggi Barat	BATANG MALAS	9	20	13
5	MI Raudhatut Thalibin	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	3	33	33
6	MTs Raudhatut Thalibin	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	5 Orang	138	135
7	MIS Al Islam Muhammadiyah Kedaburapat	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	5	43	25
8	Mtss Tarbiyatul Hasanah	Pulau Merbau	Desa padang Kamal	10	60	55
9	MTs Darussalam lalang tanjung	Tebing Tinggi Barat	Tanjung	3 orang	48	45
10	MA. Mu'llimin Selatpanjang	Tebing Tinggi	Selatpanjang Selatan	1	10	10
11	MTsN 2 Kepulauan Meranti	Rangsang Barat	Sungai Cina	8	344	344
12	MA Raudhatul hidayah	Rangsang	Tanjungsamak	3 orang	8	7
13	MTs Raudhatul Mubtadiin	Tebing Tinggi Barat	Kundur	2	85	4
14	MTSS. Raudhatul Hidayah	Rangsang	Tanjungsamak	5 orang	13	11
15	Mts Raudhatul Hidayah	Tebing Tinggi Barat	Batang Malas	3	33	33
16	MTs.S Al-Falah Dedap	Tasik Putri Puyu	Dedap	5	78	70
17	MA Hidayatul Mubtadiin Semukut	Pulau Merbau	Desa Semukut	5	53	53
18	MAN 2 KEPUALAUAN MERANTI	Rangsang Barat	Sungai cina	4	484	484
19	MTs. Nurul Huda	Tebing Tinggi Barat	Gogok Darussalam	3sit	171	171
20	MTsS Darul Ihsan Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	4 orang	70	5



21	MA Raudhatul Mubtadiin	Tebing Tinggi Barat	Kundur.	4 Orang/guru	4	4
22	Mts Al hidayah	Merbau	Lukit	5	28	28
23	MTs Darul Hasanah Lukun	Tebing Tinggi Timur	Desa Lukun	5	55	55
24	Mtss Miftahul mubtadiin	Rangsang	Tanjung Samak	Lima orang	94	85
25	Mtss Darun Naim Pentagun	Rangsang	penyagun	7 orang	74	68
26	MTs Islamiyah	Rangsang Barat	Segomeng	4	104	100
27	MTs. Al - Huda Centai	Pulau Merbau	Centai	4	45	45
28	MTsS Darul ulum tanjung gadai	Tebing Tinggi Timur	Tanjung gadai	3	51	48
29	MI. Tarbiyatul Hasanah	Pulau Merbau	Padang Kamal	4 orang	62	28
30	MTS AL-MUKARROMAH	Merbau	SUNGAI ANAK KAMAL	4	67	67
31	MIS RAUDHATUL MUBTADIIN	Tebing Tinggi Barat	KUNDUR	4	104	80
32	Mts.Darussalam	Rangsang Barat	Anak Setatah	4	43	40
33	MTs Al-Muttahidah Melai	Rangsang Barat	Melai	5	53	53
34	SD NEGERI 11 TENAN	Tebing Tinggi Barat	Tenan	Q	65	50
35	SDN 2 TanjungSamak	Rangsang	TanjungSamak	1	133	100
36	SDN 15 Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang	Rangsang	Sungai gayung kiri	1	187	38
37	Smpn 6 rangsang	Rangsang	Topang	1	63	54
38	SD NEGERI 18 SEMULUT	Tebing Tinggi	BANGLAS BARAT	1 ORANG	72	40
39	SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI	Rangsang	SUNGAI GAYUNG KIRI	1	187	38
40	SMP negeri 1 Rangsang	Rangsang	Tanjungsamak	1	265	263



41	SD Negeri 10 Tanjung Medang	Rangsang	Tanjung Medang	-	60	50
42	SD NEGERI 13 TOPANG	Rangsang	TOPANG	1	78	78
43	SD. NEGERI 13 TELUK KETAPANG	Pulau Merbau	TELUK KETAPANG	1	104	96
44	SDN 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	INSIT	2	142	120
45	SD Negeri 8 Bantar	Rangsang Barat	Bantar	2	126	115
46	SDN 9 Selatpanjang Timur	Tebing Tinggi	Selatpanjang timur	2 org	240	150
47	SD NEGERI 6 SELAT PANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELAT PANJANG SELATAN	2	55	7
48	SDN 15 TANJUNG BUNGA	Pulau Merbau	TANJUNG BUNGA	DUA ORANG	102	70
49	SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Barat	Tebing Tinggi Barat	Tanjung Peranap	1	79	79
50	SD Negeri 8 Selatpanjang selatan	Tebing Tinggi	Selatpanjang selatan	1	73	35
51	SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI	Rangsang	SUNGAI GAYUNG KIRI	1	187	38
52	SDN 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	Desa alai	2 orang	139	139
53	SD NEGERI 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	INSIT	2	139	139
54	SD Negeri 4 Mekar Delima	Tasik Putri Puyu	Mekar Delima	0	23	5
55	SD NEGERI 11 SENDANU DARUL IHSAN	Tebing Tinggi Timur	SENDANU DARUL IHSAN	1	50	40
56	SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	1	115	95
57	SD Negeri 7 Beting	Rangsang Pesisir	Beting	1	157	40
58	SD Negeri 12 Topang	Rangsang	Topang	1	80	70
59	SdN 1 Tanjungsamak	Rangsang	TANJUNGSAMAK	1	178	112
60	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI TIMUR	Tebing Tinggi Timur	LUKUN	1	54	54
61	SD NEGERI 3 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	173	113
62	SD Negeri 1 Tanjungsamak	Rangsang	Tanjungsamak	1 orang	178	112
63	SMPN 4 Rangsang	Rangsang	Tanjung medang	1 orang	25	23
64	SD NEGERI 10 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	2	268	154



65	SDN 15 Sungai Gayung Kiri	Rangsang	Sungai Gayung Kiri	Satu	187	38
66	SDN 13 Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	1	130	65
67	SDN 4 DWITUNGAL	Rangsang	Dwitunggal	1	150	46
68	SMP Negeri 3 Rangsang	Rangsang	Tanjungbakau	1	158	158
69	SDN 2 Mayang Sari	Merbau	Mayang Sari	1	99	50
70	SD NEGERI 6 LUKUN	Tebing Tinggi Timur	Lukun	1 orang	170	144
71	SDN 3 BATANG MALAS	Tebing Tinggi Barat	BATANG MALAS	1	17	17
72	MTsS Al- Hikmah Selatpanjang	Tebing Tinggi	Desa Banglas	5	68	67
73	SD Negeri 7 Mantiasa	Tebing Tinggi Barat	Mantiasa	1	108	108
74	SD Negeri 1 Bantar	Rangsang Barat	Bantar	1	74	74
75	SD NEGERI 17 KUNDUR	Tebing Tinggi Barat	KUNDUR	1	67	63
76	SMP Negeri 3 Tasik Putri Puyu	Tasik Putri Puyu	Mengkopot	1	123	30
77	SMP Negeri 3 Rangsang Barat	Rangsang Barat	Mekarbaru	1	66	20
78	SD Negeri 10 Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Tanjung Kedabu	2	156	156
79	SD Negeri 6 Renak Dungun	Pulau Merbau	Renak Dungun	1	92	70
80	SD negeri 8 Wonosari	Rangsang	Wonosari	1	81	81
81	SD Negeri 22 Alah Air	Tebing Tinggi	Alah Air	2	260	260
82	SD Negeri 17 Penyagun	Rangsang	Penyagun	1	86	76
83	SDN 5 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	Selatpanjang selatan	2	67	30
84	SD NEGERI 11 BOKOR	Rangsang Barat	Bokor	1	123	83
85	SDN 18 telaga baru	Rangsang Barat	Telaga baru	1	101	68
86	SD NEGERI 18 PENYAGUN	Rangsang	Penyagun	1	53	53
87	SDN 15 Tanjung padang	Tasik Putri Puyu	Tanjung padang	1	63	45
88	SD NEGERI 6 TANJUNG KULIM	Merbau	Desa Tanjung Kulim	1	66	66
89	SD Negeri 19 Batang Meranti	Pulau Merbau	Batang Meranti	1	24	19
90	SMP NEGERI 3 RANGSANG PESISIR	Rangsang Pesisir	TANJUNG KEDABU	1	83	83
91	SDN 20 Tebun	Rangsang	Tebun	1	125	125



92	SDS Patria Dharma	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	1	1	1
93	SDN 2 Alai	Tebing Tinggi Barat	Alai	1	137	52
94	SMP negeri 1 Rangsang barat	Rangsang Barat	Lemang	1	196	170
95	SMP IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL	Tebing Tinggi	BANGLAS BARAT	4	223	223
96	SMP NEGERI 4 PULAU MERBAU	Pulau Merbau	BATANG MERANTI	3	52	52
97	SMP NEGERI 5 TASIK PUTRI PUYU	Tasik Putri Puyu	Selat Akar	3 (tiga) orang	109	90
98	SD Negeri 15 Sungai Gayung Kiri	Rangsang	Sungai Gayung Kiri	1	187	38
99	SDN 20 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	105	105
100	SDN 14 Topang	Rangsang	Topang	8	79	9
101	SD NEGERI 4 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELATPANJANG SELATAN	1	107	80
102	SD Negeri 10 MAINI	Tebing Tinggi Barat	MAINI DARUL AMAN	1	110	130
103	SD Negeri 11 Tanjung Medang	Rangsang	Tanjung Medang	0	15	10
104	Sd negeri 2 Tanjung sari	Tebing Tinggi Timur	Tanjungsari	1	109	108
105	SD Negeri 6 Segomeng	Rangsang Barat	Segomeng	1	96	96
106	MTs Al Munawarah	Merbau	Bagan Melibur	5	47	45
107	SDN 15 TANJUNG DARUL TAKZIM	Tebing Tinggi Barat	TANJUNG DARULTAKZIM	1	21	21
108	SD NEGERI 4 TANJUNG GADAI	Tebing Tinggi Timur	TANJUNG GADAI	1	117	30
109	SD NEGERI 12 TANJUNG GADAI	Tebing Tinggi Timur	TANJUNG GADAI	0	113	50
110	SD NEGERI 8 KAYU ARA	Rangsang Pesisir	KAYU ARA	1	108	60
111	SD NEGERI 7 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELATPANJANG SELATAN	2	207	95
112	SD NEGERI 1 SONDE	Rangsang Pesisir	SONDE	1	23	12
113	SD NEGERI 7 SEMUKUT	Pulau Merbau	Semukut	2	82	75
114	SD NEGERI 9 TANJUNGGEMUK	Rangsang	TANJUNGGEMUK	0	94	94
115	SD NEGERI 21 SESAP	Tebing Tinggi	SESAP	NURHAMIDI,S.Pd	97	60



116	SMPN 1 TEBING TINGGI BARAT	Tebing Tinggi Barat	ALAI KOTA	2 ORANG	163	153
117	SDN 3 SIALANG PASUNG	Rangsang Barat	SIALANG PASUNG	1 oramg	133	90
118	SD NEGERI 2 CENTAI	Pulau Merbau	CENTAI	1	120	80
119	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	Tebing Tinggi	KELURAHAN SELATPANJANG BARAT	2 (DUA)	445	389
120	SD NEGERI 16 GEMALASARI	Rangsang	GEMALASARI	-	127	84
121	SDN 1 Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	2	287	150
122	SD NEGERI 15 BANGLAS	Tebing Tinggi	BANGLAS	1	120	67
123	SMP Negeri 4 Tasik Putri Puyu	Tasik Putri Puyu	Putri Puyu	1	104	85
124	SD Negeri 12 Lukit	Merbau	Lukit	1	136	136
125	SD NEGERI 14 TANAH MERAH	Rangsang Pesisir	Tanah Merah	1	98	98
126	SD NEGERI 15 TELUK BELITUNG	Merbau	Teluk Belitung	1	84	80
127	smp muhammadiyah	Tebing Tinggi	selatpanjang timur	1	45	45
128	SD NEGERI 7 TELUK BELITUNG	Merbau	TELUK BELITUNG	1	117	95
129	SDN 10 BINA MAJU	Rangsang Barat	Desa Bina Maju	1	86	78
130	SDN 3 KETAPANG PERMAI	Pulau Merbau	Ketapang permai	1	88	50
131	SD Negeri 9 Kedaburapat	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	1 Orang	154	90
132	SD Negeri 14 Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	1	90	49
133	SD Negeri 2 Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	3	481	211
134	SDN 12BATANG MERANTI	Pulau Merbau	BATANG MERANTI	1 ORANG	83	75
135	SD Negeri 13 Tanah Merah	Rangsang Pesisir	Tanah Merah	1	170	160
136	SMP Negeri 5 Pulau Merbau	Pulau Merbau	Tanjung Bunga	1 orang	61	28
137	SD Negeri 14 Baran Melintang	Pulau Merbau	Baran Melintang	1 orang	60	60
138	SMP Negeri 4 Merbau	Merbau	Sungai Tengah	1	72	62
139	SD NEGERI 11 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	167	120
140	SD NEGERI 19 ALAHAIR TIMUR	Tebing Tinggi	ALAHAIR TIMUR	1	129	128
141	SD Negeri 6 Citra Damai	Rangsang	Citra Damai	1	158	140



142	SD Negeri 4 Bokor	Rangsang Barat	Bokor	1	86	78
143	SD NEGERI 9 MELAI	Rangsang Barat	MELAI	1	109	90
144	SDN 14 ANAK SETATAH	Rangsang Barat	ANAK SETATAH	2	165	155
145	SMPN 3 Merbau	Merbau	Lukit	1	54	45
146	SMP NEGERI 2 RANGSANG BARAT	Rangsang Barat	Bantar	1	118	118
147	SDN 9 Semukut	Pulau Merbau	Semukut	2	121	90
148	SMPN 4	Tebing Tinggi	Banglas barat	2 orang	160	100
149	SD NEGERI 13 LEMANG	Rangsang Barat	LEMANG	1	69	50
150	SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir	Rangsang Pesisir	Sonde	1	29	20
JUMLAH					17150	13017
PERSENTASE (%)					75,9	

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. Kepulauan Meranti, Tahun 2025

Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti pada umumnya memiliki tingkat melek terhadap kitab suci yang baik, dalam artian masyarakat sering membaca serta mempelajari kitab sucinya, sehingga hal ini menunjukkan masyarakat memiliki minat dalam mempelajari kitab suci, serta memiliki spiritualitas yang baik pula.

1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Dilaksanakannya kegiatan keagamaan rutin, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang dilaksanakan oleh pengurus rumah ibadah serta pihak lainnya.
 - b. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki budaya menjunjung tinggi keagamaan serta memiliki jiwa kerohanian yang baik.
 - c. Masih banyak terdapat sekolah keagamaan baik milik Pemerintah maupun swasta yang diminati banyak siswa.
2. Faktor Penghambat Capaian :
 - a. Globalisasi dari segi kebudayaan yang membuat masyarakat terlena dengan kegiatannya sehingga tidak jarang meninggalkan kegiatan keagamaan yang wajib, salah satunya mempelajari kitab suci.
 - b. Di sebagian masyarakat memiliki pemikiran bahwa memfokuskan diri pada intelektualitas di bidang profesi lebih menjamin masa depan ketimbang memfokuskan diri di bidang keagamaan.
3. Rekomendasi :
 - a. Mengadakan kegiatan kerohanian rutin yang berkolaborasi dengan pemuka



- agama dan rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pendidikan keagamaan dan aksara melek kitab suci dapat meningkat.
- b. Meningkatkan pembangunan pusat-pusat pendidikan agama baik formal maupun non formal.
- c. Mendorong pembangunan masyarakat yang bersifat inklusif.
- d. Melakukan reuiu target pada dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra).

3.2.7. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah

Rumah Ibadah adalah tempat suci bagi setiap pemeluk agamanya, sehingga kesadaran masyarakat dalam memakmurkan rumah ibadah sangat penting untuk meningkatkan spiritualitas dalam beragama.

Selain diperuntukkan untuk melaksanakan ibadah, rumah ibadah juga berfungsi sebagai tempat untuk menuntut ilmu agama, dimana karakter dan kerohanian masyarakat akan terbentuk dengan baik jika mereka memakmurkan rumah ibadahnya.

3.2.7.1.Persentase Rumah Ibadah yang Aktif Dimanfaatkan

Persentasi rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan merupakan tolak ukur dari kesadaran masyarakat dalam memakmurkan rumah ibadah. Rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan akan menggambarkan bahwa masyarakat memiliki kesadaran untuk membentuk karakter serta kerohaniannya. Data dari persentase rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan didapatkan dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti

Tabel 3.14. Presentasi Rumah Ibadah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
9	Persentasi rumah Ibadah yang aktif dimanfaatkan	%	76	74,68	98,27	-	95,75

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentasi Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan pada tahun 2025 adalah sebesar 74,68% dengan capaian 98,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentasi rumah Ibadah yang aktif dimanfaatkan Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti pada tahun 2026, namun sudah mencapai sebesar sebesar 106,76%.

REKAPITULASI RUMAH IBADAH
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	MASJID	MUSALA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	KAPEL	PURA	VIHARA	KELENTENG	BALAI BASARAH	JUMLAH TOTAL RUMAH IBADAH
1	TEBING TINGGI	10	41	46	6				34			127
2	TEBING TINGGI BARAT	14	31	44	2				3			80
3	TEBING TINGGI TIMUR	10	27	18	4				0			49
4	RANGSANG	16	43	53	1				4			101
5	RANGSANG BARAT	12	37	44	3				2			86
6	RANGSANG PESISIR	11	28	21	0				1			50
7	MERBAU	13	25	37	3				1			66
8	PULAU MERBAU	11	37	36	2				1			76
9	TASIK PUTRI PUYU	11	42	22	4				3	3		74
JUMLAH		108	311	321	25	0	0	0	49	3	0	709

REKAPITULASI RUMAH IBADAH YANG AKTIF DIMANFAATKAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	MASJID	MUSALA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	KAPEL	PURA	VIHARA	KELENTENG	BALAI BASARAH	JUMLAH TOTAL RUMAH IBADAH
1	TEBING TINGGI	10	34	40	6				34			114
2	TEBING TINGGI BARAT	14	28	35	2				3			68
3	TEBING TINGGI TIMUR	10	15	14	4				0			33
4	RANGSANG	16	38	51	1				4			94
5	RANGSANG BARAT	12	34	31	3				2			70
6	RANGSANG PESISIR	11	27	20	0				1			48
7	MERBAU	13	17	37	3				1			58
8	PULAU MERBAU	11	25	16	2				1			44
9	TASIK PUTRI PUYU	11	29	22	4				3	3		61
JUMLAH		108	247	266	25	0	0	0	49	3	0	590

Sumber : Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA Kab. Kepulauan Meranti, Tahun 2025

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Dilaksanakannya kegiatan keagamaan secara rutin, baik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maupun yang dilaksanakan oleh pengurus rumah ibadah serta pihak lainnya.

b. Masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti masih memiliki budaya menjunjung tinggi nilai keagamaan serta memiliki jiwa kerohanian yang baik.

c. Pengurus rumah ibadah masih aktif dalam mengajak masyarakat untuk memakmurkan rumah ibadah.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Globalisasi dari segi kebudayaan yang membuat masyarakat terlena dengan kegiatannya sehingga tidak jarang meninggalkan kegiatan keagamaan yang wajib, salah satunya adalah memakmurkan rumah ibadah.

- b. Masih terdapat rumah ibadah khususnya di daerah terdepan, terluar dan tertinggal yang memiliki fasilitas yang kurang memadai, sehingga kurang menarik minat masyarakat, khususnya yang masih belum memiliki kerohanian yang tinggi.
3. Rekomendasi :
- a. Mengadakan kegiatan kerohanian rutin yang berkolaborasi dengan pemuka agama dan rumah ibadah di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga pendidikan keagamaan dan aksara melek kitab suci dapat meningkat.
 - b. Meningkatkan pembangunan pusat-pusat pendidikan agama baik formal maupun non formal.
 - c. Mendorong pembangunan masyarakat yang bersifat inklusif.
 - d. Melakukan reviu target pada dokumen perencanaan (RPJMD dan Renstra).

3.2.8. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan



Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku

maupun atas dasar harga konstan. Sektor unggulan adalah sektor yang memiliki keunggulan komperatif dan keunggulan kompetitif dengan produk sektor sejenis dari daerah lain serta memberikan nilai manfaat yang besar. Sektor unggulan juga memberikan nilai tambah dan produksi yang besar, memiliki *multiplier effect* yang besar terhadap perekonomian lain, serta memiliki permintaan yang tinggi baik pasar lokal maupun pasar ekspor

Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat *output* sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.



Gambar 3.2. Sentra Sagu Sungai Tohor

3.2.8.1.Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor unggulan merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.



Gambar 3.3. Sentra Kopi Kedabu Rapat

Untuk mengukur Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Pertumbuhan PDRB}_{\text{Sektor-i}} = \{ \text{PDRB}_{\text{sektor-i}} (t) - \text{PDRB}_{\text{sektor-i}} (t-1) \} / \text{PDRB}_{\text{sektor-i}} (t-1) \} \times 100\%$$

Dimana:

t = tahun pengamatan PDRB Sektor Unggulan Lapangan Usaha-i

t-1 = tahun sebelumnya PDRB Sektor Unggulan berdasarkan Lapangan Usaha-i

Tabel 3.15. Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2024 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
10	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,10	4,85	98,18	5,11	91,51

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan pada tahun 2025 adalah sebesar 4,85% dengan capaian 98,18%. Hal ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah realisasi nasional pada rata-rata pertumbuhan lapangan usaha yang sama, yaitu sebesar 5,11 serta capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti yaitu sebesar sebesar 91,51% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Industri pengolahan produk komoditas unggulan di Kabupaten Kepulauan Meranti berkembang relatif baik walaupun pertumbuhannya tidak signifikan. Diantara produk komoditas unggulan tersebut adalah sagu dan kopi liberika.

b. Mulai tumbuhnya UMKM pada sektor komoditas lokal dan unggulan yang meninjang pertumbuhan PDRB

c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bersama pihak swasta gencar memperkenalkan produk komoditas unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti keluar daerah hingga keluar negeri.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Terbatasnya infrastruktur dasar pada sentra-sentra pengembangan sektor unggulan, seperti jalan, pelabuhan, air bersih, BBM, listrik dan pemasaran.

b. Ada nya potensi degradasi kualitas lingkungan, misalnya menurunnya kualitas perairan.

c. Tingginya biaya produksi pada sektor unggulan karena umumnya sarana prasarana produksi didatangkan dari luar.

d. Terbatasnya kemampuan teknis dan manajerial kelompok pelaku usaha atau koperasi di sektor unggulan yang ada.

e. Terbatasnya lahan pengembangan karena adanya kawasan hutan dan PIPPIB sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, serta keterbatasan kewenangan pada Daerah Irigasi Gambut yang ada di Kabupaten Kepulauan

Meranti.

- f. Rendahnya kualitas produk dan diversifikasi produk untuk meningkatkan nilai tambah karena kurangnya inovasi dan teknologi.
 - g. Relatif tingginya luas lahan Tanaman Tua dan Rusak (TTR), terutama pada komoditas karet dan kopi.
 - h. Sebagian besar dari petani maupun pengusaha produk komoditas unggulan masih belum memiliki modal yang cukup kuat untuk mengolah produk dengan kualitas maupun kemasan yang lebih baik, sehingga kurang menarik minat pasar.
 - i. Kurang dikenalnya produk komoditas unggulan menjadi hambatan untuk memasarkan produk tersebut baik keluar daerah maupun keluar negeri.
 - j. Agribisnis produk komoditas unggulan belum marak diterapkan dan masih mengandalkan cara tradisional, sehingga produksi serta pengolahan produk komoditas unggulan membutuhkan waktu serta biaya yang lebih banyak, sehingga menyebabkan harga akan menjadi lebih tinggi dan kurang bisa bersaing di pasar.
3. Rekomendasi :
- a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama pada kawasan sentra pertanian dan industri pengolahan.
 - b. Mendorong pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup secara maksimal.
 - c. Mendorong pengembangan produk unggulan lokal dan turunannya dengan menggunakan teknologi tepat guna berkearifan lokal, serta mendorong kerjasama dengan lembaga riset dan perguruan tinggi.
 - d. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat terhadap usulan pelepasan sebagian kawasan hutan dan peninjauan kawasan PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - e. Melakukan peremajaan terhadap Tanaman Tua dan Rusak.
 - f. Mengintensifkan pendampingan dan pelatihan teknis kepada kelompok pelaku usaha, koperasi maupun industry rumahan pengolahan terkait peningkatan kemampuan teknis dan manajerial serta membangun kemitraan dengan lembaga keuangan formal.
 - g. Meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam mengembangkan PDRB sektor unggulan, dari sektor hulu hingga ke hilir, sehingga akan terbangun agribisnis yang dapat memajukan PDRB sektor unggulan, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - h. Meningkatkan promosi produk komoditas lokal dengan bekerjasama dengan



pihak swasta, maupun kementerian terkait, sehingga akan meningkatkan permintaan produk komoditas lokal baik di pasar lokal maupun internasional yang akan menyebabkan meningkatnya PDRB sektor unggulan

- i. Bekerjasama dengan pihak swasta maupun kementerian terkait untuk dapat memperbaharui alat dalam pengolahan Produk Komoditas Unggulan, sehingga akan terbangun agribisnis dengan kualitas yang baik serta kuantitas yang tinggi dan tepat waktu, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pasar, dan akan meningkatkan PDRB sektor unggulan.

3.2.9. Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan

Nilai investasi (investment value) adalah nilai dari suatu perusahaan atau saham (business interest) atau kepentingan dalam perusahaan yang bersifat spesifik terhadap seorang investor, didasarkan pada atau terkait dengan persyaratan tertentu dari seorang atau kelompok investor . Faktor yang Mempengaruhi Investasi :

1. Pendapatan per Kapita.
2. Tren
3. Situasi Politik dan Keamanan
4. Situasi Industri dan Ekonomi
5. Kondisi Sarana dan Prasarana yang Tersedia

3.2.9.1. Nilai Investasi Sektor Unggulan



Salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi adalah adanya iklim investasi yang baik yang ditunjang oleh produktivitas yang tinggi. Dengan adanya investasi berarti akan menambah kapasitas input dalam proses produksi hingga pada akhirnya akan menambah *output* dan meningkatkan laju pertumbuhan

ekonomi. Mengingat pentingnya investasi maka setiap pemerintah dituntut untuk memiliki daya saing investasi yang tinggi. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor.

Faktor yang dapat mempengaruhi investasi yang dijadikan bahan pertimbangan investor dalam menanamkan modalnya, antara lain :

1. Faktor Sumber Daya Alam;
2. Faktor Sumber Daya Manusia,
3. Faktor stabilitas politik perekonomian, guna menjamin kepastian dalam berusaha;
4. Faktor kebijakan pemerintah; dan
5. Faktor kemudahan dalam perizinan.

Indikator untuk mengetahui seberapa besar meningkatnya nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti ditandai dengan Nilai Investasi yang terdaftar di Kabupaten Kepulauan Meranti yang diukur dengan :

Realisasi PMDN Sektor Unggulan Tahun evaluasi evaluasi

Tabel 3.16. Nilai Investasi Sektor Unggulan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
11	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rp	350	243,921	69,70	1.931.200	60,98

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Nilai Investasi Sektor Unggulan pada tahun 2024 adalah sebesar 243,921 Milyar Rupiah dengan capaian 69,70%. Hal ini menunjukkan bahwa Nilai Investasi Sektor Unggulan Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah standar nasional yaitu sebesar 1.931,2 triliun rupiah dan capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan capaian sebesar 60,98% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024 Triwulan III			Tahun 2025 Triwulan IV		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Investasi	Rupiah	200M	217,98M	108,99	250M	117,73M	47,09	300M	100,077M	33,36	161M	243.921M	151%
Rata – Rata Capaian Kinerja			200M	217,98M	108,99	250M	117,73M	47,09	300M	100,077M	33,36	-	-	-

Sumber : DPMPTSP Kab. Kepulauan Meranti, Tahun 2025

Gambar 3.4. Daftar Penanaman Modal di Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Adanyan upaya percepatan perbaikan data pelaku usaha yang wajib menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) ke BKPM

sesuai dengan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

- b. Meningkatnya pertumbuhan usaha komoditas dari sektor perkebunan seperti sagu dan kopi liberika;
 - c. Hibrisasi sagu yang diciptakan beberapa produk makanan dari bahan baku sagu;
 - d. Tersedianya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (*One Stop Service*) dan sistem *online* yaitu *Online Single Submission* (OSS);
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Terbatasnya infrastruktur dasar pada sentra-sentra pengembangan sektor unggulan, seperti jalan, pelabuhan, air bersih, BBM, listrik dan pemasaran.
 - b. Terbatasnya lahan pengembangan karena adanya kawasan hutan dan PIPPIB sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, serta keterbatasan kewenangan pada Daerah Irigasi Gambut yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - c. Kondisi geografi Kabupaten Kepulauan Meranti yang membuat investor masih enggan untuk berinvestasi dikarenakan banyak nya biaya yang akan mereka keluarkan untuk menanam modal.
 - d. Terbatasnya SDM, sarana dan prasarana untuk mewujudkan pelayanan yang optimal serta dalam menarik investasi.
3. Rekomendasi :
- a. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dasar terutama pada kawasan sentra pertanian dan industri pengolahan.
 - b. Meningkatkan koordinasi ke Pemerintah Pusat terhadap usulan pelepasan sebagian kawasan hutan dan peninjauan kawasan PIPPIB di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - c. Melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi kinerja dengan jalan memonitor proses pengawasan, pengendalian dan pembinaan penanaman modal yaitu dengan membentuk sebuah tim yang dapat mengawasi izin penanaman modal yang telah diterbitkan serta di dukung dengan aplikasi pengawasan penanaman modal. Pembinaan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan persuasif kepada para pengusaha agar mereka melaporkan laporan per Triwulan perusahaannya ke BKPM.
 - d. Meningkatkan kompetensi SDM aparatur yang sesuai dengan bidang tugasnya baik kualitas dan kuantitas agar profesional, tanggap, cepat, dan bersemangat dengan jalan mengadakan pembekalan dan pelatihan serta magang di instansi

- terkait dengan bidangnya.
- Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait proses perizinan secara online serta melakukan koordinasi dan kerjasama antar instansi pemerintahan untuk meningkatkan proses perizinan yang prima dan terintegrasi.
 - Melakukan promosi daerah melalui event-event promosi agar mendapat investor yang bersedia berinvestasi di Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - Menyusun Peta Potensi Daerah serta membuat buku Peluang Usaha.
 - Meningkatkan promosi daerah terhadap sumber daya alam terutama disektor pertanian/perkebunan, pertambangan timah, perternakan, perikanan dan kelautan.

3.2.10. Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat

Konsumsi masyarakat adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh masyarakat untuk *durable goods*, yaitu *barang- barang* konsumsi yang bersifat tahan lama (mobil, kulkas, televisi, dsb.), serta *nondurable goods*, yaitu barang-barang konsumsi yang bersifat tidak tahan lama (makanan, minuman, dsb.)

Pentingnya daya konsusmsi masyarakat terhadap perekonomian adalah agar bisa mengetahui kondisi perekonomian masyarakat. Pasalnya, daya beli masyarakat akan merepresentasikan perekonomian Kabupaten Kepulauan Meranti secara menyeluruh. Tingkat deflasi ataupun inflasi pun berkaitan erat dengan daya beli.

Apabila konsumsi mengalami peningkatan maka akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya apabila konsumsi mengalami penurunan maka pertumbuhan ekonomi juga akan mengalami penurunan. Di samping itu, peningkatan modal akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi.

3.2.10.1.Pengeluaran Per Kapita

Untuk mengukur tingkat pengeluaran per kapita diperoleh dari data BPS tahun pengamatan, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 3.17.

Tabel 3.17. Pengeluaran Per Kapita

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Standar Nasional	
12	Pengeluaran Per Kapita	Ribu Rupiah	8.270	16.460	199	12.800	184,33

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Pengeluaran Per Kapita pada tahun 2025 adalah sebesar 16.460.000 rupiah per kapita per tahun dengan capaian 199%. Hal ini menunjukkan bahwa Pengeluaran pengeluaran per kapita kabupaten

kepulauan meranti sudah mencapai target yang ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut juga telah berada di atas realisasi nasional yaitu sebesar 12.800.000 rupiah dan capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun telah mencapai sebesar 184.33% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

1. Faktor Pendukung Capaian :

- a. Berkembangnya perekonomian saat ini yang pada umumnya sudah terdigitalisasi, hal ini mempermudah masyarakat untuk melakukan aktivitas jual beli secara *online* melalui *smatrphone*, sehingga akan meningkatkan daya konsumsi masyarakat.
- b. Munculnya UMKM yang mempromosikan produk-produk yang dijual dengan harga terjangkau, sehingga menarik minat masyarakat untuk melakukan jual beli.
- c. Aksesibilitas terhadap komoditas perdagangan yang semakin mudah dan murah, yang didukung dengan banyaknya jasa pengiriman barang dari pusat provinsi dengan harga yang lebih terjangkau, memicu peningkatan perdagangan, sehingga meningkatkan perekonomian.

2. Faktor Penghambat Capaian :

- a. Kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang masih terisolir, sehingga menyebabkan sulitnya barang-barang kebutuhan pokok untuk masuk, hal ini menyebabkan menjadi tingginya harga jual barang yang berimplikasi pada menurunnya daya konsumsi
- b. Sektor perdagangan masih mengalami pertumbuhan yang tidak signifikan, sehingga roda perekonomian kurang berjalan dengan efektif dan perekonomian yang agak lesu, hal ini menyebabkan turunnya daya konsumsi.
- c. Resesi ekonomi yang memicu deflasi yang dialami tidak hanya di Indonesia, namun seluruh dunia menjadi salah satu penyebab terhambatnya perekonomian, yang menyebabkan turunnya pengeluaran perkapita.

3. Rekomendasi :

- a. Mempercepat pembangunan jalan dan pelabuhan untuk meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antar pulau.
- b. Menekan laju inflasi dengan berbagai strategi, misalnya pasar murah, insentif kepada pelaku usaha transportasi, dan kemudahan izin masuk barang ke Kabupaten Kepulauan Meranti.
- c. Mendorong UMKM untuk berkembang dengan lebih baik, seperti memberikan kemudahan berusaha, melakukan suntikan modal UMKM, sehingga barang-barang produk UMKM akan lebih berkembang dan menarik

minat pasar.

- d. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat agar masyarakat diberikan izin untuk perdagangan lintas batas antara Kabupaten Kepulauan Meranti dengan Malaysia.
- e. Melakukan reviu terhadap target indikator kinerja yang sudah/melampaui target bahkan sudah mencapai target akhir periode.

3.2.11. Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga memerlukan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani dan rohani maupun sosial secara memadai dan wajar (Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Kategori PPKS antara lain :

1. Anak Balita Terlantar

Adalah seorang anak berusia 5 (lima) tahun ke bawah yang ditelantarkan orang tuanya dan/atau berada di dalam keluarga tidak mampu oleh orang tua/keluarga yang tidak memberikan pengasuhan, perawatan, pembinaan dan perlindungan bagi anak sehingga hak-hak dasarnya semakin tidak terpenuhi serta anak dieksploitasi untuk tujuan tertentu.

2. Anak Terlantar

Adalah seorang anak beberusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang mengalami perlakuan salah dan ditelantarkan oleh orang tua/keluarga atau anak kehilangan hak asuh dari orang tua/keluarga.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Adalah orang yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, meliputi anak yang disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan anak yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.

4. Anak Jalanan

Adalah anak yang rentan bekerja di jalanan, anak yang bekerja di jalanan, dan/atau anak yang bekerja dan hidup di jalanan yang menghasilkan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari.

5. Anak dengan Kedisabilitas (ADK)

Adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang



mempunyai kelainan fisik atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan bagi dirinya untuk melakukan fungsi-fungsi jasmani, rohani maupun sosialnya secara layak, yang terdiri dari anak dengan disabilitas fisik, anak dengan disabilitas mental dan anak dengan disabilitas fisik dan mental.

6. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan atau Diperlakukan Salah

Adalah anak yang terancam secara fisik dan nonfisik karena tindak kekerasan, diperlakukan salah atau tidak semestinya dalam lingkungan keluarga atau lingkungan sosial terdekatnya, sehingga tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya dengan wajar baik secara jasmani, rohani maupun sosial.

7. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Adalah anak yang berusia 6 (enam) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dalam situasi darurat, dari kelompok minoritas dan terisolasi, dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, diperdagangkan, menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), korban penculikan, penjualan, perdagangan, korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, yang menyandang disabilitas, dan korban perlakuan salah dan penelantaran.

8. Lanjut Usia Telantar

Adalah seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun atau lebih, karena faktor-faktor tertentu tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

9. Penyandang Disabilitas

Adalah mereka yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu lama dimana ketika berhadapan dengan berbagai hambatan hal ini dapat mengalami partisipasi penuh dan efektif mereka dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

10. Tuna Susila

Adalah seseorang yang melakukan hubungan seksual dengan sesama atau lawan jenis secara berulang-ulang dan bergantian diluar perkawinan yang sah dengan tujuan mendapatkan imbalan uang, materi atau jasa.

11. Gelandangan

Adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum.

12. Pengemis

Adalah orang-orang yang mendapat penghasilan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan orang

13. Pemulung

Adalah orang-orang yang melakukan pekerjaan dengan cara memungut dan mengumpulkan barang-barang bekas yang berada di berbagai tempat pemukiman penduduk, pertokoan dan/atau pasarpasar yang bermaksud untuk didaur ulang atau dijual kembali, sehingga memiliki nilai ekonomis.

14. Kelompok Minoritas

Adalah kelompok yang mengalami gangguan keberfungsian sosialnya akibat diskriminasi dan marginalisasi yang diterimanya sehingga karena keterbatasannya menyebabkan dirinya rentan mengalami masalah sosial, seperti gay, waria, dan lesbian.

15. Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan (BWBLP)

Adalah seseorang yang telah selesai menjalani masa pidananya sesuai dengan keputusan pengadilan dan mengalami hambatan untuk menyesuaikan diri kembali dalam kehidupan masyarakat, sehingga mendapat kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan atau melaksanakan kehidupannya secara normal.

16. Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)

Adalah seseorang yang telah dinyatakan terinfeksi HIV/AIDS dan membutuhkan pelayanan sosial, perawatan kesehatan, dukungan dan pengobatan untuk mencapai kualitas hidup yang optimal.

17. Korban Penyalahgunaan NAPZA

Adalah seseorang yang menggunakan narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya diluar pengobatan ataupun tanpa sepengetahuan dokter yang berwenang.

18. Korban Trafficking

Adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang.

19. Korban Tindak Kekerasan

Adalah orang baik individu, keluarga, kelompok maupun kesatuan masyarakat tertentu yang mengalami tindak kekerasan, baik sebagai akibat perlakuan salah, eksploitasi, diskriminasi, bentuk-bentuk kekerasan lainnya ataupun dengan membiarkan orang berada dalam situasi berbahaya sehingga menyebabkan fungsi sosialnya terganggu.

20. Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Adalah pekerja migran internal dan lintas negara yang mengalami masalah sosial, baik dalam bentuk tindak kekerasan, penelantaran, mengalami musibah (faktor alam dan sosial) maupun mengalami disharmoni sosial karena ketidakmampuan menyesuaikan diri di negara tempat bekerja sehingga

mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.

21. Korban Bencana Alam

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor terganggu fungsi sosialnya.

22. Korban Bencana Sosial

Adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror.

23. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi

Adalah seorang perempuan dewasa menikah, belum menikah atau janda dan tidak mempunyai penghasilan cukup untuk dapat memenuhi kebutuhan pokok sehari hari.

24. Fakir Miskin

Adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

25. Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Adalah keluarga yang hubungan antar anggota keluarganya terutama antara suami-istri, orang tua dengan anak kurang serasi, sehingga tugas-tugas dan fungsi keluarga tidak dapat berjalan dengan wajar.

26. Komunitas Adat Terpencil

Adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial ekonomi, maupun politik.

3.2.11.1. Persentasi PPKS yang Tertangani

Untuk mengukur Persentase PPKS yang Tertangani, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah PPKS

x100%

Jumlah kecamatan

Tabel 3.18. Persentasi PPKS yang Tertangani

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
13	Persentasi PPKS yang Tertangani	%	87,5	93,56	106,93		103,96

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentasi PPKS yang Tertangani pada tahun 2025 adalah sebesar 93,56% dengan capaian 106,93%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentasi PPKS yang Tertangani Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, sebesar 103,96% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN - PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Alamat : Jl. Terpadu No. Telp. (0763) 8001555 Fax. (0763) 8001555
SELATPANGJANG Kode Pos 28753

PPKS Yang Tertangani

No.	PMKS	Tahun 2025							
		TW 1		TW 2		TW3		TW4	
		Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
1	Anak Balita Terlarang	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anak Terlarang	1	1	67	67	155	155	156	156
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	17	17	23	23	23	23	23	23
4	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitas	-	-	5	5	5	5	35	35
6	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau di perlakukan salah	7	7	13	13	16	16	23	23
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lenjut Usia Terlarang	1.078	521	1.078	579	1.078	637	1.078	659
9	Penyandang Disabilitas	1.324	197	1.324	212	1.324	273	1.324	274
10	Tuna Susia	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	3	-	3	3
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Nafza	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	3	3	4	4	8	8	12	12
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Korban Bencana Sosial	8	8	13	13	23	23	30	30
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	151.091	141.794	151.091	141.794	167.545	161.254	167.545	159.588
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	2.933	276	2.937	1.215	2.937	1.215	2.937	1.215
Jumlah		156.462	142.824	156.555	143.925	173.117	163.609	173.166	162.018
Persentase		91,28%		91,93%		94,51%		93,66%	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kabupaten Kepulauan Meranti



DONKHAZAL S. Pd. M. Pd
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700302 199304 1 001

Gambar 3.5. Daftar PPKS di Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Komitmen pimpinan dalam menangani masalah sosial, sehingga PPKS termasuk salah satu program strategis Kabupaten Kepulauan Meranti.
 - b. Laporan yang masuk dari masyarakat akan kebutuhannya terhadap Pemerintah Daerah untuk mendapatkan bantuan sosial.
 - c. Adanya Kolaborasi dan Kerjasama yang baik dengan Perangkat Daerah Lainnya baik itu di tingkat Kabupaten, Provinsi maupun Nasional dalam upaya penanganan masalah-masalah terkait Pemerlu Pelayanan kesejahteraan Sosial (PPKS).
2. Faktor Penghambat Capaian :
 - a. Data PPKS di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum sepenuhnya akurat, dikarenakan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Meranti yang ber pulau-pulau, sehingga pendataan menjadi lebih sulit.
 - b. Masih terdapat penanganan PPKS yang belum tepat sasaran, sehingga pelaksanaan penanganan menjadi kurang efektif.
 - c. Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan PPKS, dimana untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat PPKS, membutuhkan biaya yang besar, sehingga belum semua masyarakat yang teridentifikasi PPKS belum dapat dilayani dengan maksimal.
3. Rekomendasi :
 - a. Bekerjasama dengan instansi vertikal maupun *stakeholder* dalam pemutakhiran data PPKS, sehingga akan memaksimalkan keakuratan data, dan pelayanan kepada PPKS dapat dilaksanakan dengan lebih baik.
 - b. Mensosialisasikan terhadap Perangkat Desa terkait Kriteria Masyarakat yang bisa dimasukkan kedalam data DTKS serta melakukan Verifikasi dan Validasi data DTKS secara berkala.
 - c. Meningkatkan penyediaan anggaran untuk pelaksanaan penanggulangan PPKS, baik dari APBD maupun dari dana pusat lainnya yang dapat diperuntukkan untuk penanggulangan PPKS.

3.2.12. Menurunnya Tingkat Pengangguran

Tingkatan pengangguran (*unemployment rate*) adalah angka yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif mencari pekerjaan. Pengertian menganggur disini adalah aktif mencari pekerjaan.

Penyebab pengangguran yang utama adalah karena adanya ketidakseimbangan antara pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang meningkat setiap tahunnya. Hal ini juga membuat adanya persaingan yang ketat antara pencari kerja baru dengan yang yang



sudah berpengalaman.

Pengangguran sangat berdampak pada kehidupan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang menurun, dan bahkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang menurun adalah salah satu dampak pengangguran. Penerimaan negara akan turun bila tingkat pengangguran tinggi, hal ini karena penerimaan pajak berkurang. Sebab pajak merupakan salah satu komponen penerimaan negara.

3.2.12.1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Untuk mengukur Tingkat Pengangguran Terbuka, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Jumlah penganggur usia angkatan kerja

x100%

Jumlah penduduk angkatan kerja

Tabel 3.19.Tingkat Pengangguran Terbuka

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
14	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6	4,51	133,04	4,74	126,39

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2025 adalah sebesar 4,51% dengan capaian 133,04%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan, dan berhasil menurunkan tingkat pengangguran.

Realisasi capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 126,39% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026, Realisasi Kinerja tersebut masih berada dibawah standar nasional yaitu sebesar 4,74.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Perekonomian yang meningkat, telah membuka lapangan pekerjaan dan menumbuhkan UMKM baru sehingga mengurangi tingkat pengangguran.

b. Banyak masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang dapat kembali bekerja ke Malaysia, mengingat pada umumnya banyak masyarakat Kabupaten Kepulauan Meranti yang berprofesi sebagai TKI di Malaysia.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Tingkat pendidikan yang masih rendah menyebabkan rendahnya serapan

- tenaga kerja lokal pada perusahaan maupun jenis usaha lainnya yang membutuhkan tenaga kerja, karena pada umumnya perekrutan tenaga kerja memiliki kualifikasi pendidikan tertentu.
- b. Masih banyak angkatan kerja lokal yang belum diberikan pelatihan tenaga kerja, sehingga masih belum memiliki pengalaman bekerja yang menyebabkan kurang diminati dalam perekrutan tenaga kerja.
 - c. Masih minimnya perusahaan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang berskala makro, sehingga serapan tenaga kerja cenderung kecil, dan menyebabkan masih tingginya tingkat pengangguran terbuka.
3. Rekomendasi :
- a. Mengikutsertakan angkatan kerja yang belum memiliki pengalaman bekerja pada pelatihan tenaga kerja, sehingga akan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dibutuhkan dalam perekrutan tenaga kerja.
 - b. Bekerjasama dengan pihak swasta maupun stakeholder dalam perekrutan tenaga kerja, untuk merekrut tenaga kerja yang direkomendasikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan data angkatan kerja serta data tingkat pengangguran.
 - c. Meningkatkan pendidikan di Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga kedepannya angkatan kerja lokal akan memiliki kualifikasi pendidikan yang memadai, serta dapat bersaing dengan angkatan kerja yang berasal dari luar daerah.
 - d. Melakukan reviu terhadap target indikator individu kinerja yang sudah/melampaui target bahkan sudah mencapai target akhir periode.

3.2.13. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama



Toleransi beragama merupakan sikap saling menghormati, saling menghargai setiap keyakinan orang, tidak memaksakan kehendak, serta tidak mencela ataupun menghina agama lain dengan alasan apapun.

Salah satu bentuk toleransi adalah toleransi beragama, yang merupakan sikap saling menghormati dan menghargai antar penganut agama lain, seperti tidak memaksakan orang lain untuk menganut agama

tertentu, tidak mencela/menghina agama lain dengan alasan apapun, serta tidak melarang ataupun menghalangi kegiatan beragama dari penganut agama lain.

3.2.13.1. Indeks Toleransi Antar Umat Beragama

Untuk mengukur Indeks Toleransi Antar Umat Beragama, maka digunakan rumus sebagai berikut :

Tabel 3.20. Indeks Toleransi Antar Umat Beragama

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
15	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	73,10	87,50	119,70	-	119,21

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi Indeks Toleransi Antar Umat Beragama pada tahun 2025 adalah sebesar 87,50 dengan capaian 119,70%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Toleransi Antar Umat Beragama Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026, sebesar 119,21%.



Gambar 3.6. Pelaksanaan Kegiatan FKUB

- 1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki komposisi penduduk yang sangat heterogen, baik suku maupun agama. Sehingga hal tersebut membentuk budaya masyarakat yang saling menghargai satu sama lain dan memiliki toleransi yang baik.
 - b. Pada umumnya, kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menyinggung pemeluk agama lain, sehingga

toleransi antar umat beragama masih terjaga dengan baik.

2. Faktor Penghambat Capaian :
 - a. Adanya isu-isu eksternal yang menyebabkan keretakan hubungan antar suku dan agama, sehingga menyebabkan turunnya toleransi antar umat beragama.
 - b. Masih terdapat beberapa orang pada masyarakat yang memiliki sifat intoleran, dan biasanya orang tersebut menghasut atau mengajak masyarakat untuk membenci agama tertentu, sehingga hal ini dapat memicu perpecahan.
3. Rekomendasi :
 - a. Melaksanakan sosialisasi maupun kegiatan yang dapat mempererat hubungan antar suku dan agama, sehingga mempererat toleransi antar umat beragama.
 - b. Memperkuat forum kerukunan umat beragama (FKUB) untuk lebih aktif dalam mewadahi setiap permasalahan antar umat beragama yang muncul, sehingga tidak menyebabkan konflik semakin melebar.
 - c. Mendorong pembangunan masyarakat yang bersifat inklusif.
 - d. Melakukan reviu terhadap target indikator kinerja yang sudah/melampaui target bahkan sudah mencapai target akhir periode.

3.2.14. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan tenteram, tertib, dan teratur. Hal ini sangat penting karena ketertiban sangat diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, dan hal itu memang sudah mutlak, untuk menciptakan keamanan keharmonisan antar masyarakat serta memacu pertumbuhan pembangunan dan mendorong terciptanya iklim investasi.

3.2.14.1. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

Untuk mengukur Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan), maka digunakan rumus sebagai berikut :

Pelanggaran K3 yang terselesaikan

x100%

Jumlah pelanggaran K3 yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh SATPOL PP

Tabel 3.21. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3
(Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
16	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	84	120	142,88	-	141,18

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 yang Tertangani pada tahun 2025 adalah sebesar 120% dengan capaian 142,88%. Hal ini menunjukkan bahwa Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi Kinerja tersebut telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun telah tercapai sebesar 141,18% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

Tabel 3.22. Tingkat penyelesaian Pelanggaran K3 Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun	Target	Realisasi Capaian	Realisasi Capaian (%)
2022	130	782	1.016
2023	130	130	130
2024	83	112	134
2025	84	120	142,88

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Dilaksanakannya operasi yustisi secara rutin oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga dapat menekan serta mencegah terjadinya PEKAT.

b. Dilaksanakannya sosialisasi kepada masyarakat / lingkungan yang berpotensi munculnya PEKAT, sehingga akan mencegah PEKAT.

c. Diberikannya sanksi sosial kepada pelaku PEKAT dalam rangka pembinaan, sehingga yang bersangkutan tidak akan melakukan PEKAT tersebut di masa mendatang.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Masih kurangnya kesadaran pelaku usaha dalam mematuhi Perda/Perkada terkait pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT).

b. Kurangnya pengawasan dan bimbingan orang tua dan lingkungan masyarakat terhadap remaja mengakibatkan mudahnya pengaruh negatif sehingga mengakibatkan remaja tersandung PEKAT.

- c. Belum maksimalnya peran lembaga trantibnas ditingkat Desa dan Kecamatan;
- d. Belum maksimalnya peran stakeholder terkait pencegahan PEKAT.

3.2.15. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan

kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Secara umum, budaya atau kebudayaan merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh bersama serta diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan daerah kepulauan di Provinsi Riau, yang memiliki identitas masyarakat dengan kebudayaan melayu. Oleh karena itu, kebudayaan melayu di Kabupaten Kepulauan Meranti harus dikembangkan dan dilestarikan. Jika hal tesebut tidak dilestarikan, maka Kebudayaan Melayu akan hilang oleh perkembangan zaman, mengingat pesatnya kemajuan zaman saat ini menyebabkan terkikisnya Kebudayaan Melayu oleh budaya dari luar yang dipandang lebih modern serta lebih maju.

3.2.15.1.Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan

Untuk mengukur Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan, maka digunakan rumus sebagai berikut :

jumlah seni budaya dan cagar budayayang terkelola dengan baik

jumlah seni budaya dan cagar budaya yang terdata

X 100%

Tabel 3.22. Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024				Capaian s/d 2024 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
17	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	20	54	270	-	216

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan pada tahun 2024 adalah sebesar 54% dengan capaian 270%. Hal ini menunjukkan bahwa Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan Kabupaten Kepulauan Meranti telah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, namun telah tercapai sebesar 216% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

Namun, pada pelaksanaan kinerja masih belum membuahkan hasil yang baik karena tidak ada perubahan penambahan cagar budaya yang dilestarikan. cagar budaya yang ada belum semuanya terdaftar dan terkelola dengan baik maka dari itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berusaha dan berupaya supaya sanggar-sanggar yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti ini dapat terkelola dengan baik dan terdata sehingga program kerja dapat terlaksana, tepat dan mengenai sasaran.

1. Faktor Pendukung Capaian :

- a. Adanya seksi sejarah dan kepurbakalaan, seksi cagar budaya dan permusiuman, seksi kesenian dan teradisi masyarakat berkedudukan dibidang kebudayaan sehingga memudahkan upaya pelestarian cagar budaya serta pengelolaan kebudayaan dan pembuatan program perencanaan kegiatan.
- b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti bekerja sama dengan Lembaga Adat Melayu Riau Kabupaten Kepulauan Meranti dalam berbagai aspek, khususnya pada pemajuan dan pelestarian kebudayaan Melayu.
- c. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah menerbitkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti tentang budaya bertanjak untuk melestarikan serta memajukan kebudayaan Melayu.

2. Faktor Penghambat Capaian :

- a. Belum adanya Tenaga Ahli Arkiologi dan Artopologi sehingga belum bisa melakukan pendataan cagar budaya.
- b. Rasionalisasi anggaran, yang menyebabkan pelaksanaan kegiatan menjadi terhambat serta tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal.
- c. Mulai pudarnya kesadaran masyarakat dalam melestarikan kebudayaan melayu khususnya budaya melau Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai identitas sosial, sehingga kebudayaan tersebut mulai hilang.
- d. Kemajuan zaman serta globalisasi teknologi informasi yang berkembang di masyarakat tidak diimbangi dengan sosialisasi maupun pendidikan kebudayaan Melayu, sehingga menurunkan minat masyarakat terhadap pemajuan kebudayaan Melayu.



3. Rekomendasi :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan melayu, baik kegiatan formal maupun informal, dan lebih dikhususkan kepada kalangan muda, sehingga estafet kebudayaan melayu tidak hilang, dan dapat meningkatkan pemajuan kebudayaan Melayu.
 - b. Memberikan sosialisasi maupun pendidikan baik secara formal maupun informal mengenai Kebudayaan Melayu Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga keilmuan serta pengetahuan kebudayaan Melayu tidak hilang.
 - c. Perlu adanya tenaga ahli Arkiologi dan Artopologi sebagai upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda

3.2.16. Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

Manajemen pemerintahan adalah upaya instansi pemerintah untuk mengelola negara agar tercapai ketertiban, kesejahteraan, dan kemakmuran masyarakat. Manajemen pemerintahan daerah di Indonesia dilandasi oleh Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan hak otonomi yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Kualitas manajemen pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, menggambarkan mengenai kualitas tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, serta pemenuhan kebutuhan masyarakat, sehingga kualitas manajemen pemerintahan sangat penting serta menjadi acuan dalam menilai baik atau buruknya sebuah organisais pemerintah.

3.2.16.1.Nilai AKIP

Penilaian terhadap AKIP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang didasarkan kepada Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 dimana hasil penilaian dikeluarkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE).

Tabel 3.23. Nilai AKIP

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024				Capaian s/d 2024 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
16	Nilai AKIP	%	A	B	66,67	A	66,67

Nomor : B/197/AA.05/2025 27 Desember 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :
• UU No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1: "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
• Surat ini dibuat dengan cara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
• Surat ini dapat diunduh secara elektronik di <http://easurur.mempn.go.id>, dengan kode 2512260YRU.
• Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SPAN-LAPORI di lapor.go.id.



AKIP tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Kepulauan Meranti masih belum memiliki peningkatan Akuntabilitas Kinerja yang signifikan. Hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum sepenuhnya melaksanakan rekomendasi hasil evaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di tiap komponen penilaian pada tahun sebelum, terutama pada komponen Perencanaan Kinerja.

Pada evaluasi SAKIP Tahun 2025, capaian nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2024 Nilai AKIP adalah 68,21 dan pada 2025 nilai AKIP adalah 68,56. Terjadi peningkatan sebesar 0,35 pada tahun 2025.

Selain itu, juga terdapat beberapa faktor yang mendukung maupun menghambat capaian kinerja antara lain :

1. Faktor Pendukung Capaian :
 - a. Penguatan terhadap Tim SAKIP Kabupaten Kepulauan Meranti serta didukung oleh komitmen pimpinan, sehingga kinerja pelaksanaan SAKIP dapat dijalankan lebih baik.
 - b. Asistensi yang dilakukan oleh Tim kepada Perangkat Daerah, sehingga meningkatkan pemahaman pengelola SAKIP di Perangkat Daerah.
 - c. Pelaksanaan simulasi evaluasi SAKIP, sehingga Tim SAKIP Kabupaten Kepulauan Meranti beserta seluruh Perangkat Daerah sudah memiliki persiapan sebelum pelaksanaan evaluasi, baik secara dokumen, pemahaman

maupun kebutuhan teknis lainnya.

2. Faktor Penghambat Capaian :

2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,56** dengan predikat "**B**". Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja "**Baik**", yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diakses melalui portal <https://portalrb.meranti.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh:

AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

Tembusan

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Gubernur Riau;
4. Bupati Kepulauan Meranti.

a. Rekomendasi dari LHE SAKIP tahun-tahun sebelumnya, pada umumnya masih belum ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah terkait, sehingga hal tersebut menjadikan capaian nilai AKIP tidak meningkat secara signifikan.

b. Penyusunan dokumen SAKIP di Perangkat Daerah dapat ditemui beberapa masih bersifat *output* dan belum sampai pada level *outcome*, karena masih berorientasi pemenuhan

dokumen, serta masih belum memuat *eviden* yang tepat.

- c. Masih terdapat ketidakselarasan antara dokumen perencanaan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) dengan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, serta masih terdapat sasaran yang memiliki indikator kurang tepat, sehingga pengukuran capaian kinerja menjadi kurang tepat sasaran.
- d. Masih terdapat banyak pengelola SAKIP pada Perangkat Daerah yang masih dibebankan pada 1 atau beberapa orang saja, yang menyebabkan implementasi serta penyusunan dokumen SAKIP menjadi tidak maksimal.

3. Rekomendasi Perbaikan :

- a. Menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang dituangkan dalam LHE SAKIP.
- b. Memperbaiki dokumen Perencanaan, sehingga indikator pada pengukuran kinerja kan menjadi lebih baik serta dapat diukur dengan tepat sasaran (SMART).
- c. Memaksimalkan kinerja dari tim SAKIP pada Perangkat Daerah, serta mendistribusikan pekerjaan pada seluruh tim beserta unit terkait, sehingga pekerjaan akan terlaksana lebih baik.
- d. Menyusun dokumen SAKIP dengan menyertakan analisis dan eviden yang akurat, sehingga akan menunjukkan output serta outcome yang berkualitas serta menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan.
- e. Melaksanakan pendampingan SAKIP oleh tenaga ahli yang berkompeten,



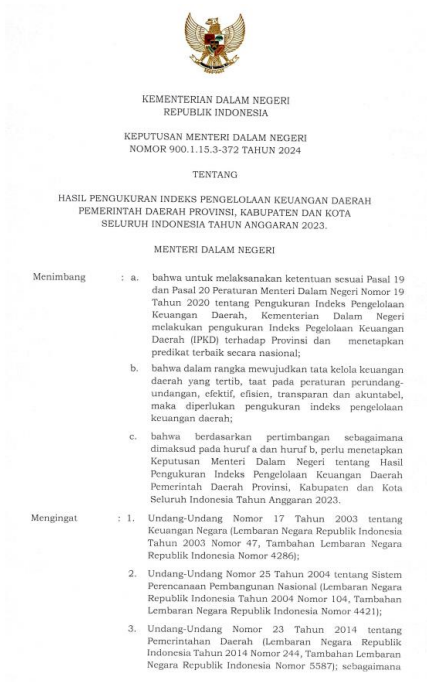
sehingga akan meningkatkan pemahaman ASN mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

3.2.16.2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

Nilai dari Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri, sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020, bahwa yang melaksanakan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Pemerintah Provinsi.

Tabel 3.24. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
1	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	82	69,795	85,13	-	84,09



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah pada tahun 2025 masih menggunakan capaian tahun 2024, karena IPKD masih dalam tahapan proses penilaian, yang hasilnya akan dikeluarkan di tahun 2026. Oleh karena itu, ralisasi kinerja dari IPKD adalah sebesar 69,795 dengan capaian 86,17%. Capaian tersebut masih berada dibawah target dari kinerja tahun 2025, dan capaiannya belum mencapai dari target akhir RPJMD tahun 2026, namun sudah mencapai sebesar 84,09% dari target akhir RPJMD di tahun 2026.

Tidak tercapainya relaisasi kinerja tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti belum memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah dengan baik, hal tersebut dikarenakan juga oleh beberapa faktor antara lain:



No.	Kabupaten	Dimensi 1	Dimensi 2	Dimensi 3	Dimensi 4	Dimensi 5	Dimensi 6	Indeks Total	Peringkat	Nilai
43.	SIDOARJO	4,283	19,655	14,224	15	4,299	15	72,461	Perlu Perbaikan	B
44.	PULANG PISAU	11,63	19,138	10,086	15	1,603	15	72,458	Perlu Perbaikan	B
45.	KEPULAUAN SELAYAR	12,075	20	9,052	15	1,193	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
46.	NUNUKAN	11,458	19,655	9,052	15	2,155	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
47.	BATANGHARI	6,122	19,483	15	15	1,105	15	71,71	Perlu Perbaikan	B
48.	SUKAMARA	10,389	19,31	9,828	15	2,165	15	71,692	Perlu Perbaikan	B
49.	BEKASI	13,061	15	15	15	3,461	10,005	71,526	Perlu Perbaikan	B
50.	MALAKA	13,544	19,138	2,586	20	0,837	15	71,105	Perlu Perbaikan	B
51.	MURUNG RAYA	8,47	18,621	10,345	15	3,525	15	70,961	Perlu Perbaikan	B
52.	KARIMUN	9,462	19,655	15	10	1,524	15	70,641	Perlu Perbaikan	B
53.	SANGGAU	9,837	14,828	14,483	15	1,43	15	70,577	Perlu Perbaikan	B
54.	BOMBANA	9,348	19,655	15	10	1,28	15	70,283	Perlu Perbaikan	B
55.	KEPULAUAN MERANTI	11,218	18,448	13,966	15	1,158	10,005	69,795	Perlu Perbaikan	B
56.	BARITO UTARA	7,85	20	8,534	15	3,307	15	69,692	Perlu Perbaikan	B
57.	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,345	15	1,261	15	69,527	Perlu Perbaikan	B
58.	LAMONGAN	8,333	15	14,483	15	1,513	15	69,329	Perlu Perbaikan	B
59.	KEPULAUAN MENTAWAI	7,784	20	14,741	15	1,477	10,005	69,007	Perlu Perbaikan	B
60.	MALUKU TENGGARA	9,164	19,138	9,31	15	1,261	15	68,873	Perlu Perbaikan	B
61.	HULU SUNGAI TENGAH	7,873	19,655	9,052	15	1,893	15	68,473	Perlu Perbaikan	B
62.	BUTON UTARA	9,129	19,828	8,793	15	0,702	15	68,452	Perlu Perbaikan	B
63.	KUTAI BARAT	10,052	19,655	13,966	5	4,432	15	68,106	Perlu Perbaikan	B
64.	SERUYAN	8,631	19,655	7,759	15	1,796	15	67,84	Perlu Perbaikan	B
65.	BUTON SELATAN	7,334	19,483	14,483	15	1,253	10,005	67,557	Perlu Perbaikan	B

Gambar 3.7. Hasil Penilaian IPKD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti yang telah terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari pencapaian prediket Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari tahun-tahun sebelumnya

b. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti memiliki sumber daya aparatur yang memenuhi kompetensi dan kapabilitas, sehingga menunjang pengelolaan keuangan daerah yang baik.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Keterbatasan anggaran pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti serta terjadinya perubahan-perubahan kebijakan nasional yang menyebabkan sulitnya mengelola keuangan serta melaksanakan pembagian anggaran pada seluruh Perangkat Daerah.

b. Perencanaan program dan kegiatan serta keuangan yang kurang maksimal, menyebabkan pengelolaan keuangan daerah yang menjadi kurang terkelola dengan baik, terutama saat perumusan struktur RAPBD.

c. Realisasi Keuangan yang kurang maksimal menyebabkan hambatan pada pelaksanaan kinerja maupun pembangunan.
3. Rekomendasi Perbaikan :
- a. Mematangkan perencanaan kinerja dan keuangan, dengan memperhatikan program prioritas, sehingga pengelolaan keuangan akan terkelola dengan baik serta tepat sasaran.

b. Mencari inovasi pada penyusunan dan pengelolaan anggaran yang lebih adaptif terhadap dinamika perubahan kebijakan nasional.

c. Bersinergi dengan *stakeholder* terkait, agar perencanaan program dan keuangan yang disusun menjadi sejalan, serta tidak berbenturan.

3.2.16.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Penilaian terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi dilaksanakan oleh KPK RI, serta nilainya juga dicantumkan dalam LHE Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.25. Indeks Persepsi Anti Korupsi

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
1	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,88	4,40	113,41	3,40	112,82



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi pada tahun 2025 adalah 4,40 dengan capaian 113,41%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Indeks Persepsi Anti Korupsi Kabupaten Kepulauan Meranti sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut telah berada di atas standar nasional yaitu 3,40 dan capaiannya telah mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualaun Meranti pada tahun 2026 yaitu sebesar 112,82%.

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta seluruh jajaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

b. Kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan hasil yang memuaskan, dapat dilihat dari catatan keuangan dengan perolehan WTP.

c. Seluruh Pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah melaporkan LHKPN, sehingga hal tersebut merupakan salah datu tindakan preventif dalam meningkatkan anti korupsi.
2. Faktor Penghambat Capaian :

- a. Masih rendahnya persentase penyelesaian tindak lanjut hasil temuan aparat pengawasan karena kurangnya kesadaran OPD untuk menindaklanjuti temuan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh APIP.
 - b. Tidak adanya data/dokumen Review dan Penilaian Internal Zona Integritas dari OPD terkait dikarenakan rendahnya atensi pemenuhan data/dokumen Review dan Penilaian Internal yang dilaksanakan sampai batas akhir waktu yang diberikan kepada Inspektorat untuk melakukan Review dan Penilaian Internal, data/dokumen tersebut tetap tidak didapatkan oleh Inspektorat. Selain itu Inspektorat juga tidak diberikan waktu yang cukup untuk melakukan review.
3. Rekomendasi :
- a. Membuat Surat Bupati Kepulauan Meranti tentang penetapan pelaksanaan Review, Evaluasi dan Penilaian Internal Zona Integritas Tahun Anggaran 2025 dan mengirimkan surat tersebut ke OPD, menjalin komunikasi yang intensif dengan OPD terkait pelaksanaan Review Evaluasi dan Penilaian Internal Zona Integritas dan meminta kepada TAPD diberikan waktu yang cukup untuk melakukan *review*.
 - b. Meningkatkan pengawasan dalam hal pelaksanaan tindaklanjut hasil temuan aparat pengawasan, agar seluruh rekomendasi dapat dilaksanakan dan diselesaikan.
 - c. Melakukan reuiu terhadap target indikator kinerja yang sudah/melampaui target bahkan sudah mencapai target akhir periode.

3.2.17. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.

Peningkatan kualitas pelayanan publik telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta Peraturan Pemerinta Nomot 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jenis pelayanan menurut Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Administratif
2. Pelayanan Barang
3. Pelayanan Jasa

Untuk melaksanakan pelayanan publik yang baik,maka harus mengikuti prinsip dari pelayanan publik. Prinsip dari pelayanan publik yang telah diatur, adalah sebagai berikut :

- 1. Kesederhanaan.
- 2. Kejelasan.
- 3. Kepastian waktu.
- 4. Akurasi.
- 5. Keamanan.
- 6. Tanggung jawab.
- 7. Kelengkapan sarana dan prasarana.
- 8. Kemudahan akses.

3.2.17.1.Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Nilai dari Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dimana penilaian Indeks tersebut dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

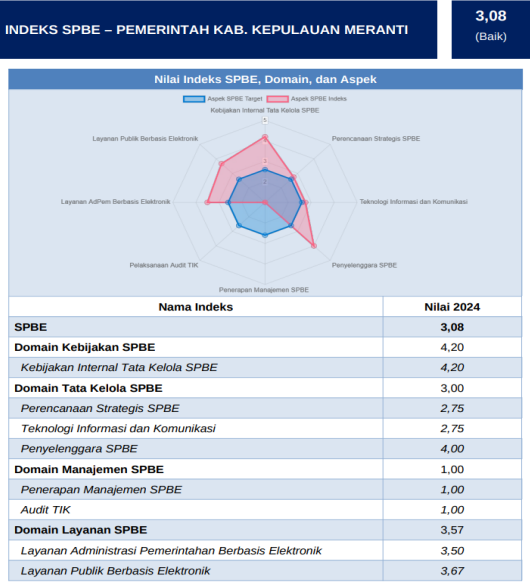
Tabel 3.26. Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik

No	Indikator Kinerja	Satuan	2025				Capaian s/d 2025 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
1	Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,08	98,72	3,23	88

Kabupaten Kepulauan Meranti tidak menjadi lokus dalam pelaksanaan Evaluasi Indeks Pemerintahan Berbasis Elektronik, sehingga capaian kinerja yang digunakan masih capain kinerja pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada tahun 2025 adalah 3,08 dengan capaian 98,72%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Kabupaten Kepulauan Meranti belummencapai target yang telah ditetapkan.

Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah standar nasional yaitu 3,23 dan capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepualauan Meranti, nemun telah mencapai sebesar 88% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.



Gambar 3.8. Hasil Penilaian SPBE Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Telah terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti yang sebelumnya merupakan Bagian Kominfo pada Sekretariat Daerah, sehingga hal tersebut menyebabkan DISKOMINFOTIK mempunyai wewenang serta anggaran yang lebih besar dalam menunjang pelaksanaan SPBE di Kabupaten Kepulauan Meranti.

b. *Smart City* adalah salah satu Program Strategis Bupati Kepulauan Meranti, dimana salah satu tujuan *Smart City* adalah percepatan pelaksanaan SPBE, sehingga SPBE menjadi salah satu fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintah.

c. Kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dewasa ini menuntut kinerja yang efektif dan efisien, sehingga untuk dapat memenuhi hal tersebut, dibutuhkan sebuah sistem yang membuat 1 data, 1 alur kinerja, serta terdigitalisasi, dimana hal tersebut dapat dijawab dengan implementasi SPBE.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Masih terbatasnya anggaran pada pengembangan SPBE di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, karena untuk membangun sebuah sistem / aplikasi membutuhkan biaya yang besar. Jika keterbatasan anggaran masih menjadi kendala, maka akan menyebabkan lambatnya pengembangan dari SPBE itu sendiri.

b. Keterbatasan SDM Tenaga IT yang menangani SPBE di Kabupaten Kepulauan Meranti, menyebabkan lambatnya perkembangan SPBE. Hal tersebut dikarenakan, pada percepatan pengembangan sistem / aplikasi untuk menunjang SPBE, membutuhkan banyak Tenaga IT yang berkompeten serta mampu bekerja dalam tingkat *stress* yang tinggi.

- c. Masih terdapat lokasi di Kabupaten Kepulauan Meranti, baik yang termasuk dalam *blank spot*, maupun termasuk dalam zona yang masih memiliki jaringan yang lambat / tidak stabli sehingga menyebabkan akses untuk pengembangan SPBE kurang berdampak di lokasi tersebut.
 - d. Masih terdapat banyak ASN maupun masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum melek terhadap perkembangan teknologi informasi, sehingga hal ini akan menjadi hambatan dalam implementasi SPBE.
3. Rekomendasi :
- a. Meningkatkan tersediaan anggaran pada pengembangan SPBE, sehingga akan memacu percepatan peningkatan SPBE, mengingat untuk membangun sistem dan aplikasi memerlukan biaya yang besar.
 - b. Menambah tenaga IT pada pengelola SPBE, karena untuk melaksanakan pengembangan SPBE memerlukan banyak tenaga IT yang berkompeten.
 - c. Melaksanakan sosialisais mengenai sistem / aplikasi di SPBE kepada ASN maupun masyarakat, sehingga setiap perkembangan sistem akan diketahui bersama mengenai tata cara penggunaannya serta akan berdampak pada kemajuan SPBE.

3.2.17.2.Indeks Pelayanan Publik

Penilaian dari Indeks Pelayanan Publik dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta hasil penilaian dikeluarkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan LHE Reformasi Birokrasi.

Tabel 3.26. Indeks Pelayanan Publik

No	Indikator Kinerja	Satuan	2024				Capaian s/d 2024 terhadap 2026
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Realisasi Nasional	
1	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5	3,13	89,43	4,75	84,60

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi kinerja Indeks Pelayanan Publik pada tahun 2025 adalah 3,13 dengan capaian 89,43%. Hal ini menunjukkan bahwa Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Meranti belum mencapai target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terjadi penurunan dari capaian Indeks

Pelayanan Publik, dimana pada tahun 2024 capaian nilai adalah 2,71, maka terdapat peningkatan sebesar 0,42 pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan pada kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di tahun 2025, serta terdapat perubahan perangkat daerah lokus penilaian dan komitmen peningkatan kualitas pelayanan publik pada tahun 2025 menjadi salah satu faktor kunci pada peningkatan nilai tersebut.

Realisasi kinerja tersebut masih berada di bawah standar nasional yaitu 4,75 dan capaiannya belum mencapai target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti, nemun telah mencapai sebesar 84,60% dari target akhir RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2026.

 MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik; b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		<table><tr><th>No</th><th>Instansi</th><th>Indeks</th><th>Kategori</th></tr><tr><td>287</td><td>Pemerintah Kabupaten Tolikara</td><td>3.15</td><td>B-</td></tr><tr><td>288</td><td>Pemerintah Kabupaten Buru</td><td>3.14</td><td>B-</td></tr><tr><td>289</td><td>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti</td><td>3.13</td><td>B-</td></tr><tr><td>290</td><td>Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan</td><td>3.13</td><td>B-</td></tr><tr><td>291</td><td>Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi</td><td>3.08</td><td>B-</td></tr><tr><td>292</td><td>Pemerintah Kabupaten Manggarai</td><td>3.08</td><td>B-</td></tr><tr><td>293</td><td>Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur</td><td>3.06</td><td>B-</td></tr><tr><td>294</td><td>Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe</td><td>3.04</td><td>B-</td></tr><tr><td>295</td><td>Pemerintah Kabupaten Barru</td><td>3.02</td><td>B-</td></tr><tr><td>296</td><td>Pemerintah Kabupaten Sinjai</td><td>3.01</td><td>B-</td></tr><tr><td>297</td><td>Pemerintah Kabupaten Lombok Barat</td><td>3.00</td><td>C</td></tr><tr><td>298</td><td>Pemerintah Kabupaten Muna Barat</td><td>2.96</td><td>C</td></tr><tr><td>299</td><td>Pemerintah Kabupaten Pati</td><td>2.96</td><td>C</td></tr><tr><td>300</td><td>Pemerintah Kabupaten Boalemo</td><td>2.95</td><td>C</td></tr><tr><td>301</td><td>Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong</td><td>2.95</td><td>C</td></tr><tr><td>302</td><td>Pemerintah Kabupaten Sumba Timur</td><td>2.94</td><td>C</td></tr><tr><td>303</td><td>Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah</td><td>2.94</td><td>C</td></tr><tr><td>304</td><td>Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu</td><td>2.92</td><td>C</td></tr></table>		No	Instansi	Indeks	Kategori	287	Pemerintah Kabupaten Tolikara	3.15	B-	288	Pemerintah Kabupaten Buru	3.14	B-	289	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	3.13	B-	290	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.13	B-	291	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	3.08	B-	292	Pemerintah Kabupaten Manggarai	3.08	B-	293	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	3.06	B-	294	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.04	B-	295	Pemerintah Kabupaten Barru	3.02	B-	296	Pemerintah Kabupaten Sinjai	3.01	B-	297	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	3.00	C	298	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.96	C	299	Pemerintah Kabupaten Pati	2.96	C	300	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2.95	C	301	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.95	C	302	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.94	C	303	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2.94	C	304	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2.92	C
No	Instansi	Indeks	Kategori																																																																												
287	Pemerintah Kabupaten Tolikara	3.15	B-																																																																												
288	Pemerintah Kabupaten Buru	3.14	B-																																																																												
289	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	3.13	B-																																																																												
290	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.13	B-																																																																												
291	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	3.08	B-																																																																												
292	Pemerintah Kabupaten Manggarai	3.08	B-																																																																												
293	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	3.06	B-																																																																												
294	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.04	B-																																																																												
295	Pemerintah Kabupaten Barru	3.02	B-																																																																												
296	Pemerintah Kabupaten Sinjai	3.01	B-																																																																												
297	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	3.00	C																																																																												
298	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.96	C																																																																												
299	Pemerintah Kabupaten Pati	2.96	C																																																																												
300	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2.95	C																																																																												
301	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.95	C																																																																												
302	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.94	C																																																																												
303	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2.94	C																																																																												
304	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2.92	C																																																																												

Gambar 3.9. Hasil Penilaian Indeks Pelayanan Publik Kabupaten Kepulauan Meranti

1. Faktor Pendukung Capaian :
- a. Pendampingan secara berkala kepada Perangkat Daerah Pelayanan Publik, baik yang dilaksanakan oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah maupun oleh Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau, sehingga terbentuk pemahaman serta rencana aksi di Perangkat Daerah Pelayanan Publik untuk meningkatkan pelayanan publik.

b. Tebangunnya komitmen pimpinan pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik,

sehingga pendampingan serta rencana aksi yang telah dilaksanakan dapat diimplementasikan.

- c. Seluruh pelayanan perizinan telah dilimpahkan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga peningkatan pelayanan publik dapat dilaksanakan dengan lebih fokus di satu tempat, serta pengguna layanan tidak perlu datang ke Dinas teknis yang mengurus rekomendasi perizinan.
 - d. Telah dilaksanakannya monitoring, evaluasi serta simulasi persiaoran penilaian pelayanan publik, sehingga Perangkat Daerah Lokus Penilaian menjadi lebih siap dan mengetahui materi evaluasi lebih baik.
2. Faktor Penghambat Capaian :
- a. Kurangnya komitmen Pimpinan maupun pelaksana pada beberapa Perangkat Daerah dalam menjalankan fungsi meja pelayanan (*front office*), sehingga menurunkan kepuasan masyarakat maupun kesiapan aparatur jika dilaksanakan monitoring dan evaluasi.
 - b. Masih terdapat beberapa komponen kepatuhan standar pelayanan publik di sebagian Perangkat Daerah Pelayanan Publik yang belum dipenuhi. Hal ini dikarenakan keadaan fisik kantor yang kurang memungkinkan untuk digunakan menjadi ruang pelayanan publik, diantara kendalahnya antara lain:
 - 1) Ruang Kantor yang terlalu sempit
 - 2) Fasilitas dasar yang kurang memadai, seperti kurangnya ketersediaan komputer untuk pelayanan, jaringan internet kurang memadai
 - c. Masih banyak petugas *front office* yang belum pernah mengikuti pelatihan petugas *front office*, sehingga belum memiliki keterampilan yang baik sebagai petugas.
 - d. Pengelolaan website pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik masih belum dikelola dengan baik, sehingga informasi mengenai pelayanan publik belum tersampaikan dengan sepenuhnya kepada pengguna layanan. Hal ini disebabkan karena kekurangan ASN yang memahami mengenai pengelolaan website pada Perangkat Daerah Pelayanan Publik.
 - e. Pada umumnya, pemenuhan kepatuhan serta penyelenggaraan pelayanan publik dan pemahaman pelayanan publik hanya dilaksanakan untuk persiapan evaluasi saja, sehingga pemahaman terhadap pelayanan publik cenderung tidak terbentuk secara komprehensif.
3. Rekomendasi :
- a. Meningkatkan Komitmen Pimpinan dengan melaksanakan fungsi meja pelayanan (*front office*) serta komponen pelayanan publik dengan maksimal,

dan tidak hanya untuk persiapan penilaian saja.

- b. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan publik dengan meningkatkan anggaran pada Perangkat Daerah Pelayanan, sehingga akan meningkatkan efektifitas pelayanan publik serta meningkatkan kepuasan masyarakat.
- c. Mengikutkan petugas front office pada pelatihan front office serta pelatihan pelayanan publik secara berkala.
- d. Meningkatkan pengelolaan website Perangkat Daerah Pelayanan Publik dengan meningkatkan koordinasi dengan DISKOMINFOTIK maupun menpah personil yang memiliki kemampuan IT, sehingga pengelolaan website tidak terbengkalai serta penyebaran informasi pelayanan publik dapat berjalan dengan baik.

3.3. Capaian Kinerja Keuangan

Untuk mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi atas capaian kinerja pada setiap sasaran strategis, dibandingkan dengan realisasi anggaran. data adalah sebagai berikut:

Tabel 3.27. Meningkatnya Infrastruktur Dasar

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					%
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi		
1.	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	1. Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	67,82	70,27	104	1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	3.615.264.900	2.301.862.900	63,671	
							2	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.282.334.866	9.659.808.336,34	78,648	
							3	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	260.972.000	30.968.000	11,866	
							4	Program Penyelenggaraan Jalan	38.190.372.387	31.534.437.599	82,572	
							5	Program Penataan Bangunan Gedung	14.115.988.405	10.882.158.320,92	77,091	
							6	Program Kawasan Permukiman	3.366.408.831	2.721.139.033,36	80,832	
							7	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.049.013.390	607.281.990	57,891	
							8	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	18.300.568.357	12.328.936.708,55	67,369	
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					104	TOTAL PER SASARAN		91.180.923.136	70.066.592.888	64,99
Tingkat Efisiensi 39,01												
Tingkat Efektifitas 160,02												



Tabel 3.28. Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
2.	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau		Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	60	60	100	1	Program Pengelolaan Pelayaran	3.341.103.840	1.887.261.121,63	56,486
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR						100	TOTAL PER SASARAN		3.341.103.840	1.887.261.122
Tingkat Efisiensi 43,51												
Tingkat Efektifitas 177,03												

Tabel 3.29. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				%
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
3.	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	%	56,6	62,83	111	1	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.178.810.900	94.217.000	7,9925
		Indeks Kualitas Udara	%	90,8	74,19	83	2	Program Pengelolaan Persampahan	6.611.066.534	5.092.598.763	77,031
		Indeks Kualitas Lahan	%	65,2	82,39	126,4					
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR			106,8	TOTAL PER SASARAN			7.789.877.434	5.186.815.763	42,51
Tingkat Efisiensi 64,28											
Tingkat Efektifitas 251,20											



Tabel 3.30. Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
4.	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1	Indeks Pendidikan	Indeks	62,25	69	110,9	1	Program Pengelolaan Pendidikan	79.482.997.144	46.456.288.825	58,448
		2						Program Pembinaan Perpustakaan	2.629.196.560	2.460.249.912	93,574	
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					110,9	TOTAL PER SASARAN		82.112.193.704	48.916.538.737	76,01
Tingkat Efisiensi 34,84												
Tingkat Efektifitas 145,83												

Tabel 3.31. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
5.	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	1	Indeks Kesehatan	Indeks	74,75	72,4	96,86	1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	37.863.562.033	30.744.237.241,84	81,197
								2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	12.145.402.776	7.217.018.860	59,422
								3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	169.049.000	82.380.000	48,731
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					96,86	TOTAL PER SASARAN			50.178.013.809	38.043.636.102
Tingkat Efisiensi 33,74												
Tingkat Efektifitas 153,46												



Tabel 3.32. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
6.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	1	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	71	75,9	101,54	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	18.639.680.159	13.773.431.468	73,893
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					101,54	TOTAL PER SASARAN		18.639.680.159	13.773.431.468	73,89
Tingkat Efisiensi 27,65												
Tingkat Efektifitas 137,41												

Tabel 3.33. Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan					%	
					Target	Realisasi	%	Program			Pagu	Realisasi		
7.	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah	1	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	76	74,68	98,27	1	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat			1.498.646.010	717.245.400	47,86
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					98,27	TOTAL PER SASARAN			1.498.646.010	717.245.400	47,86	
Tingkat Efisiensi 50,41														
Tingkat Efektifitas 205,33														



Tabel 3.34. Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
8.	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	1.	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,2	4,85	98,18	1	Program Administrasi Pemerintahan Desa	385.742.420	272.699.150	70,695
								2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	15.254.000	4.496.400	29,477
								3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	3.371.334.000	1.254.654.800	37,215
								4	Program Pengembangan UMKM	239.890.040	239.831.040	99,975
								6	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	2.123.512.000	1.000.568.000	47,119
								7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.790.403.000	1.122.234.202	62,681
								8	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	9.987.550	0	0
								9	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	5.000.000	0	0
								10	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.596.718.832	542.241.022	33,96
								11	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	1.233.634.600	88.497.800	7,1737
								12	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	51.365.000	1.365.000	2,6575
								13	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	284.248.450	283.591.450	99,769
								14	Program Perekonomian dan Pembangunan	1.397.793.589	804.924.376	57,585
								RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR				
Tingkat Efisiensi 56,00												
Tingkat Efektifitas 232,78												



Tabel 3.35. Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
9.	Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	1	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	350	243,921	69,70	1	Program Promosi Penanaman Modal	566.360.500	492.593.700	86,975
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					69,70	TOTAL PER SASARAN		566.360.500	492.593.700	86,98
Tingkat Efisiensi -17,28												
Tingkat Efektifitas 80,14												

Tabel 3.36. Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
10.	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	1	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	8,27	16.460	199,00	1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	81.069.000	13.591.200	16,765
								2	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	907.200.000	532.900.000	58,741
								3	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	3.371.334.000	1.254.654.800	37,215
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					199,00	TOTAL PER SASARAN		4.359.603.000	1.801.146.000	37,57
Tingkat Efisiensi 161,43												
Tingkat Efektifitas 529,62												



Tabel. 3.37. Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
11.	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	1	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	87,5	93,56	196,93	1	Program Pemberdayaan Sosial	66.218.000	19.750.000	29,826
		2						Program Rehabilitasi Sosial	275.902.000	83.904.000	30,411	
		3						Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.055.900.000	425.454.000	40,293	
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					196,93	TOTAL PER SASARAN		1.398.020.000	529.108.000	33,51
Tingkat Efisiensi 163,42												
Tingkat Efektifitas 587,68												

Tabel 3.38. Menurunnya Tingkat Pengangguran

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
12.	Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,00	4,51	133,04	1	Program Hubungan Industrial	1.180.374.850	573.889.800	48,619
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					133,04	TOTAL PER SASARAN		1.180.374.850	573.889.800	48,62
Tingkat Efisiensi 84,42												
Tingkat Efektifitas 273,64												



Tabel 3.39. Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama

No.	Sasaran	Indikator		Satuan	Kinerja			Keuangan				%
					Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
13.	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	1	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	73,10	87,50	119,70	1	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	75.000.000	0	0
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR					119,70	TOTAL PER SASARAN		75.000.000	0	0
Tingkat Efisiensi 119,70												
Tingkat Efektifitas 119,70												

Tabel 3.40. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				%
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi	
14.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat	1 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan	%	84,00	120	142,88	1	Program Peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	6.531.577.250	4.964.729.200	76,011
							2	Program Penanggulangan Bencana	1.369.020.000	622.597.802	45,478
							3	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	2.472.297.560	1.659.552.357	67,126
							4	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	65.327.750	2.248.000	3,4411
							5	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	519.277.900	265.283.900	51,087
							RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR			142,88	TOTAL PER SASARAN
Tingkat Efisiensi 94,25											
Tingkat Efektifitas 293.82											

Tabel 3.41. Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan				%	
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi		
15.	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan	1	Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	20	54	270	1	Program Pengembangan Kebudayaan	790.000.000	503.166.400	63,692
								2	Program Pengembangan kesenian Tradisional	168.000.000	0	0
								3	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	232.487.719	28.800.000	12,388
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR				270	TOTAL PER SASARAN		1.190.487.719	531.966.400	25,36	
Tingkat Efisiensi 244,64												
Tingkat Efektifitas 1064,67												

Tabel 3.42 Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					%	
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi			
16.	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan	1	Nilai AKIP	Nilai	A	B (68.56)	66,67	1	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	74.160.000	60.517.600	81,604	
		2	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	82	69,75	85,13	2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.263.470.400	1.332.425.948	58,867	
		3	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,88	4,40	113,41	3	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.455.916.000	517.798.137	35,565	
								4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	643.741.039.942	469.995.563.386	73,01	
								5	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	2.054.577.584	1.450.678.775	70,607	
								6	Program Penyelenggaraan Pengawasan	2.274.337.990	807.808.179	35,518	
								7	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	934.268.040	37.810.000	4,047	
		RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR				88,4	TOTAL PER SASARAN		652.797.769.956	474.202.602.025	51,32		
		Tingkat Efisiensi 37,09											
		Tingkat Efektifitas 172,27											



Tabel 3.43. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Kinerja			Keuangan					%
				Target	Realisasi	%	Program		Pagu	Realisasi		
17.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	1	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,08	98,72	1	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	1.758.722.235	1.026.371.666	58,359
		2	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5	3,13	89,43	2	Program Pendaftaran Penduduk	347.932.926	284.774.946	81,848
								3	Program Pencatatan Sipil	110.933.100	5.217.000	4,7028
								4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	34.557.950	70.487.310	203,97
								5	Program Pelayanan Penanaman Modal	101.933.100	100.000.000	98,104
								6	Program Kepegawaian Daerah	1.909.851.100	997.101.427	52,208
								7	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.070.709.000	443.230.558	41,396
								8	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	15.000.000	13.190.000	87,933
								RATA - RATA CAPAIAN PER INDIKAROR			94,08	TOTAL PER SASARAN
		Tingkat Efisiensi 15,51										
Tingkat Efektifitas 119,74												

Rata - rata Tingkat Efisiensi 73,68%
Rata - rata Tingkat Efektifitas 276,73%

3.4. Capaian Indikator Tujuan

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2021-2026 terdapat tujuh tujuan dan 9 indikator tujuan serta 22 indikator sasaran. Adapun capaian indikator tujuan dan indikator sasaran disajikan pada Tabel 3.43 berikut ini. Dari tabel tersebut dapat diketahui rata-rata capaian indikator tujuan adalah 106,9% dan rata-rata capaian indikator sasaran adalah 112,4% atau dengan kata lain berdasarkan kriteria penilaian kinerja terkategori sangat tinggi.

Sementara itu, jumlah serta persentase indikator tujuan dan indikator sasaran yang dikelompokkan berdasarkan kriteria penilaian dapat dilihat pada Tabel 3.42 dan Gambar 3.9 berikut. Dari data tersebut. Dari data tersebut dapat dinyatakan bahwa hamper semua seluruh capaian indikator tujuan masuk dalam kategori sangat tinggi, sedangkan untuk indikator sasaran terdapat 15 indikator terkategori sangat tinggi sedangkat selebihnya masuk dalam kategori tinggi, sedang dan rendah.

Tabel 3.42 Kategori Capaian Indikator Tujuan dan Indikator Sasaran Tahun 2024

KRITERIA PENILAIAN	KODE	TUJUAN	SASARAN
Sangat tinggi		8	15
Tinggi		2	3
Sedang		0	2
Rendah		0	2
Sangat Rendah		0	0
Tidak Dapat Dihitung		0	0
Jumlah		10	22

Untuk mengukur Capaian Indikator Tujuan dan Relevansinya dengan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD, maka dilihat pada tabeil dibawah ini:

Tabel 3.43 Realisasi dan Capaian Indikator Tujuan dan Relevansinya dengan Capaian Indikator Sasaran Tahun 2025 dan Akhir Periode RPJMD

UJUAN / SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	2025			KONDISI AKHIR RPJMD		STATUS KINERJA 2025	KONTRI-BUSI
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN (%)		
T1	Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Merata dan Berkelanjutan		Indeks Pembangunan Infrastruktur	Indeks	66,25	70,27	106,07	70,24	100,05		
	S1.1	Meningkatnya Infrastruktur Dasar	Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar	%	67,82	70,27	104	72,81	97		
	S1.2	Meningkatnya Aksesibilitas Transportasi Antar Pulau	Tingkat Konektivitas Antar Pulau	%	60	60	100	60	100		
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	68,40	71,71	104,84	68,7	104,39		
	S1.3	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Air, Udara Dan Lahan	Indeks Kualitas Air	Indeks	56,6	62,83	111	56,7	110,82		
			Indeks Kualitas Udara	Indeks	90,8	74,19	83	91	81,53		
			Indeks Kualitas Lahan	Indeks	65,2	82,39	126,37	66	124,84		
T2	Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	66,50	70,20	105,57	66,75	105,17		
	S2.1	Meningkatnya Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas	Indeks Pendidikan	Indeks	62,25	69	110,85	62,50	110,40		
	S2.2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	Indeks	74,75	72,40	96,86	75,25	96,22		
T3	Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengamalkan Agama		Rata-Rata Capaian Angka Melek Kitab Suci dan Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	73,5	75,29	102,44	75,7	99,46		
	S3.1	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Dalam Mempelajari Kitab Suci	Angka Melek Aksara Kitab Suci	%	71	75,9	101,54	73	103,98		



UJUAN / SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	2025			KONDISI AKHIR RPJMD		STATUS KINERJA 2025	KONTRI-BUSI
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN (%)		
	S3.2	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Untuk Memakmurkan Rumah Ibadah	Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan	%	76	74,68	98,27	78	95,75		
T4		Meningkatkan Pemerataan Ekonomi	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,20	3,62	69,62	5,25	68,96		
	S4.1	Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan	Pertumbuhan PDRB Sektor Unggulan	%	5,2	4,85	98,18	5,3	91,51		
	S4.2	Meningkatnya Nilai Investasi Sektor Unggulan	Nilai Investasi Sektor Unggulan	Milyar Rupiah	350	243,921	69,70	400	60,98		
T5		Menurunkan Tingkat Kemiskinan	Angka Kemiskinan	%	19,95	23,15	86,18	18,9	81,65		
	S5.1	Meningkatnya Daya Konsumsi Masyarakat	Pengeluaran Perkapita	Ribu Rupiah	8,27	16,46	199	8.390	184,33		
	S5.2	Meningkatnya Penanganan Terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase PPKS Yang Tertangani	%	87,5	93,56	106,93	90	103,96		
	S5.3	Menurunnya Tingkat Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6	4,51	133,04	5,7	126,39		
T6		Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemajuan Kebudayaan Melayu	Indeks Kerukunan Umat Beragama	%	71,80	87,33	121,63	71,85	121,55		
	S6.1	Meningkatnya Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks Toleransi Antar Umat Beragama	Indeks	73,10	87,50	119,70	73,4	119,21		
			Indeks Ketentraman Ketertiban	Indeks	84	120	142,88	85	141,18		



UJUAN / SASARAN			INDIKATOR	SATUAN	2025			KONDISI AKHIR RPJMD		STATUS KINERJA 2025	KONTRI-BUSI
					TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	TARGET	CAPAIAN (%)		
S6.2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat		Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	84	120	142,88	85	141,18		
			PERSENTASE PEMAJUAN KEBUDAYAAN MELAYU	%	11	54	490,91	13	415,39		
S6.3	Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Yang Dikelola Dan Dikembangkan		Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan	%	20	54	270	25	216		
T7	Mewujudkan Reformasi Birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	63	57,14	90,70	68	84,03		
S7.1	Meningkatnya Kualitas Manajemen Pemerintahan		Nilai AKIP	Nilai	A	B	66,67	A	66,67		
			Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai	82	69,795	85,13	83	84,49		
			Indeks Persepsi Anti Korupsi	Level	3,88	4,40	113,41	3,9	112,82		
S7.2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,25	3,08	98,72	3,5	88		
			Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,5	3,13	89,43	3,7	84,60		
Rata-Rata Capaian Indikator Tujuan 142,09%											
Rata-Rata Capaian Indikator Sasaran 117,22											

Keterangan : Realisasi sudah melewati target akhir periode RPJMD (2026)

3.4.1. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Secara Merata dan Berkelanjutan

3.4.1.1. Indeks Pembangunan Infrastruktur

Realisasi indeks pembangunan infrastruktur pada tahun 2025 sebesar 70,27 dengan capaian sebesar 106,07% dan 100,05% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Capaian indikator ini belum mencapai target akhir periode RPJMD. Kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap pencapaian indikator tujuan ini disajikan pada Tabel 3.43 yaitu indikator Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar sebesar 104% dan indikator Tingkat Konektivitas Antar Pulau sebesar 100%. Artinya, indikator Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Dasar memberikan pengaruh yang lebih besar terhadap terwujudnya tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan dibanding indikator Tingkat Konektivitas Antar Pulau.

Dengan memperhatikan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti yang berbentuk kepulauan, maka tingkat konektivitas antar pulau menjadi faktor penentu utama yang mempengaruhi indeks kemahalan konstruksi di wilayah ini. Pada tahun 2024, BPS Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat indeks kemahalan konstruksi sebesar 103 dan yang tertinggi di Provinsi Riau. Dengan demikian percepatan pencapaian kinerja akan menjamin terwujudnya indikator tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. Tingginya tingkat kemahalan konstruksi di Kabupaten Kepulauan Meranti sangat berpengaruh terhadap pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan, jembatan, pelabuhan, irigasi, perumahan dan permukiman.

Beberapa permasalahan utama yang dipaparkan diatas menjadi faktor penghambat dalam kinerja indikator tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur secara merata dan berkelanjutan. Terhadap permasalahan-permasalahan tersebut, terdapat beberapa strategi yang diberikan sebagai rekomendasi, yaitu:

1. Meningkatkan Kemantapan dan Ketersambungan Jaringan Jalan dan Jembatan antar Wilayah Dalam Kabupaten;
2. Membangun dan Memelihara Infrastruktur Pengendali Banjir;
3. Membangun dan Mengembangkan Sistem Jaringan Irigasi dan Jaringan Pengairan Lainnya;
4. Membangun dan Mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Melakukan penataan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman serta kawasan permukiman kumuh; dan
6. Membangun dan menyediakan infrastruktur, sarana dan prasarana pelabuhan.

3.4.1.2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Realisasi indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2025 sebesar 71,71 dengan capaian sebesar 104,84% dan 104,39% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Capaian indikator ini telah melebihi target akhir periode RPJMD, artinya penetapan target indeks

kualitas lingkungan hidup terlalu rendah. Untuk itu perlu dilakukan reviu terhadap penetapan target dengan memperhatikan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2024.

Salah satu indikator tujuan untuk mengukur tingkat pemerataan pembangunan infrastruktur adalah indeks kualitas lingkungan yang ditentukan oleh tiga indikator sasaran. Kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap pencapaian indikator tujuan ini disajikan pada Tabel 3.42 yaitu indeks kualitas air (111%), indeks kualitas udara (83%) dan indeks kualitas lahan (126,37%).

Permasalahan utama atas rendahnya kontribusi indeks kualitas air adalah masih rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat serta pelaku usaha terhadap pengelolaan limbah rumah tangga dan industri. Hal ini ditunjukkan oleh kualitas air di perairan umum Kabupaten Kepulauan Meranti tergolong tercemar ringan. Strategi yang diberikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan indeks kualitas air diantaranya:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan pengelolaan Sumber Daya Alam yang berpotensi merusak kualitas air;
2. Meningkatkan manajemen, sarana dan prasarana pengelolaan persampahan.

3.4.2. Meningkatkan Kuantitas Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas

3.4.2.1. Indeks Pembangunan Manusia

Pada tahun 2025 BPS Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 70,20. Dengan demikian dari target yang ditetapkan sebesar 68,40 maka capaian kinerja indikator Indeks Pembangunan Manusia sebesar 105,57% dan 105,17% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Walaupun kinerja indikator tujuan ini tergolong sangat tinggi namun Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kepulauan Meranti masih yang terendah di Provinsi Riau dan berada dibawah rata-rata IPM Provinsi Riau, yaitu 76,31.

Tujuan meningkatkan kuantitas sumber daya manusia yang berkualitas didukung oleh dua indikator sasaran, yaitu indeks pendidikan dan indeks kesehatan yang didapat dari hasil analisis faktor determinan penyusun IPM, yaitu Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) untuk dimensi pendidikan serta Angka Harapan Hidup (AHH) untuk dimensi kesehatan. Kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap pencapaian indikator tujuan ini disajikan pada Tabel 3.42 yaitu indeks pendidikan (110,85%) dan indeks kesehatan (96,86%).

Capaian indikator indeks pembangunan manusia pada tahun 2025 telah target akhir periode RPJMD tahun 2026 sebesar 105,17%. Terhadap hal tersebut terdapat beberapa strategi yang direkomendasikan untuk meningkatkan IPM, yaitu:

1. Menyediakan fasilitas dan bantuan pendidikan dan kesehatan secara merata;
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan layanan pendidikan dan kesehatan;

3. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan serta tenaga kesehatan secara merata;
4. Memperluas cakupan layanan jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat; dan
5. Mengedukasi dan memberdayakan masyarakat tentang Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

3.3.3. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Dalam Mengamalkan Agama

3.3.3.1. Rata-Rata Capaian Angka Melek Kitab Suci dan Persentase Rumah Ibadah Yang Aktif Dimanfaatkan

Realisasi indikator rata-rata capaian angka melek kitab suci dan persentase rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan pada tahun 2025 sebesar 75,29 dengan capaian sebesar 102,44% dan 99,46% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Capaian indikator ini telah melebihi target akhir periode RPJMD, artinya penetapan target indeks kualitas lingkungan hidup relatif rendah. Untuk itu perlu dilakukan revaluasi dan penyesuaian terhadap penetapan target dengan memperhatikan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025.

Tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan agama dibentuk oleh dua indikator sasaran, yaitu angka melek aksara kitab suci dan persentase rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan. Kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap pencapaian indikator tujuan ini disajikan pada Tabel 3.42 yaitu indeks angka melek aksara kitab suci sebesar 118,08% dan persentase rumah ibadah yang aktif dimanfaatkan sebesar 96,86%. Kedua indikator tersebut masih bersifat *output* dan belum dapat menunjukkan hubungan yang signifikan terhadap indikator tujuan. Artinya, masih dapat dirumuskan kembali indikator baru sebagai faktor penentu terhadap pencapaian tujuan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengamalkan agama. Strategi yang diberikan sebagai rekomendasi untuk meningkatkan pencapaian indikator tujuan ini adalah diantaranya:

1. Meningkatkan pembinaan dan bantuan pendidikan dan pemahaman kitab suci; dan
2. Meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pemanfaatan rumah ibadah secara optimal.

3.3.4. Meningkatkan Pemerataan Ekonomi

3.3.4.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2025 BPS Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3,62. Dengan demikian dari target yang ditetapkan sebesar 5,20 maka capaian kinerja indikator tujuan Laju Pertumbuhan Ekonomi sebesar 69,62% dan 68,96% terhadap target akhir periode tahun RPJMD.

Tujuan meningkatkan pemerataan ekonomi didukung oleh dua indikator sasaran, yaitu pertumbuhan PDRB sektor unggulan dan nilai investasi sektor unggulan. Kontribusi masing-masing indikator sasaran terhadap pencapaian indikator tujuan ini disajikan pada Tabel 3.43

yaitu pertumbuhan PDRB sektor unggulan sebesar 98,18% dan kontribusi terbesar dari nilai investasi sektor unggulan sebesar 69,70%.

Pada tahun 2025 terjadi pertumbuhan investasi yang signifikan seperti yang terlihat pada Tabel 3.43. Hal ini yang mendorong tingginya capaian indikator laju pertumbuhan ekonomi. Faktor utama yang menyebabkan tingginya pertumbuhan nilai investasi di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah adanya perbaikan data perusahaan wajib lapor kegiatan penanaman modal atau LKPM. Sementara itu, pertumbuhan PDRB sektor unggulan tidak berkontribusi signifikan terhadap pencapaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tabel 3.44 Realisasi dan Capaian Nilai Investasi Tahun 2019 - 2023 di Kabupaten Kepulauan Meranti

Tahun	Target (Milyar Rp)	Realisasi (Milyar Rp)	Capaian (%)
2021	10	30,96	309,6
2022	200	217,98	109,0
2023	250	117,73	47,10
2024	300	156,346	52,12
2025	350	243,921	69,70

Permasalahan utama belum tumbuhnya kedua sektor unggulan tersebut karena belum optimalnya pengelolaan industri komoditas unggulan, baik industri hulu maupun hilir, di Kabupaten Kepulauan Meranti. Dari permasalahan pokok tersebut terdapat beberapa strategi yang direkomendasikan, yaitu:

1. Meningkatkan keahlian dan kemampuan produksi pelaku usaha sektor unggulan;
2. Menyediakan dan mengembangkan sarana dan prasarana produksi dan pengolahan hasil sektor unggulan; dan
3. Melakukan penguatan kelembagaan dan pengelolaan serta pemasaran hasil sektor unggulan.

3.3.5. Menurunkan Tingkat Kemiskinan

3.3.5.1. Angka Kemiskinan

Realisasi angka kemiskinan pada tahun 2025 sebesar 23,15 dengan capaian sebesar 86,18% dan 81,65% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Untuk terwujudnya target indikator angka kemiskinan didukung oleh tiga indikator sasaran, dengan kontribusi terhadap pencapaian kinerja indikator tujuan yaitu sebagai berikut, indikator sasaran pengeluaran per kapita sebesar 199%, persentase PPKS yang tertangani sebesar 106,93% dan yang terbesar kontribusinya yaitu indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka yaitu 133,04%.

Besarnya kontribusi indikator sasaran tingkat pengangguran terbuka terhadap capaian kinerja indikator tujuan angka kemiskinan disebabkan capaiannya sebesar 115,88. Secara faktual upaya penurunan tingkat pengangguran terbuka adalah salah satu strategi percepatan pengentasan kemiskinan. Namun demikian, realisasi tingkat pengangguran terbuka telah melebihi target akhir periode RPJMD, hal ini disebabkan penetapan target dari awal tahun perencanaan RPJMD telah menetapkan target yang lebih rendah dari tingkat pengangguran terbuka yang dilaporkan oleh BPS Kabupaten Kepulauan Meranti. Oleh karena itu patut dilakukan revaluasi terhadap penetapan target tingkat pengangguran terbuka dengan memperhatikan kecenderungan laju penurunannya seperti yang diperlihatkan pada Gambar 3.9 di bawah berikut:

Tahun Year	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan) Poverty Line (rupiah/capita/month)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu) Number of Poor People (thousand)	Persentase Penduduk Miskin Percentage of Poor People
(1)	(2)	(3)	(4)
2017	445.025	53,05	30,89
2018	462.535	51,17	28,99
2019	483.377	49,89	27,79
2020	520.955	47,10	26,93
2021	542.599	48,50	25,28
2022	568.639	45,25	25,68
2023	623.576	43,82	23,84
2024	661.863	44,34	22,98
2025	673.296	39,41	23,15

Gambar 3.10 Angka Kemiskinan Kabupaten Kepulauan Meranti

Permasalahan utama atas masih tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti adalah karena belum efektifnya program percepatan pengentasan kemiskinan. Penyebab utamanya adalah kelompok penerima manfaat program percepatan pengentasan yang belum sepenuhnya tepat sasaran, rendahnya sumberdaya manusia yang terlihat dari nilai IPM dan kondisi geografi Kabupaten Kepulauan Meranti. Kondisi wilayah ini yang berpulau-pulau menjadi penyebab tingginya tingkat kemahalan konstruksi 103 atau yang tertinggi di Provinsi Riau menurut data BPS (2025). Strategi yang diberikan sebagai rekomendasi untuk menurunkan angka kemiskinan, yaitu :

1. Melakukan perbaikan data secara terus-menerus terhadap penerima manfaat program percepatan pengentasan kemiskinan yang tertuang dalam DTKS;
2. Menjaga kesabilan harga bahan pokok dan harga bahan material konstruksi;
3. Meningkatkan kapasitas pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja;
4. Meningkatkan ketersediaan kesempatan kerja dan serapan tenaga kerja;
5. Meningkatkan cakupan lapangan pekerjaan dan lapangan usaha masyarakat;

- 6. Peningkatan peran aktif PPKS dengan fokus peningkatan *capacity building*; dan
- 7. Memberdayakan, Merehabilitasi, Memberikan Perlindungan dan Jaminan Sosial kepada PPKS.

3.3.6. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kerukunan Umat Beragama, Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemajuan Kebudayaan Melayu

3.3.6.1. Indeks Kerukunan Umat Beragama

Pada tahun 2025, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat nilai Indeks Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Kepulaun Meranti adalah 87,33. Dengan demikian dari target yang ditetapkan sebesar 71,80 maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 121,63% dan 121,55% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Capaian indikator ini telah melebihi target akhir periode RPJMD, artinya penetapan target indeks kerukunan umat beragama relatif rendah dari kondisi faktual beberapa tahun sebelumnya seperti terlihat pada Tabel 3.45 Untuk itu perlu dilakukan reviu dan penyesuaian terhadap penetapan target dengan memperhatikan realisasi kinerja yang diperoleh pada tahun 2025.

Tabel 3.45 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Kerukunan Umat Beragama

Tahun	2021	2022	2023	2024	2025
Target	65,00	71,65	71,70	71,75	71,80
Realisasi	72,80	74,23	76,1	79,4	87,33
Capaian	112,00	103,60	106,14	110,67	121,63

Walaupun indikator indeks kerukunan umat beragama telah terpenuhi, tetap akan dilakukan upaya untuk terus menjaga tingkat kerukunan umat beragama di Kabupaten Kepulauan Meranti. Terhadap hal tersebut terdapat beberapa strategi yang direkomendasikan, yaitu:

1. Menyusun dan melaksanakan perencanaan pembangunan yang inklusif dengan melibatkan seluruh kelompok masyarakat;
2. Meningkatkan edukasi dan persuasi untuk pencegahan konflik antar agama; dan
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar instansi dan elemen masyarakat dalam menciptakan toleransi antar umat beragama.

3.3.6.2. Indeks Ketentraman Ketertiban

Realisasi indeks ketentraman ketertiban pada tahun 2025 sebesar 120% dengan capaian sebesar 142,88% dan 141,18% terhadap target akhir periode tahun RPJMD. Untuk mewujudkan indeks ketentraman dan ketertiban didukung oleh dua indikator sasaran dengan kontribusi terhadap capaian indikator tujuan, adalah indikator Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan).

Capaian indikator ini belum melebihi target akhir periode RPJMD, oleh karena itu beberapa strategi yang diberikan sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi potensi serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum; dan
2. Meningkatkan upaya mitigasi potensi dan menyiapkan sistem penanggulangan bencana dan kebakaran.

3.3.6.3. Persentase Pemajuan Kebudayaan Melayu

Realisasi Indikator Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Yang Dikelola Dan Dikembangkan sebesar 54% dengan capaian sebesar 490,91%. Ini menunjukkan bahwa capaian dari indikator tujuan ini telah mencapai target yang ditetapkan.

Capaian indikator ini telah melebihi target akhir periode RPJMD, namun sudah mencapai sebesar 415,39% dari target akhir periode RPJMD. oleh karena itu beberapa strategi yang diberikan sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bersifat kebudayaan melayu, baik kegiatan formal maupun informal, dan lebih dikhususkan kepada kalangan muda, sehingga estafet kebudayaan melayu tidak hilang, dan dapat meningkatkan pemajuan kebudayaan Melayu.
2. Memberikan sosialisasi maupun pendidikan baik secara formal maupun informal mengenai Kebudayaan Melayu Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga keilmuan serta pengetahuan kebudayaan Melayu tidak hilang.
3. Perlu adanya tenaga ahli Arkiologi dan Artopologi sebagai upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda

3.3.7. Mewujudkan Reformasi Birokrasi

3.3.7.1. Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi Birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik integratif, bebas dan bersih dari praktik KKN, mampu melayani publik, menjunjung tinggi nilai netralitas, dan berdedikasi tinggi

Pada tahun 2025, telah dilakukan evaluasi terhadap Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dimana terdapat perubahan evaluasi Reformasi Birokrasi yang sebelumnya evaluasi Reformasi Birokrasi General, pada tahun 2023 berubah menjadi Evaluasi Reformasi Birokrasi General dan Tematik. Pada evaluasi Reformasi Birokrasi Tematik, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menetapkan seluruh isu Tematik pada Reformasi Birokrasi sebagai Sub Komponen Tematik.

Dari hasil penilaian tersebut, didapatkan realisasi Indeks Reformasi Birokrasi yaitu 90,70, dimana target yang ditetapkan pada tahun 2025 adalah 63, sehingga capaian kinerja adalah sebesar 90,70.

Tabel 3.46 Target, Realisasi dan Capaian Indikator Indeks Reformasi Birokrasi

Capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Tahun			
2022	2023	2024	2025
50,63	53,71	58,87	57,14

Dari tabel 3.46 diatas, dapat dilihat bahwa dalam 3 tahun terakhir terjadi peningkatan pada capaian Indeks Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada tahun 2024 terjadi peningkatan capaian sebesar 5,16%, namun pada Tahun 2025 terjadi penurunan capaian sebesar 1,73%. Peningkatan capaian tersebut masih tergolong rendah dan perlu untuk diperhatikan pelaksanaan kinerjanya di tahun berikutnya.

Capaian indikator ini belum melebihi target akhir periode RPJMD, oleh karena itu beberapa strategi yang diberikan sebagai rekomendasi yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas, efektifitas dan efisiensi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) dengan melakukan penetapan rencana aksi tindak lanjut terhadap rekomendasi hasil evaluasi Reformasi Birokrasi, baik secara internal dari Inspektorat Daerah, maupun dari Kementerian PANRB;
2. Meningkatkan transparansi, keselarasan, kesesuaian pengalokasian dan penyerapan anggaran dalam pengelolaan keuangan daerah;
3. Meningkatkan cakupan penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
4. Meningkatkan sarana, mutu, kemudahan dan kepastian pelayanan publik;
5. Menigtkkan kualitas dan implementasi pengentasan kemiskinan, baik dari perencanaan pada *Logframe* hingga pada pelaksanaannya.
6. Menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan, sehingga temuan permasalahan pada kinerja dapat dijawab serta diselesaikan, yang akan meningkatkan capaian secara signifikan.

BAB IV

PENUTUP

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti telah berusaha melaksanakan akuntabilitas kinerja sebagaimana yang diatur dalam dokumen perencanaan daerah. Segala upaya yang telah dilakukan tidak terlepas dari keinginan pemerintah untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh komponen masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Meranti.

Namun tentunya masih perlu dilakukan usaha yang lebih baik lagi untuk meningkatkan Akuntabilitas Kinerja, mulai dari perbaikan perencanaan, pematangan pengukuran, perbaikan pelaporan dan pelaksanaan tindak lanjut dari evaluasi.

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang disampaikan pada bab akuntabilitas kinerja maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti atas penggunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara serta sumber dana lainnya dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Daerah
2. Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 menjelaskan analisis dan evaluasi pencapaian target 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama.
3. Rata-rata capaian 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama adalah sebesar 117,22%. Artinya secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2024 termasuk kategori keberhasilan Sangat Tinggi.
4. Kategori penilaian keberhasilan 22 (Dua Puluh Dua) Indikator Kinerja Utama berdasarkan skala nilai peringkat kinerja pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 adalah sebagai berikut:
 - a. Capaian indikator kinerja utama yang berhasil dengan kategori sangat tinggi ($91,00\% \leq 100,00\%$) sebanyak 13 (Tiga Belas) indikator kinerja utama;
 - b. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori tinggi ($76,00\% \leq 90,00\%$) sebanyak 7 (Tujuh) indikator kinerja utama;
 - c. Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori sedang ($66,00\% \leq 75,99\%$) sebanyak 2 (Dua) indikator kinerja utama;
 - d. Tidak terdapat Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori rendah ($51,00\% \leq 65,99\%$);
 - e. Tidak terdapat Capaian indikator kinerja yang berhasil dengan kategori sangat rendah ($00,00\% \leq 50,00\%$);



5. Anggaran yang disediakan dalam rangka pencapaian 22 (Dua Puluh Dua) sasaran tersebut adalah sebesar Rp. 945.120.077.469,- atau 77,53% dari total belanja langsung anggaran belanja APBD Tahun 2025.

4.2. Saran

Untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kedepannya, secara umum terdapat beberapa rekomendasi yang harus dilaksanakan, antara lain :

1. Melakukan evaluasi terhadap perencanaan kinerja, baik ditingkat Perangkat Daerah maupun ditingkat Kabupaten, serta menyelaraskan perencanaan pada seluruh Perangkat Daerah dan Kabupaten, sehingga perencanaan yang disusun akan selaras serta menjadi perencanaan yang smart;
2. Melaksanakan pengukuran kinerja dengan memperhatikan kondisi Perangkat Daerah maupun dilapangan, serta cara pencapaian dari indikator yang telah ditetapkan, sehingga perencanaan dan pengukuran kinerja yang ditetapkan dapat dilaksanakan dengan baik, dan kinerja yang dilaksanakan menjadi lebih terarah serta dapat diukur (*measurable*);
3. Menyusun pelaporan kinerja dengan bukti dukung (*eviden*) yang memadai dan tepat sasaran, serta memberikan analisis capaian kinerja beserta faktor pendukung, faktor penghambat dan rekomendasi kinerja, sehingga pelaporan kinerja yang disajikan akan berorientasi *outcome*, serta menjadi bahan acuan untuk kinerja berikutnya;
4. Menindaklanjuti segala rekomendasi yang telah diberikan dalam Laporan Hasil evaluasi (LHE), baik yang diberikan oleh Inspektorat Daerah kepada seluruh Perangkat Daerah, maupun rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, sehingga akan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara signifikan;
5. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap capaian Program dan Kegiatan, serta Realisasi Fisik dan Keuangan secara berkala untuk dapat mengetahui program maupun keuangan yang menjadi pendukung utama maupun penghambat utama kinerja, sehingga hal tersebut akan menjadi rekomendasi perbaikan kinerja, serta menjadi prioritas dalam peningkatan kinerja;
6. Meningkatkan komitmen pejabat pimpinan tinggi sampai keseluruhan aparatur sipil Negara (ASN) untuk mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan melaksanakan implementasi SAKIP secara keseluruhan dengan kerja secara tim, sehingga implementasi SAKIP akan menjadi lebih baik;
7. Melakukan pendampingan dengan tenaga ahli yang berkompeten, sehingga akan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai SAKIP, dan akan meningkatkan kualitas implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Lampiran





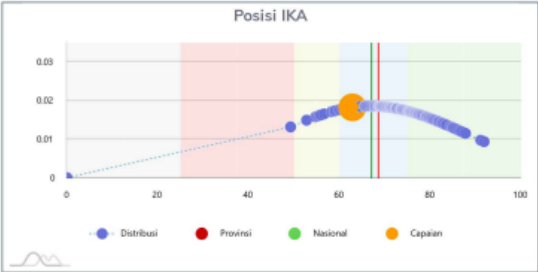
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Provinsi Riau
2025



IKA
62.83
SEDANG

Indeks Respon IKA
0.00

Peringkat
Nasional : 398 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 10 dari 12 Kabupaten/Kota



Data Pemantauan			
	Titik Pantau	Data Masuk	Data Terverifikasi
PUSAT	0	0	0
P3E	0	0	0
PROVINSI	4	0	0
KAB/KOTA	6	12	7
TOTAL	10	12	7





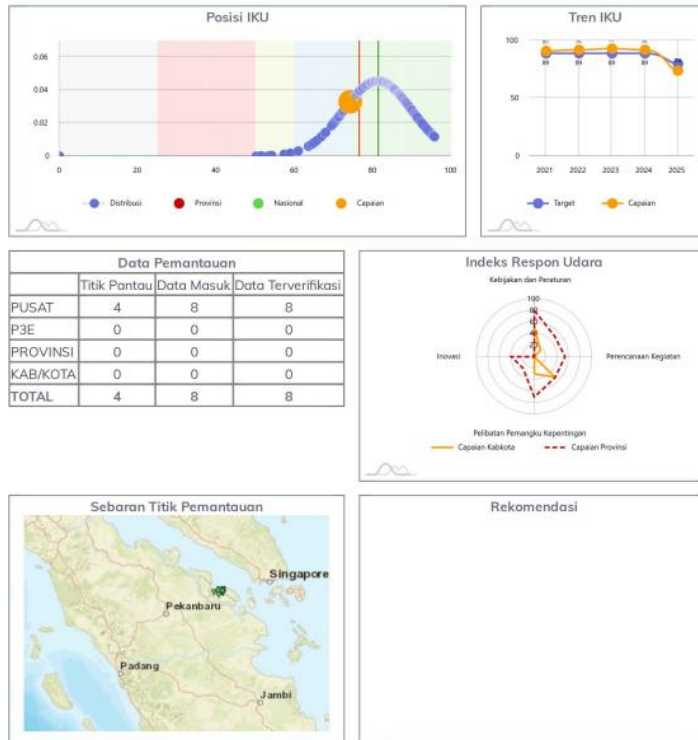
PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Provinsi Riau
2025



IKU
74.19
SEDANG

Indeks Respon IKU
10.95

Peringkat
Nasional : 401 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 10 dari 12 Kabupaten/Kota



PROFIL INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP
Kabupaten Kepulauan
Meranti
Provinsi Riau
2025



IKL
82.39
SEDANG

Indeks Respon IKL
0.00

Peringkat
Nasional : 91 dari 514 Kabupaten/Kota
Provinsi : 1 dari 12 Kabupaten/Kota



**ANGKA MELEK AKSARA KITAB SUCI
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025**

No.	Nama Sekolah / Madrasah:	Kecamatan:	Desa/Kelurahan:	Jumlah Guru Agama:	Jumlah Seluruh Siswa (Usia 7- 15 Tahun):	Jumlah Siswa yang Bisa Membaca Kitab Suci:
1	MTsN 1 Kepulauan Meranti	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	14 orang	718	718
2	MI AL-KHAIRIYAH SIDOMULYO	Rangsang Barat	SUNGAICINA	5 ORANG	206	206
3	Mts alhuda	Rangsang Barat	Bokor	5	33	27
4	MIS RAUDHATUL HIDAYAH	Tebing Tinggi Barat	BATANG MALAS	9	20	13
5	MI Raudhatut Thalibin	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	3	33	33
6	MTs Raudhatut Thalibin	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	5 Orang	138	135
7	MIS Al Islam Muhammadiyah Kedaburapat	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	5	43	25
8	Mtss Tarbiyatul Hasanah	Pulau Merbau	Desa padang Kamal	10	60	55
9	MTs Darussalam lalang tanjung	Tebing Tinggi Barat	Tanjung	3 orang	48	45
10	MA. Mu'llimin Selatpanjang	Tebing Tinggi	Selatpanjang Selatan	1	10	10
11	MTsN 2 Kepulauan Meranti	Rangsang Barat	Sungai Cina	8	344	344
12	MA Raudhatul hidayah	Rangsang	Tanjungsamak	3 orang	8	7
13	MTs Raudhatul Mubtadiin	Tebing Tinggi Barat	Kundur	2	85	4
14	MTSS. Raudhatul Hidayah	Rangsang	Tanjungsamak	5 orang	13	11
15	Mts Raudhatul Hidayah	Tebing Tinggi Barat	Batang Malas	3	33	33

16	MTs.S Al-Falah Dedap	Tasik Putri Puyu	Dedap	5	78	70
17	MA Hidayatul Mubtadiin Semukut	Pulau Merbau	Desa Semukut	5	53	53
18	MAN 2 KEPUALAUAN MERANTI	Rangsang Barat	Sungai cina	4	484	484
19	MTs. Nurul Huda	Tebing Tinggi Barat	Gogok Darussalam	3sit	171	171
20	MTsS Darul Ihsan Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	4 orang	70	5
21	MA Raudhatul Mubtadiin	Tebing Tinggi Barat	Kundur.	4 Orang/guru	4	4
22	Mts Al hidayah	Merbau	Lukit	5	28	28
23	MTs Darul Hasanah Lukun	Tebing Tinggi Timur	Desa Lukun	5	55	55
24	Mtss Miftahul mubtadiin	Rangsang	Tanjung Samak	Lima orang	94	85
25	Mtss Darun Naim Pentagun	Rangsang	penyagun	7 orang	74	68
26	MTs Islamiyah	Rangsang Barat	Segomeng	4	104	100
27	MTs. Al - Huda Centai	Pulau Merbau	Centai	4	45	45
28	MTsS Darul ulum tanjung gadai	Tebing Tinggi Timur	Tanjung gadai	3	51	48
29	MI. Tarbiyatul Hasanah	Pulau Merbau	Padang Kamal	4 orang	62	28
30	MTS AL-MUKARROMAH	Merbau	SUNGAI ANAK KAMAL	4	67	67
31	MIS RAUDHATUL MUBTADIIN	Tebing Tinggi Barat	KUNDUR	4	104	80
32	Mts.Darussalam	Rangsang Barat	Anak Setatah	4	43	40
33	MTs Al-Muttahidah Melai	Rangsang Barat	Melai	5	53	53

34	SD NEGERI 11 TENAN	Tebing Tinggi Barat	Tenan	Q	65	50
35	SDN 2 TanjungSamak	Rangsang	TanjungSamak	1	133	100
36	SDN 15 Sungai Gayung Kiri Kecamatan Rangsang	Rangsang	Sungai gayung kiri	1	187	38
37	Smpn 6 rangsang	Rangsang	Topang	1	63	54
38	SD NEGERI 18 SEMULUT	Tebing Tinggi	BANGLAS BARAT	1 ORANG	72	40
39	SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI	Rangsang	SUNGAI GAYUNG KIRI	1	187	38
40	SMP negeri 1 Rangsang	Rangsang	Tanjungsamak	1	265	263
41	SD Negeri 10 Tanjung Medang	Rangsang	Tanjung Medang	-	60	50
42	SD NEGERI 13 TOPANG	Rangsang	TOPANG	1	78	78
43	SD. NEGERI 13 TELUK KETAPANG	Pulau Merbau	TELUK KETAPANG	1	104	96
44	SDN 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	INSIT	2	142	120
45	SD Negeri 8 Bantar	Rangsang Barat	Bantar	2	126	115
46	SDN 9 Selatpanjang Timur	Tebing Tinggi	Selatpanjang timur	2 org	240	150
47	SD NEGERI 6 SELAT PANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELAT PANJANG SELATAN	2	55	7
48	SDN 15 TANJUNG BUNGa	Pulau Merbau	TANJUNG BUNGA	DUA ORANG	102	70
49	SMP Negeri 2 Tebing Tinggi Barat	Tebing Tinggi Barat	Tanjung Peranap	1	79	79
50	SD Negeri 8 Selatpanjang selatan	Tebing Tinggi	Selatpanjang selatan	1	73	35
51	SD NEGERI 15 SUNGAI GAYUNG KIRI	Rangsang	SUNGAI GAYUNG KIRI	1	187	38
52	SDN 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	Desa alai	2 orang	139	139
53	SD NEGERI 1 INSIT	Tebing Tinggi Barat	INSIT	2	139	139
54	SD Negeri 4 Mekar Delima	Tasik Putri Puyu	Mekar Delima	0	23	5
55	SD NEGERI 11 SENDANU DARUL IHSAN	Tebing Tinggi Timur	SENDANU DARUL IHSAN	1	50	40
56	SMP Negeri 2 Rangsang Pesisir	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	1	115	95
57	SD Negeri 7 Beting	Rangsang Pesisir	Beting	1	157	40
58	SD Negeri 12 Topang	Rangsang	Topang	1	80	70
59	SdN 1 Tanjungsamak	Rangsang	TANJUNGSAMAK	1	178	112
60	SMP NEGERI 5 TEBING TINGGI TIMUR	Tebing Tinggi Timur	LUKUN	1	54	54

61	SD NEGERI 3 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	173	113
62	SD Negeri 1 Tanjungsamak	Rangsang	Tanjungsamak	1 orang	178	112
63	SMPN 4 Rangsang	Rangsang	Tanjung medang	1 orang	25	23
64	SD NEGERI 10 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	2	268	154
65	SDN 15 Sungai Gayung Kiri	Rangsang	Sungai Gayung Kiri	Satu	187	38
66	SDN 13 Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	1	130	65
67	SDN 4 DWITUNGGAL	Rangsang	Dwitunggal	1	150	46
68	SMP Negeri 3 Rangsang	Rangsang	Tanjungbakau	1	158	158
69	SDN 2 Mayang Sari	Merbau	Mayang Sari	1	99	50
70	SD NEGERI 6 LUKUN	Tebing Tinggi Timur	Lukun	1 orang	170	144
71	SDN 3 BATANG MALAS	Tebing Tinggi Barat	BATANG MALAS	1	17	17
72	MTsS Al- Hikmah Selatpanjang	Tebing Tinggi	Desa Banglas	5	68	67
73	SD Negeri 7 Mantiasa	Tebing Tinggi Barat	Mantiasa	1	108	108
74	SD Negeri 1 Bantar	Rangsang Barat	Bantar	1	74	74
75	SD NEGERI 17 KUNDUR	Tebing Tinggi Barat	KUNDUR	1	67	63
76	SMP Negeri 3 Tasik Putri Puyu	Tasik Putri Puyu	Mengkopot	1	123	30
77	SMP Negeri 3 Rangsang Barat	Rangsang Barat	Mekarbaru	1	66	20
78	SD Negeri 10 Tanjung Kedabu	Rangsang Pesisir	Tanjung Kedabu	2	156	156
79	SD Negeri 6 Renak Dungun	Pulau Merbau	Renak Dungun	1	92	70
80	SD negeri 8 Wonosari	Rangsang	Wonosari	1	81	81
81	SD Negeri 22 Alah Air	Tebing Tinggi	Alah Air	2	260	260
82	SD Negeri 17 Penyagun	Rangsang	Penyagun	1	86	76
83	SDN 5 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	Selatpanjang selatan	2	67	30
84	SD NEGERI 11 BOKOR	Rangsang Barat	Bokor	1	123	83
85	SDN 18 telaga baru	Rangsang Barat	Telaga baru	1	101	68
86	SD NEGERI 18 PENYAGUN	Rangsang	Penyagun	1	53	53
87	SDN 15 Tanjung padang	Tasik Putri Puyu	Tanjung padang	1	63	45
88	SD NEGERI 6 TANJUNG KULIM	Merbau	Desa Tanjung Kulim	1	66	66

89	SD Negeri 19 Batang Meranti	Pulau Merbau	Batang Meranti	1	24	19
90	SMP NEGERI 3 RANGSANG PESISIR	Rangsang Pesisir	TANJUNG KEDABU	1	83	83
91	SDN 20 Tebun	Rangsang	Tebun	1	125	125
92	SDS Patria Dharma	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	1	1	1
93	SDN 2 Alai	Tebing Tinggi Barat	Alai	1	137	52
94	SMP negeri 1 Rangsang barat	Rangsang Barat	Lemang	1	196	170
95	SMP IT DARUL FIKRI BOARDING SCHOOL	Tebing Tinggi	BANGLAS BARAT	4	223	223
96	SMP NEGERI 4 PULAU MERBAU	Pulau Merbau	BATANG MERANTI	3	52	52
97	SMP NEGERI 5 TASIK PUTRI PUYU	Tasik Putri Puyu	Selat Akar	3 (tiga) orang	109	90
98	SD Negeri 15 Sungai Gayung Kiri	Rangsang	Sungai Gayung Kiri	1	187	38
99	SDN 20 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	105	105
100	SDN 14 Topang	Rangsang	Topang	8	79	9
101	SD NEGERI 4 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELATPANJANG SELATAN	1	107	80
102	SD Negeri 10 MAINI	Tebing Tinggi Barat	MAINI DARUL AMAN	1	110	130
103	SD Negeri 11 Tanjung Medang	Rangsang	Tanjung Medang	0	15	10
104	Sd negeri 2 Tanjung sari	Tebing Tinggi Timur	Tanjungsari	1	109	108
105	SD Negeri 6 Segomeng	Rangsang Barat	Segomeng	1	96	96
106	MTs Al Munawarah	Merbau	Bagan Melibur	5	47	45
107	SDN 15 TANJUNG DARUL TAKZIM	Tebing Tinggi Barat	TANJUNG DARULTAKZIM	1	21	21
108	SD NEGERI 4 TANJUNG GADAI	Tebing Tinggi Timur	TANJUNG GADAI	1	117	30
109	SD NEGERI 12 TANJUNG GADAI	Tebing Tinggi Timur	TANJUNG GADAI	0	113	50
110	SD NEGERI 8 KAYU ARA	Rangsang Pesisir	KAYU ARA	1	108	60
111	SD NEGERI 7 SELATPANJANG SELATAN	Tebing Tinggi	SELATPANJANG SELATAN	2	207	95
112	SD NEGERI 1 SONDE	Rangsang Pesisir	SONDE	1	23	12
113	SD NEGERI 7 SEMUKUT	Pulau Merbau	Semukut	2	82	75
114	SD NEGERI 9 TANJUNGGEMUK	Rangsang	TANJUNGGEMUK	0	94	94
115	SD NEGERI 21 SESAP	Tebing Tinggi	SESAP	NURHAMIDI,S.Pd	97	60

116	SMPN 1 TEBING TINGGI BARAT	Tebing Tinggi Barat	ALAI KOTA	2 ORANG	163	153
117	SDN 3 SIALANG PASUNG	Rangsang Barat	SIALANG PASUNG	1 oramg	133	90
118	SD NEGERI 2 CENTAI	Pulau Merbau	CENTAI	1	120	80
119	SMP NEGERI 1 TEBING TINGGI	Tebing Tinggi	KELURAHAN SELATPANJANG BARAT	2 (DUA)	445	389
120	SD NEGERI 16 GEMALASARI	Rangsang	GEMALASARI	-	127	84
121	SDN 1 Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	2	287	150
122	SD NEGERI 15 BANGLAS	Tebing Tinggi	BANGLAS	1	120	67
123	SMP Negeri 4 Tasik Putri Puyu	Tasik Putri Puyu	Putri Puyu	1	104	85
124	SD Negeri 12 Lukit	Merbau	Lukit	1	136	136
125	SD NEGERI 14 TANAH MERAH	Rangsang Pesisir	Tanah Merah	1	98	98
126	SD NEGERI 15 TELUK BELITUNG	Merbau	Teluk Belitung	1	84	80
127	smp muhammadiyah	Tebing Tinggi	selatpanjang timur	1	45	45
128	SD NEGERI 7 TELUK BELITUNG	Merbau	TELUK BELITUNG	1	117	95
129	SDN 10 BINA MAJU	Rangsang Barat	Desa Bina Maju	1	86	78
130	SDN 3 KETAPANG PERMAI	Pulau Merbau	Ketapang permai	1	88	50
131	SD Negeri 9 Kedaburapat	Rangsang Pesisir	Kedaburapat	1 Orang	154	90
132	SD Negeri 14 Teluk Belitung	Merbau	Teluk Belitung	1	90	49
133	SD Negeri 2 Selatpanjang Kota	Tebing Tinggi	Selatpanjang Kota	3	481	211
134	SDN 12BATANG MERANTI	Pulau Merbau	BATANG MERANTI	1 ORANG	83	75
135	SD Negeri 13 Tanah Merah	Rangsang Pesisir	Tanah Merah	1	170	160
136	SMP Negeri 5 Pulau Merbau	Pulau Merbau	Tanjung Bunga	1 orang	61	28
137	SD Negeri 14 Baran Melintang	Pulau Merbau	Baran Melintang	1 orang	60	60
138	SMP Negeri 4 Merbau	Merbau	Sungai Tengah	1	72	62
139	SD NEGERI 11 SELATPANJANG TIMUR	Tebing Tinggi	SELATPANJANG TIMUR	1	167	120
140	SD NEGERI 19 ALAHAIR TIMUR	Tebing Tinggi	ALAHAIR TIMUR	1	129	128
141	SD Negeri 6 Citra Damai	Rangsang	Citra Damai	1	158	140
142	SD Negeri 4 Bokor	Rangsang Barat	Bokor	1	86	78
143	SD NEGERI 9 MELAI	Rangsang Barat	MELAI	1	109	90

144	SDN 14 ANAK SETATAH	Rangsang Barat	ANAK SETATAH	2	165	155
145	SMPN 3 Merbau	Merbau	Lukit	1	54	45
146	SMP NEGERI 2 RANGSANG BARAT	Rangsang Barat	Bantar	1	118	118
147	SDN 9 Semukut	Pulau Merbau	Semukut	2	121	90
148	SMPN 4	Tebing Tinggi	Banglas barat	2 orang	160	100
149	SD NEGERI 13 LEMANG	Rangsang Barat	LEMANG	1	69	50
150	SMP Negeri 1 Rangsang Pesisir	Rangsang Pesisir	Sonde	1	29	20
JUMLAH					17150	13017
PERSENTASE (%)					75,9	

REKAPITULASI RUMAH IBADAH
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	MASJID	MUSALA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	KAPEL	PURA	VIHARA	KELENTENG	BALAI BASARAH	JUMLAH TOTAL RUMAH IBADAH
1	TEBING TINGGI	10	41	46	6				34			127
2	TEBING TINGGI BARAT	14	31	44	2				3			80
3	TEBING TINGGI TIMUR	10	27	18	4				0			49
4	RANGSANG	16	43	53	1				4			101
5	RANGSANG BARAT	12	37	44	3				2			86
6	RANGSANG PESISIR	11	28	21	0				1			50
7	MERBAU	13	25	37	3				1			66
8	PULAU MERBAU	11	37	36	2				1			76
9	TASIK PUTRI PUYU	11	42	22	4				3	3		74
JUMLAH		108	311	321	25	0	0	0	49	3	0	709

REKAPITULASI RUMAH IBADAH YANG AKTIF DIMANFAATKAN
SE-KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
TAHUN 2025

NO	KECAMATAN	DESA	MASJID	MUSALA	GEREJA KRISTEN	GEREJA KATOLIK	KAPEL	PURA	VIHARA	KELENTENG	BALAI BASARAH	JUMLAH TOTAL RUMAH IBADAH
1	TEBING TINGGI	10	34	40	6				34			114
2	TEBING TINGGI BARAT	14	28	35	2				3			68
3	TEBING TINGGI TIMUR	10	15	14	4				0			33
4	RANGSANG	16	38	51	1				4			94
5	RANGSANG BARAT	12	34	31	3				2			70
6	RANGSANG PESISIR	11	27	20	0				1			48
7	MERBAU	13	17	37	3				1			58
8	PULAU MERBAU	11	25	16	2				1			44
9	TASIK PUTRI PUYU	11	29	22	4				3	3		61
JUMLAH		108	247	266	25	0	0	0	49	3	0	590





No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024 Triwulan III			Tahun 2025 Triwulan IV		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Nilai Investasi	Rupiah	200M	217,98M	108,99	250M	117,73M	47,09	300M	100,077M	33,36	161M	243.921M	151%
Rata – Rata Capaian Kinerja			200M	217,98M	108,99	250M	117,73M	47,09	300M	100,077M	33,36	-	-	-

PPKS Yang Tertangani

No.	PMKS	Tahun 2025							
		TW 1		TW 2		TW3		TW4	
		Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani	Jumlah	Tertangani
1	Anak Balita Terlantar	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Anak Terlantar	1	1	67	67	155	155	158	158
3	Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	17	17	23	23	23	23	23	23
4	Anak Jalanan	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Anak dengan Kedisabilitasan	-	-	5	5	5	5	35	35
6	Anak yang menjadi Korban tindak kekerasan atau di perkukukan salah	7	7	13	13	16	16	23	23
7	Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Lanjut Usia Terlantar	1.078	521	1.078	579	1.078	637	1.078	659
9	Penyandang Disabilitas	1.324	197	1.324	212	1.324	273	1.324	274
10	Tuna Susila	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Gelandangan	-	-	-	-	3	-	3	3
12	Pengemis	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Pemulung	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Kelompok Minoritas	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasyarakatan	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Orang Dengan HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Korban Penyalahgunaan Nafza	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Korban Trafficking	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Korban Tindak Kekerasan	3	3	4	4	8	8	12	12
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Korban Bencana Alam	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Korban Bencana Sosial	8	8	13	13	23	23	30	30
23	Perempuan rawan Sosial Ekonomi	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Fakir Miskin	151.001	141.794	151.001	141.794	167.545	161.254	167.545	159.588
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Komunitas Adat Terpencil	2.933	278	2.937	1.215	2.937	1.215	2.937	1.215
Jumlah		156.462	142.824	156.555	143.025	173.117	163.609	173.166	162.018
Penertase		91,28%		91,93%		94,51%		93,56%	

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana
Kepulauan Kepulauan Meranti


NIP. 19700302 199304 1 001

Nomor : B-2/Kk.04.12/KP.01/01/2026 14 Januari 2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)

Kepada Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
c.q. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
di
Selatpanjang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 400.8.1/KESRA/003 tanggal 06 Januari 2026 perihal Permintaan Data Indeks Kerukunan Umat Beragama, bersama ini kami sampaikan Data Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2025 sebagaimana terlampir.

Data tersebut disusun berdasarkan laporan Penyuluh Agama, koordinasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, rekap kegiatan pembinaan kerukunan umat beragama, serta informasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Kepulauan Meranti.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Kepala,



Sulman



KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

JALAN JENDERAL SUDIRMAN KAV. 69, JAKARTA 12190
TELEPON (021) 7398381 - 7398382, FAXIMILE (021) 7398323, SITUS <http://www.menpan.go.id>

Nomor : B/197/AA.05/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

27 Desember 2025

Yth.
Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
di
Tempat

Dengan hormat kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Pelaksanaan evaluasi tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas *output* maupun *outcome* serta kinerja lainnya pada level instansi pemerintah maupun unit kerja di bawahnya.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 2512260YRU
- Seluruh layanan yang diselenggarakan Kementerian PANRB tidak dikenakan biaya. Jika terdapat indikasi permintaan biaya, agar dilaporkan melalui kanal pengaduan SP4N-LAPOR! di lapor.go.id.



2. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti menunjukkan bahwa nilai sebesar **68,56** dengan predikat **“B”**. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja **“Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagian unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja.**

Secara lengkap rincian hasil evaluasi AKIP Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dapat diakses melalui portal <https://portalrb.menpan.go.id/> dengan menggunakan akun Instansi masing-masing.

Demikian disampaikan laporan hasil evaluasi AKIP sebagai gambaran perkembangan penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti. Kami juga mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :
AGUS UJI HANTARA
Plh. Deputi Bidang Reformasi Birokrasi,
Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan
NIP. 196708051992031001

- Tembusan**
- 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (sebagai laporan);
 - 2. Menteri Dalam Negeri;
 - 3. Gubernur Riau;
 - 4. Bupati Kepulauan Meranti.

No.	Kabupaten	1	2	3	4	5	6	Total	Peringkat	Nilai
43.	SIDOARJO	4,283	19,655	14,224	15	4,299	15	72,461	Perlu Perbaikan	B
44.	PULANG PISAU	11,63	19,138	10,086	15	1,603	15	72,458	Perlu Perbaikan	B
45.	KEPULAUAN SELAYAR	12,075	20	9,052	15	1,193	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
46.	NUNUKAN	11,458	19,655	9,052	15	2,155	15	72,32	Perlu Perbaikan	B
47.	BATANGHARI	6,122	19,483	15	15	1,105	15	71,71	Perlu Perbaikan	B
48.	SUKAMARA	10,389	19,31	9,828	15	2,165	15	71,692	Perlu Perbaikan	B
49.	BEKASI	13,061	15	15	15	3,461	10,005	71,526	Perlu Perbaikan	B
50.	MALAKA	13,544	19,138	2,586	20	0,837	15	71,105	Perlu Perbaikan	B
51.	MURUNG RAYA	8,47	18,621	10,345	15	3,525	15	70,961	Perlu Perbaikan	B
52.	KARIMUN	9,462	19,655	15	10	1,524	15	70,641	Perlu Perbaikan	B
53.	SANGGAU	9,837	14,828	14,483	15	1,43	15	70,577	Perlu Perbaikan	B
54.	BOMBANA	9,348	19,655	15	10	1,28	15	70,283	Perlu Perbaikan	B
55.	KEPULAUAN MERANTI	11,218	18,448	13,966	15	1,158	10,005	69,795	Perlu Perbaikan	B
56.	BARITO UTARA	7,85	20	8,534	15	3,307	15	69,692	Perlu Perbaikan	B
57.	MANGGARAI BARAT	8,61	19,31	10,345	15	1,261	15	69,527	Perlu Perbaikan	B
58.	LAMONGAN	8,333	15	14,483	15	1,513	15	69,329	Perlu Perbaikan	B
59.	KEPULAUAN MENTAWAI	7,784	20	14,741	15	1,477	10,005	69,007	Perlu Perbaikan	B
60.	MALUKU TENGGARA	9,164	19,138	9,31	15	1,261	15	68,873	Perlu Perbaikan	B
61.	HULU SUNGAI TENGAH	7,873	19,655	9,052	15	1,893	15	68,473	Perlu Perbaikan	B
62.	BUTON UTARA	9,129	19,828	8,793	15	0,702	15	68,452	Perlu Perbaikan	B
63.	KUTAI BARAT	10,052	19,655	13,966	5	4,432	15	68,106	Perlu Perbaikan	B
64.	SERUYAN	8,631	19,655	7,759	15	1,796	15	67,84	Perlu Perbaikan	B
65.	BUTON SELATAN	7,334	19,483	14,483	15	1,253	10,005	67,557	Perlu Perbaikan	B



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 900.1.15.3-372 TAHUN 2024

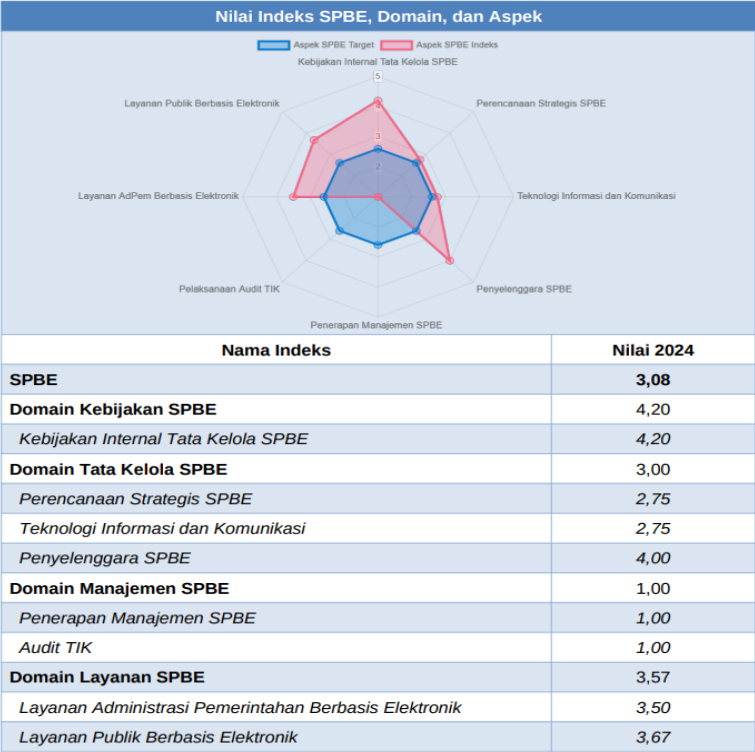
TENTANG

HASIL PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA
SELURUH INDONESIA TAHUN ANGGARAN 2023.

MENTERI DALAM NEGERI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sesuai Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri melakukan pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) terhadap Provinsi dan menetapkan predikat terbaik secara nasional;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, maka diperlukan pengukuran indeks pengelolaan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Seluruh Indonesia Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana







MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
HASIL PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PUBLIK DI KEMENTERIAN, LEMBAGA, DAN DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

a. bahwa untuk menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 7 ayat 4 huruf a, maka telah dilaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2025 dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik;

b. bahwa untuk menindaklanjuti pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pelayanan publik pada unit telah dilaksanakan proses pengolahan, validasi, dan penentuan akhir hasil penilaian; dan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Publik Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Lingkup Kementerian, Lembaga dan Daerah Tahun 2025.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

No	Instansi	Indeks	Kategori
287	Pemerintah Kabupaten Tolikara	3.15	B-
288	Pemerintah Kabupaten Buru	3.14	B-
289	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti	3.13	B-
290	Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan	3.13	B-
291	Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi	3.08	B-
292	Pemerintah Kabupaten Manggarai	3.08	B-
293	Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur	3.06	B-
294	Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe	3.04	B-
295	Pemerintah Kabupaten Barru	3.02	B-
296	Pemerintah Kabupaten Sinjai	3.01	B-
297	Pemerintah Kabupaten Lombok Barat	3.00	C
298	Pemerintah Kabupaten Muna Barat	2.96	C
299	Pemerintah Kabupaten Pati	2.96	C
300	Pemerintah Kabupaten Boalemo	2.95	C
301	Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong	2.95	C
302	Pemerintah Kabupaten Sumba Timur	2.94	C
303	Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah	2.94	C
304	Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu	2.92	C